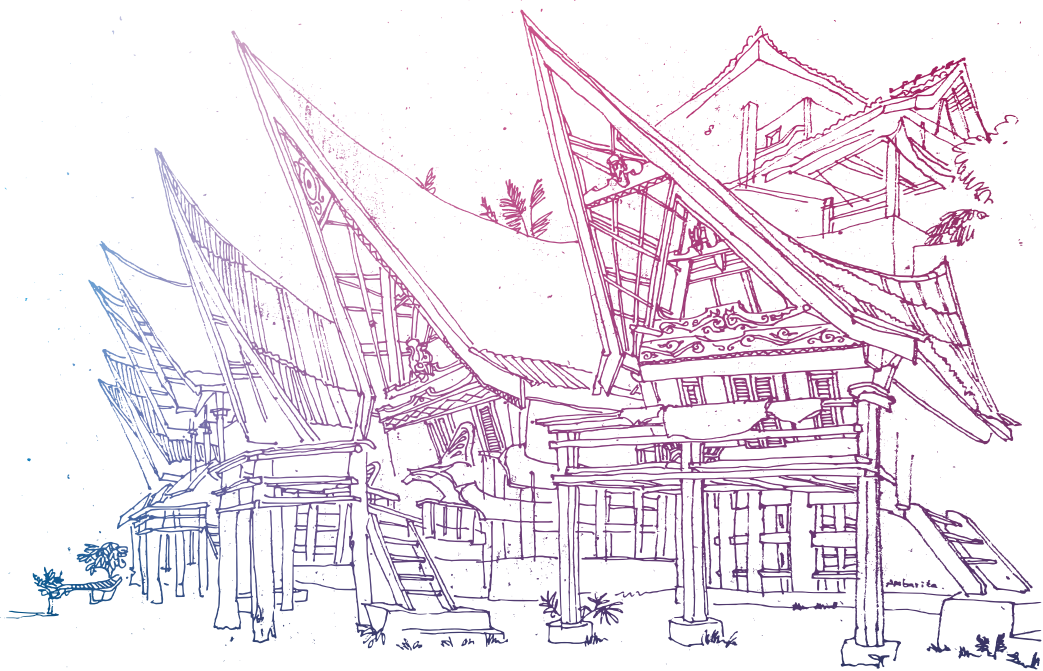


LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara

Agustus 2024





Laporan Perekonomian **PROVINSI SUMATERA UTARA**

Agustus 2024



Visi, Misi, & Nilai-nilai Strategis

Visi Bank Indonesia

“Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.”

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Nilai-nilai Strategis

Organisasi Bank Indonesia

1. Kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
2. Profesionalisme (*professionalism*);
3. Keunggulan (*excellence*);
4. Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
5. Koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Periode Agustus 2024. Laporan ini memuat evaluasi perkembangan ekonomi Sumatera Utara triwulan II 2024, serta prospek keseluruhan tahun 2024. Publikasi laporan ini sekaligus menjadi bagian dari visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat dari triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 4,88% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekspor, impor, dan investasi menjadi pendorong akselerasi ekonomi Sumatera Utara pada triwulan laporan. Hal ini seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, tetap tingginya nilai impor didukung permintaan domestik yang masih tinggi, serta meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II 2024. Di sisi lain, Konsumsi Rumah Tangga masih tetap kuat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 51% dari total PDRB meskipun tumbuh lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi mengalami peningkatan di tengah deselerasi LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan. Meningkatnya produksi kelapa sawit dan tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi pendorong meningkatnya LU Pertanian. Selanjutnya, akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan didorong perbaikan kinerja ekspor seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh pembangunan 36 venue PON XXI di 10 Kabupaten/Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum.

Kedua, tekanan Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dalam sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Provinsi Sumatera Utara masih tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Transportasi dengan komoditas pendorong inflasi diantaranya cabai merah, beras, bawang merah, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin (SKM). Peningkatan harga cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh menurunnya pasokan akibat faktor cuaca yang menyebabkan adanya banjir di sentra produksi. Selanjutnya, peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Peningkatan harga emas perhiasan diperkirakan sebagai dampak dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi *safe haven*. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik. Dari sisi pengeluaran, tetap kuatnya perekonomian Sumatera Utara didukung oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara itu, *rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan awal, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2024. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel B35 dan B40, dan kegiatan Pilkada menjelang akhir tahun 2024. Selanjutnya, penyelenggaraan PON XXI Aceh – Sumut pada triwulan III-2024 diperkirakan akan mendorong kinerja konstruksi dan pengeluaran investasi bangunan. Selain itu, terdapat kecenderungan tren penurunan suku bunga perbankan di level global seiring semakin terkendalinya laju inflasi global, yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Adapun beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai yaitu peningkatan ketidakpastian global serta konflik geopolitik yang masih berlanjut sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional. **Dari sisi pergerakan harga, kinerja inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy),** seiring upaya sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.

Akhir kata, selain sebagai referensi yang bermanfaat, kami mengharapkan buku ini dapat memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan, antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, masukan serta dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari laporan ini.

Medan, Agustus 2024
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara

ttd

I G P Wira Kusuma

Daftar Isi



Visi Misi Bank Indonesia	II
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	XI
Tabel Indikator	XII
Ringkasan Umum	XVI
Daftar Istilah	87
Tim Penyusun	89

Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1

1.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menunjukkan Peningkatan	3
1.2	Kinerja Sektor Pengeluaran Tetap Kuat Didukung Permintaan yang Terjaga	4
1.3	Lapangan Usaha Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi Tumbuh Lebih Tinggi	10

BOKS 1	Melangkah Bersama Melalui Program Kolaborasi NSI Day dan KKSU Tahun 2024	15
---------------	--	----

Bab II Keuangan Pemerintah

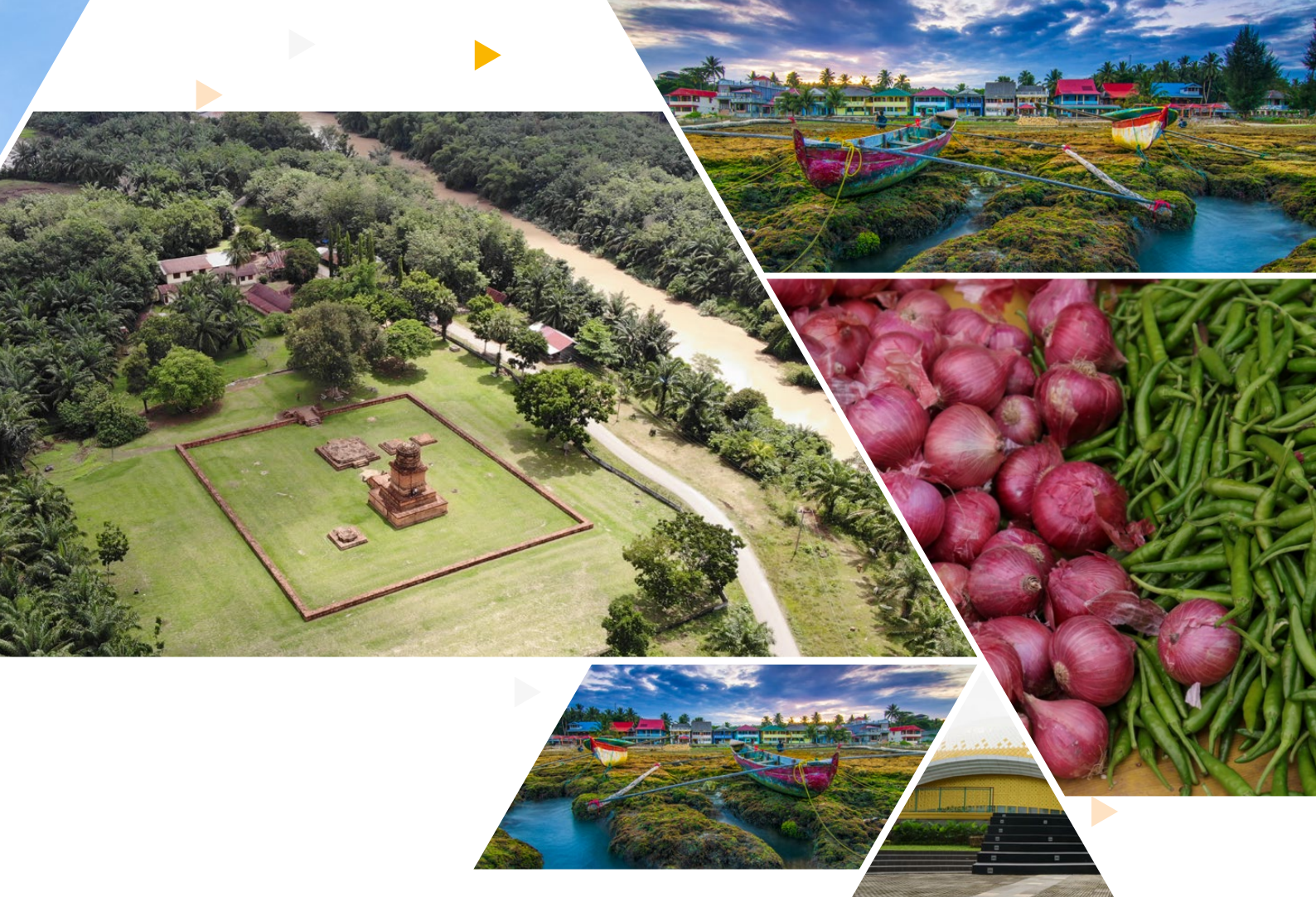
16

2.1	Gambaran Umum APBD 2024	21
2.2	Realisasi APBD Triwulan II 2024	22
2.3	Pagu Belanja APBN untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Lebih Tinggi	25
2.4	Realisasi Belanja APBN pada Triwulan II 2024 Mengalami Peningkatan	26

Bab III Perkembangan Inflasi Daerah

28

3.1	Kinerja Inflasi Triwulan II 2024	29
3.2	Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok	30
3.3	Inflasi Spasial	31
3.4	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	39
3.5	Perkembangan Inflasi Triwulan III 2024	43



Bab IV

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

- | | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 4.1 | Pembiayaan Daerah | 47 |
| 4.2 | Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM | 50 |

46

Bab VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

- | | | |
|-----|--|----|
| 6.1 | Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan | 67 |
| 6.2 | Kesejahteraan | 70 |

66

Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

- | | | |
|-----|---|----|
| 5.1 | Sistem Pembayaran Terus Tumbuh meskipun Melambat | 55 |
| 5.2 | Program Elektronifikasi Berjalan Lancar | 57 |
| 5.3 | Aliran Uang Kartal Mengalami <i>Net Inflow</i> | 58 |
| 5.4 | Aliran Transfer Dana Lintas Negara masih berkontraksi | 58 |

54

BOKS 2

Kesiapan TP2DD dalam Mendukung Optimalisasi Implementasi dan Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sumatera Utara

61

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

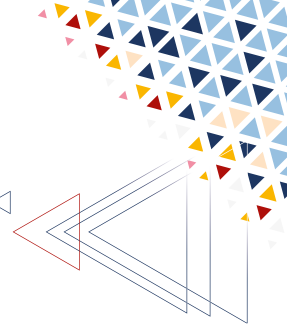
- | | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 7.1 | Prospek Pertumbuhan Ekonomi | 77 |
| 7.2 | Prospek Inflasi | 80 |
| 7.3 | Rekomendasi | 82 |

76



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan	3	Grafik 1.29	Jumlah Kunjungan Kapal	13
Grafik 1.2	Nilai dan Volume Ekspor	4	Grafik 1.30	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	13
Grafik 1.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara	4	Grafik 1.31	Tingkat Penghunian Kamar	14
Grafik 1.4	Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional	5	Grafik 1.32	Kredit Transportasi	14
Grafik 1.5	<i>Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing</i>	5	Grafik 2.1	Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara	21
Grafik 1.6	Pangsa Komoditas Ekspor	5	Grafik 2.2	Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara	21
Grafik 1.7	Ekspor CPO	5	Grafik 2.3	Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	22
Grafik 1.8	Ekspor Karet	6	Grafik 2.4	Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara	22
Grafik 1.9	Ekspor Kopi	6	Grafik 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Triwulan II 2024	23
Grafik 1.10	Nilai dan Volume Impor	6	Grafik 2.6	Realisasi PAD Triwulan II 2024	23
Grafik 1.11	Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang	6	Grafik 2.7	Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2024	24
Grafik 1.12	<i>Likert Scale</i> Permintaan Domestik dan Permintaan Ekspor	7	Grafik 2.8	Realisasi Belanja Operasi Triwulan II 2024	24
Grafik 1.13	Pengadaan Semen	7	Grafik 2.9	Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara	26
Grafik 1.14	Realisasi Investasi	7	Grafik 2.10	Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja	26
Grafik 1.15	Pangsa Realisasi Investasi	8	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	29
Grafik 1.16	Survei Penjualan Eceran	8	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya	29
Grafik 1.17	Survei Konsumen Bank Indonesia	9	Grafik 3.3	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok	30
Grafik 1.18	Kredit Konsumsi	9	Grafik 3.4	Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok	32
Grafik 1.19	Perkembangan Harga Pupuk	10	Grafik 3.5	Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok	33
Grafik 1.20	Nilai Tukar Petani	10	Grafik 3.6	Inflasi Kota Sibolga per Kelompok	34
Grafik 1.21	Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit	11	Grafik 3.7	Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok	35
Grafik 1.22	Perkembangan Harga Gabah	11	Grafik 3.8	Inflasi Kabupaten Deli Serdang per Kelompok	36
Grafik 1.23	Kredit Pertanian	11	Grafik 3.9	Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok	36
Grafik 1.24	Konsumsi Listrik Industri	11	Grafik 3.10	Inflasi Kota Medan per Kelompok	37
Grafik 1.25	<i>Likert Scale</i> Biaya Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Energi	12	Grafik 3.11	Inflasi Kab. Labuhanbatu per Kelompok	38
Grafik 1.26	Kredit Industri Pengolahan	12	Grafik 3.12	Historis Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Utara	43
Grafik 1.27	Kredit Konstruksi	12			
Grafik 1.28	Kredit Perdagangan	13			



Grafik 3.13	Historis Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Utara	44	Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	59
Grafik 4.1	Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara	47	Grafik 5.12	Perkembangan Transaksi PJP-LR	59
Grafik 4.2	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	47	Grafik 6.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara	67
Grafik 4.3	Perkembangan Kredit Multiguna	47	Grafik 6.2	TPT Menurut Jenjang Pendidikan	68
Grafik 4.4	NPL Kredit Rumah Tangga	48	Grafik 6.3	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	68
Grafik 4.5	Pertumbuhan Kredit Korporasi	49	Grafik 6.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK	68
Grafik 4.6	Pertumbuhan DPK Sumatera Utara berdasarkan Sektor	49	Grafik 6.5	Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha	69
Grafik 4.7	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan	49	Grafik 6.6	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	69
Grafik 4.8	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha	50	Grafik 6.7	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	70
Grafik 4.9	NPL Kredit Korporasi	50	Grafik 6.8	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	70
Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit UMKM	50	Grafik 6.9	Perkembangan Nilai Tukar Petani	70
Grafik 4.11	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit	50	Grafik 6.10	Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan	71
Grafik 4.12	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM	51	Grafik 6.11	IT dan IB Sumatera Utara	71
Grafik 4.13	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	51	Grafik 6.12	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara	71
Grafik 4.14	Perkembangan NPL Kredit UMKM	52	Grafik 6.13	Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan	72
Grafik 5.1	Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE	55	Grafik 6.14	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	72
Grafik 5.2	Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit	55	Grafik 6.15	Perkembangan Rasio Gini	73
Grafik 5.3	Alokasi Penggunaan Kartu Kredit	55	Grafik 6.16	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	73
Grafik 5.4	Perkembangan BPNT	56	Grafik 6.17	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan	73
Grafik 5.5	Perkembangan PKH	56	Grafik 6.18	Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional	74
Grafik 5.6	Perkembangan RTGS	56			
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi <i>E-Commerce</i>	56			
Grafik 5.8	Perkembangan SKNBI	57			
Grafik 5.9	Perkembangan QRIS	57			
Grafik 5.10	Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i>	58			





Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara	9
Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara	25
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)	25
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan II 2024	30
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional	32
Tabel 3.3	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel	39
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor	48
Tabel 4.2	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah	48
Tabel 6.1	Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)	70
Tabel 6.2	Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan	72
Tabel 6.3	IPM Sumut Menurut Komponen	74
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	78



Daftar Gambar

Gambar B1.1	Program Kolaborasi NSI Day Dan KKSU Tahun 2024	16
Gambar B1.2	Dokumentasi Perhelatan NSI DAY dan KKSU Tahun 2024	17
Gambar B2.1	(a) Sebaran Kab/Kota di Sumut berdasarkan Kategori Hasil Indeks ETPD Sem I-2024 (b) Perkembangan Indeks ETPD Sumatera Utara 2021-2024	62
Gambar B2.2	(a) <i>High Level Meeting</i> TP2DD Provinsi Sumatera Utara diikuti oleh Kab/Kota, (b) <i>Capacity Building Self assessment Championship</i> & Pengisian Indeks ETPD, (c) Pelaksanaan Program Sinergi TP2DD dan Perluasan Keuangan Digital QRIS	63



Tabel Indikator

	2021					2022					2023					2024	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (% yoy)	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94	5,02	5,01	4,88	4,95
PENGELUARAN																	
Konsumsi Rumah Tangga	-4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42	5,41	5,59	5,54	5,40
Konsumsi LNPR	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72	13,04	9,27	17,69	8,20
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04	4,81	3,98	2,04	1,61
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28	6,21	4,48	4,38	4,40
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11	0,28	-0,40	8,86	11,24
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97	0,73	-1,70	10,54	13,10
LAPANGAN USAHA																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68	2,98	3,02	3,42	3,72
Pertambangan dan Penggalan	-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37	3,23	3,46	3,91	5,29
Industri Pengolahan	1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92	3,13	3,44	3,73	4,44
Pengadaan Listrik, Gas	-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36	3,33	2,16	3,22	2,86
Pengadaan Air	3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47	2,89	2,89	3,10	2,90
Konstruksi	-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81	7,60	6,41	6,43	6,45
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06	6,91	5,81	5,42	5,27
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41	11,38	13,12	7,51	5,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19	10,87	10,22	11,63	9,75
Informasi dan Komunikasi	4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82	7,83	7,80	7,85	6,71
Jasa Keuangan	1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68	5,29	5,50	4,25	6,06
Real Estate	0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85	-0,25	3,20	3,03	3,32
Jasa Perusahaan	-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35	3,63	6,68	3,75	3,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36	0,10	1,93	4,80	4,77
Jasa Pendidikan	0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27	6,37	7,39	7,36	5,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33	8,70	6,43	3,69	5,49
Jasa lainnya	-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14	8,22	9,55	4,15	5,19
INFLASI																	
INDEKS HARGA KONSUMEN																	
Sumatera Utara	104,50	104,83	105,35	106,26	106,26	107,91	110,71	111,82	112,77	112,77	113,09	113,54	114,22	115,30	115,30	106,63	106,75
Medan	104,18	104,50	105,03	105,92	105,92	107,45	110,24	111,34	112,38	112,38	112,58	112,96	113,64	114,84	114,84	106,24	106,36
Sibolga	105,92	106,30	107,35	108,15	108,15	110,60	113,21	114,78	115,10	115,10	116,38	117,60	118,68	118,32	118,32	108,02	108,42
Pematangsiantar	106,03	106,41	106,64	107,79	107,79	109,87	112,49	113,32	114,43	114,43	115,15	115,98	116,15	117,06	117,06	107,12	106,95
Padangsidempuan	106,58	107,28	107,77	108,68	108,68	111,29	114,48	115,93	115,64	115,64	117,27	118,04	119,00	119,05	119,05	107,40	107,78
Gunungstoli	106,75	106,77	107,08	108,43	108,43	110,34	113,64	114,75	114,65	114,65	114,60	114,79	116,87	117,35	117,35	106,00	106,00
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															107,26	107,50
Deli Serdang																106,22	106,58
Labuhanbatu																110,50	109,46
Nasional	106,15	106,46	106,53	107,66	107,66	108,95	111,09	112,87	113,59	113,59	114,36	115,00	115,44	116,55	116,55	106,13	106,28

Sumber: BPS

	2021					2022					2023					2024	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
INFLASI																	
LAJU INFLASI TAHUNAN (%YOY)																	
Sumatera Utara	1,43	1,69	2,40	1,71	1,71	3,26	5,61	6,14	6,12	6,12	4,80	2,55	2,15	2,25	2,25	3,67	3,35
Medan	1,25	1,52	2,26	1,70	1,70	3,14	5,50	6,01	6,10	6,10	4,77	2,47	2,06	2,19	2,19	3,62	3,31
Sibolga	2,08	2,82	3,87	1,86	1,86	4,42	6,50	6,92	6,42	6,42	5,22	3,88	3,40	2,80	2,80	4,28	3,75
Pematangsiantar	2,61	3,14	3,65	2,12	2,12	3,62	5,71	6,26	6,17	6,17	4,81	3,10	2,50	2,29	2,29	3,84	3,35
Padangsidempuan	1,93	1,80	2,58	1,50	1,50	4,42	6,71	7,57	6,40	6,40	5,37	3,11	2,65	2,95	2,95	4,10	4,13
Gunungsitoli	3,22	3,36	2,02	0,54	0,54	3,36	6,43	7,16	5,74	5,74	3,86	1,01	1,85	2,36	2,36	3,90	3,48
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															4,88	3,81
Deli Serdang																2,89	3,37
Labuhanbatu																5,87	3,18
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	2,61	3,05	2,51
LAJU INFLASI KUMULATIF (%YTD)																	
Sumatera Utara	0,02	0,34	0,83	1,71	1,71	1,54	4,18	5,23	6,12	6,12	0,28	0,68	1,29	2,25	2,25	1,53	1,65
Medan	0,03	0,34	0,84	1,70	1,70	1,44	4,08	5,12	6,10	6,10	0,17	0,52	1,12	2,19	2,19	1,62	1,73
Sibolga	-0,24	0,12	1,11	1,86	1,86	2,27	4,67	6,13	6,42	6,42	1,12	2,17	3,12	2,80	2,80	2,46	2,84
Pematangsiantar	0,45	0,81	1,03	2,12	2,12	1,93	4,36	5,13	6,17	6,17	0,63	1,35	1,50	2,29	2,29	1,84	1,68
Padangsidempuan	-0,47	0,19	0,64	1,50	1,50	2,40	5,34	6,67	6,40	6,40	1,41	2,08	2,91	2,95	2,95	2,23	2,59
Gunungsitoli	-1,02	-1,00	-0,71	0,54	0,54	1,76	4,81	5,83	5,74	5,74	-0,04	0,12	1,94	2,36	2,36	1,58	1,58
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															0,82	1,04
Deli Serdang																0,93	1,27
Labuhanbatu																3,42	2,44
Nasional	0,44	0,74	0,80	1,87	1,87	1,20	3,19	4,84	5,51	5,51	0,68	1,24	1,63	2,61	2,61	0,93	1,07
LAJU INFLASI BULANAN (%MTM)																	
Sumatera Utara	-0,08	0,03	0,29	0,46	0,46	0,71	1,40	1,00	1,50	1,50	-0,31	0,31	0,37	0,57	0,57	0,72	-0,33
Medan	-0,03	0,03	0,31	0,44	0,44	0,68	1,39	0,98	1,54	1,54	-0,30	0,29	0,38	0,61	0,61	0,73	-0,45
Sibolga	-0,29	0,31	0,31	0,17	0,17	0,93	1,12	0,33	1,44	1,44	-0,66	0,62	0,44	0,08	0,08	0,72	0,12
Pematangsiantar	-0,23	0,23	0,32	0,85	0,85	0,77	1,36	1,50	1,61	1,61	-0,30	0,52	0,16	0,56	0,56	0,61	-0,55
Padangsidempuan	-0,57	-0,26	0,04	0,35	0,35	1,11	1,29	0,99	0,63	0,63	-0,18	0,21	0,49	0,21	0,21	0,97	0,11
Gunungsitoli	-0,54	-0,28	-0,13	0,62	0,62	0,39	2,72	0,61	1,79	1,79	-0,91	0,21	0,38	0,21	0,21	0,37	0,10
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)															0,12	-0,51
Deli Serdang																0,61	0,08
Labuhanbatu																1,62	-0,91
Nasional	0,08	-0,16	-0,04	0,57	0,57	0,66	0,61	1,17	0,66	0,66	0,18	0,14	0,19	0,41	0,41	0,52	-0,08



Tabel Indikator

SSK	2021				2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	267,95	279,66	285,15	293,09	302,26	298,79	303,13	305,72	303,31	302,79	306,71	318,32	320,69	324,11
Giro	41,95	47,37	49,24	47,33	58,56	54,29	58,90	53,27	53,98	47,48	52,65	52,77	55,82	57,08
Tabungan	112,21	119,27	121,01	128,98	130,78	134,21	133,54	136,30	133,11	137,01	134,61	137,84	137,71	139,59
Deposito	113,79	113,03	114,90	116,78	112,93	110,29	110,69	116,15	116,22	118,30	119,45	127,71	127,16	127,44
Kredit (Rp triliun)	230,92	235,44	230,33	237,79	243,35	253,87	255,92	253,50	249,86	247,67	253,65	257,44	262,50	268,01
Modal Kerja	109,39	115,13	112,70	109,11	111,66	118,21	114,33	112,34	108,51	105,73	116,11	117,35	118,02	116,34
Investasi	58,48	57,75	53,50	64,02	65,32	68,54	73,02	70,99	70,40	69,86	63,11	62,99	65,17	69,96
Konsumsi	63,06	62,55	64,13	64,66	66,37	67,12	68,58	70,18	70,94	72,08	74,43	77,10	79,32	81,72
Loan to Deposit Ratio (%)	86,2%	84,2%	80,8%	81,1%	80,5%	85,0%	84,7%	82,9%	82,4%	81,8%	82,7%	80,9%	81,9%	82,7%
NPL Kredit (%)	3,50%	3,26%	3,02%	2,76%	2,53%	2,43%	2,46%	2,44%	2,50%	2,39%	2,03%	1,81%	1,92%	1,98%

Sumber: Data Bank Umum Sumatera Utara Menurut Lokasi Proyek

SISTEM PEMBAYARAN	2021				2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
SP TUNAI														
Inflow (Satker Kas- dlm juta)	14.640.646	12.370.252	8.242.936	6.772.770	11.260.835	12.472.201	9.543.674	6.153.405	13.385.862	10.844.317	8.755.255	4.498.681	12.800.416	11.189.381
Outflow (Satker Kas- dlm juta)	(4.775.401)	(12.883.954)	(7.944.287)	(14.006.024)	(6.142.670)	(9.224.180)	(6.933.616)	(12.132.195)	(6.212.541)	(9.939.636)	(5.493.867)	(13.867.608)	(7.329.219)	(8.761.221)
Netflow (Satker Kas- dlm juta)	9.865.245	(513.702)	298.649	(7.233.254)	5.118.165	3.248.021	2.610.058	(5.978.790)	7.173.321	904.680	3.261.388	(9.368.927)	5.471.198	2.428.160
SP NON TUNAI														
RTGS- volume	69.323	70.891	72.764	82.477	70.653	68.855	63.383	70.181	57.147	53.965	61.853	62.901	52.795	53.226
RTGS- nominal (Rp milyar)	233.777	256.453	218.342	232.096	219.297	228.638	202.965	233.040	185.521	175.577	218.096	211.583	178.232	189.913
SKNBI- volume	692.628	672.999	637.212	718.199	605.239	602.556	593.057	607.008	500.721	502.369	537.828	559.675	435.213	432.940
SKNBI- nom- inal (Rp milyar)	38.565	37.735	36.757	42.526	36.793	36.235	33.734	34.540	30.656	27.983	30.897	30.812	26.894	26.668



Halaman ini sengaja dikosongkan

ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat dari triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 4,88% (yoy). Dari sisi pengeluaran, akselerasi ekonomi Sumatera Utara didorong oleh peningkatan kinerja ekspordasi investasi seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara, peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, serta meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II 2024. Di sisi lain, meskipun tumbuh lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya, Konsumsi Rumah Tangga masih tetap menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 51% dari total PDRB.

Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi mengalami peningkatan di tengah deselerasi LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian tumbuh meningkat ditopang oleh meningkatnya produksi kelapa sawit dan tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan didorong perbaikan kinerja ekspor seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh pembangunan 36 *venue* PON XXI di 10 Kabupaten/Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum.

ASESMEN KEUANGAN DAERAH

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan, namun menurun dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan II 2024 sebesar Rp6,31 triliun, lebih tinggi dari realisasi triwulan II 2023 sebesar Rp5,17 triliun yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan II 2024 mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja yakni Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2024 terpantau meningkat hingga 3,69% (yoy) dari tahun 2023. Sementara itu, realisasinya pada triwulan II 2024 adalah sebesar Rp10,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp9,11 triliun. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Modal.

ASESMEN INFLASI

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dalam sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Transportasi. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bawang merah, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Peningkatan harga cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh menurunnya pasokan akibat faktor cuaca yang menyebabkan adanya banjir di sentra produksi. Selanjutnya, peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tidak meratanya panen yang terjadi di beberapa wilayah. Emas perhiasan juga menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi *safe haven*. Sementara itu, peningkatan harga SKM disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%.

Pelaksanaan koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN SERTA UMKM

Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga. Pada Tw-II 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 8,21% yoy dari triwulan sebelumnya 5,06% yoy dengan risiko yang terjaga tercermin dari *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah sebesar 1,98%. Hal ini didorong oleh tetap kuatnya pertumbuhan seluruh jenis kredit, baik Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh kuat seiring dengan perayaan Idul Fitri serta berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM juga tetap kuat dan berimbang antara kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Kinerja kredit korporasi di sektor perdagangan dan industri pengolahan tumbuh kuat seiring berlanjutnya investasi sektor swasta dan tingginya permintaan jelang HBKN Idul Fitri. Meski demikian, kredit di sektor pertanian masih tertahan seiring likuiditas sektor swasta yang masih cukup ample. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga. Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 82,7% di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II-2024, transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh meskipun melambat. Transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Nominal transaksi kartu ATM debit yang tumbuh melambat pada triwulan II-2024 diindikasikan seiring dengan munculnya berbagai inovasi instrumen pembayaran lainnya seperti *digital banking* sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam bertransaksi. Daya beli masyarakat bawah masih didukung oleh penyerapan bantuan sosial yang sesuai dengan rencana. Akselerasi sistem pembayaran non tunai didukung oleh perbaikan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Selain itu secara keseluruhan, aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II-2024 mencatatkan *net inflow* sebesar Rp2.4 triliun. Lebih lanjut, layanan kegiatan usaha penukaran valas (KUPVA) menunjukkan pergerakan yang relatif stagnan dengan kontraksi yang terbatas. Di sisi lain, transaksi transfer dana melalui PJP LR masih berkontraksi sejalan dengan penyesuaian pemulihan aktivitas remitansi secara persisten.

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 menjadi 5,10% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,24%. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 7,99% dari 8,15% pada bulan Maret 2023. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap kuat didukung oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara itu, *rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan awal, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel yang mendukung industri kelapa sawit, dan kegiatan Pilkada menjelang akhir tahun 2024. Penyelenggaraan PON XXI Aceh – Sumut pada triwulan III-2024 diperkirakan akan mendorong kinerja konstruksi dan pengeluaran investasi bangunan. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai yaitu peningkatan ketidakpastian global serta konflik geopolitik yang masih berlanjut sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional.

Di sisi lain, kinerja inflasi Sumatera Utara tahun 2024 diperkirakan akan tetap terjaga dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.





Bab I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy) meningkat dari triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 4,88% (yoy). Dari sisi pengeluaran, akselerasi ekonomi Sumatera Utara didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, impor, dan investasi seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, tetap tingginya nilai impor didukung permintaan domestik yang cukup baik, serta meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II 2024. Di sisi lain, meskipun tumbuh lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya, Konsumsi Rumah Tangga masih tetap kuat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 51% dari total PDRB. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi mengalami peningkatan di tengah deselerasi LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian tumbuh meningkat ditopang oleh meningkatnya produksi kelapa sawit dan tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan didorong perbaikan kinerja ekspor seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh pembangunan 36 *venue* PON XXI di 10 Kabupaten/Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum.



1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA MENUNJUKKAN PENINGKATAN



PERTUMBUHAN EKONOMI % (yoy)

SUMATERA
UTARA

4,88 ▲ 4,95

■ Triwulan I 2024 ■ Triwulan II 2024

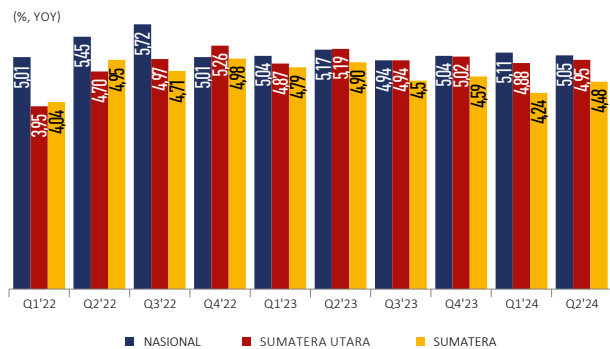
NASIONAL

5,11 ▼ 5,05

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami peningkatan di triwulan II 2024.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,88% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera yang tumbuh sebesar 4,48% (yoy) – (Grafik 1.1). Adapun pada triwulan II 2024, posisi andil terbesar perekonomian Sumatera masih dipegang oleh Sumatera Utara sebesar 23,51%.

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor, impor, dan investasi mengalami peningkatan di tengah Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih moderat dan Konsumsi Pemerintah yang melambat. Peningkatan kinerja ekspor dan impor didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara yang mendorong peningkatan ekspor di sektor jasa, peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, serta tetap tingginya nilai impor seiring dengan permintaan domestik yang cukup baik pada periode laporan. Selanjutnya, peningkatan kinerja investasi mengindikasikan menguatnya keyakinan investor terhadap perekonomian domestik tecermin dari peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II 2024. Di sisi lain, meskipun tumbuh lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya, Konsumsi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1

Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan

Rumah Tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 51% dari total PDRB. Sementara itu, perlambatan Konsumsi Pemerintah tecermin dari realisasi belanja APBD triwulan II 2024 yang mengalami penurunan, didorong oleh penurunan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja.

Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi mengalami peningkatan di tengah deselerasi LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian tumbuh meningkat ditopang oleh meningkatnya produksi kelapa sawit dan tren normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) dan Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH). Meskipun demikian, akselerasi kinerja LU Pertanian lebih tinggi tertahan pergeseran panen raya padi sawah ke triwulan I 2024 diikuti dengan penurunan harga gabah kering giling dan gabah kering panen pada periode laporan. Selanjutnya, akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan didorong perbaikan kinerja ekspor seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh pembangunan 36 *venue* PON XXI di 10 Kabupaten/ Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum. Di sisi lain, LU Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan pada triwulan II 2024. Perlambatan LU Perdagangan sejalan dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih moderat. Sementara itu, perlambatan LU Transportasi



Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara

	2021					2022					2023					2024	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94	5,02	5,01	4,88	4,95
PENGELUARAN																	
Konsumsi Rumah Tangga	-4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42	5,41	5,59	5,54	5,40
Konsumsi LNPRT	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72	13,04	9,27	17,69	8,20
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04	4,81	3,98	2,04	1,61
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28	6,21	4,48	4,38	4,40
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11	0,28	-0,40	8,86	11,24
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97	0,73	-1,70	10,54	13,10

Sumber: BPS (diolah)

dan Pergudangan tecermin dari penurunan jumlah kunjungan kapal ke Sumatera Utara.

1.2 KINERJA SEKTOR PENGELUARAN TETAP KUAT DIDUKUNG PERMINTAAN YANG TERJAGA



EKSPOR
%(YOY)

8,86

■ Triwulan I 2024



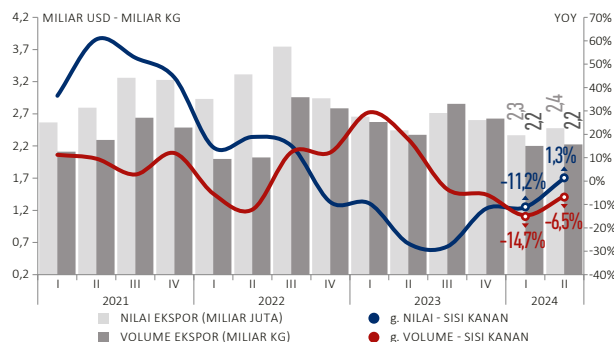
11,24

■ Triwulan II 2024

Komponen ekspor terus mengalami pemulihan di tengah risiko berlanjutnya konflik geopolitik dan masih lemahnya industri manufaktur di negara tujuan ekspor. Perkembangan tersebut tecermin dari

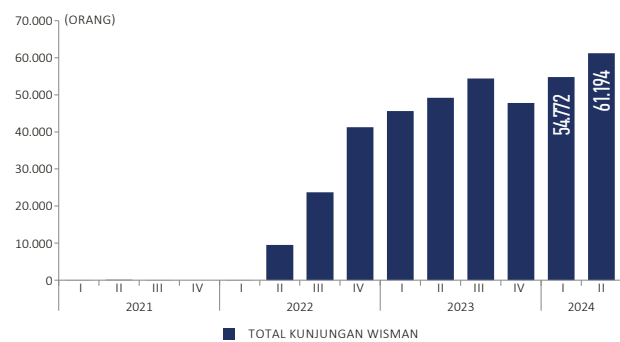
pertumbuhannya ekspor yang tumbuh 1,3% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -11,2% (yoy) – (Grafik 1.2). Hal ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara yang mendorong peningkatan ekspor di sektor jasa – (Grafik 1.3) dan peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional pada triwulan II 2024 – (Grafik 1.4).

Di sisi lain, kinerja ekspor Sumatera Utara yang lebih tinggi tertahan aktivitas bisnis dan industri negara mitra dagang yang berada di bawah zona ekspansif. Aktivitas bisnis di negara mitra seperti Jepang, Tiongkok, Zona Eropa, dan Amerika Serikat terpantau masih tertahan, tecermin dari indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) *Manufacturing* negara tersebut yang berada di bawah level ekspansi pada triwulan II 2024. Di sisi lain, PMI India yang melanjutkan tren ekspansi sejak triwulan III 2020 dan PMI Singapura dan Korea Selatan yang kembali pada level ekspansi pada triwulan laporan mampu menopang kinerja ekspor lebih tinggi (Grafik 1.5).



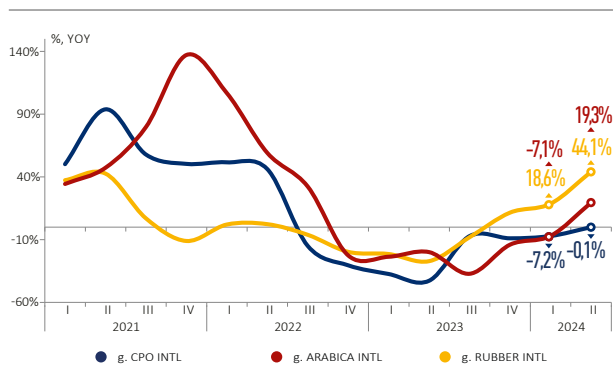
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.2 Nilai dan Volume Ekspor



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara

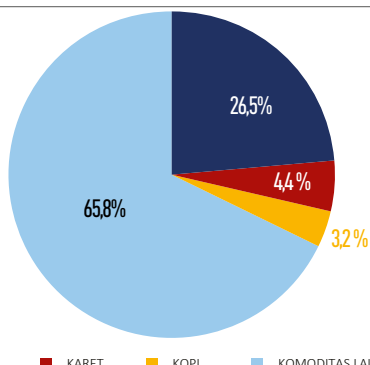


Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional

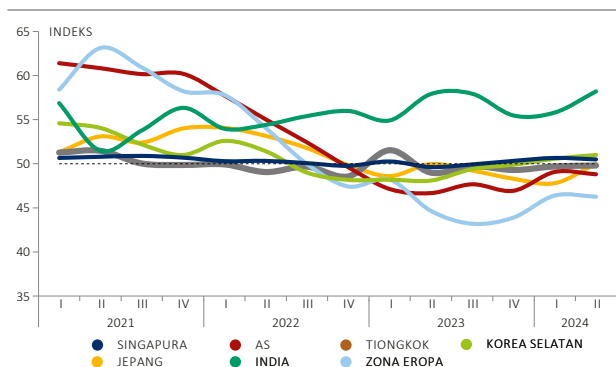
Ditinjau dari sisi komoditas, kinerja CPO sebagai komoditas utama ekspor Sumatera Utara pada triwulan laporan dengan pangsa sebesar 26,5% menunjukkan peningkatan – (Grafik 1.6). Tren harga CPO di pasar internasional yang berangsur membaik berdampak pada peningkatan nilai ekspor CPO pada triwulan II 2024 yang tercatat sebesar USD643,2 juta, lebih tinggi dari nilai ekspor triwulan sebelumnya yang sebesar USD554,1 juta. Adapun pertumbuhan nilai ekspor CPO juga tercatat membaik meski masih berkontraksi menjadi -18,8% (yoy), dari triwulan I 2024 yang berkontraksi -34,1% (yoy). Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor CPO, volume ekspor CPO pada triwulan II 2024 turut meningkat sebesar 700,8 ton, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 626,3 ton – (Grafik 1.7).

Berbeda dengan ekspor CPO, ekspor komoditas karet mencatat penurunan pada triwulan II 2024. Pada triwulan laporan, ekspor karet mencatatkan



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.6 Pangsa Komoditas Ekspor

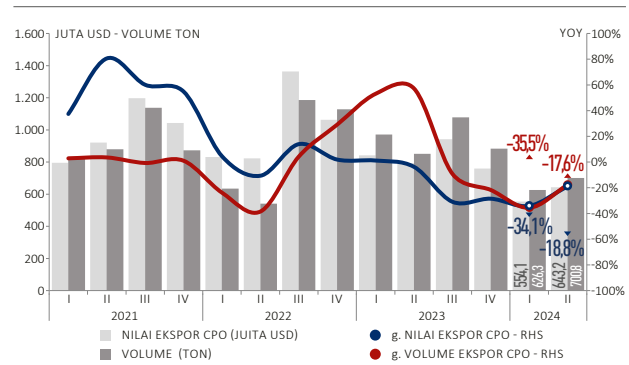


Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, diolah

Grafik 1.5 Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing

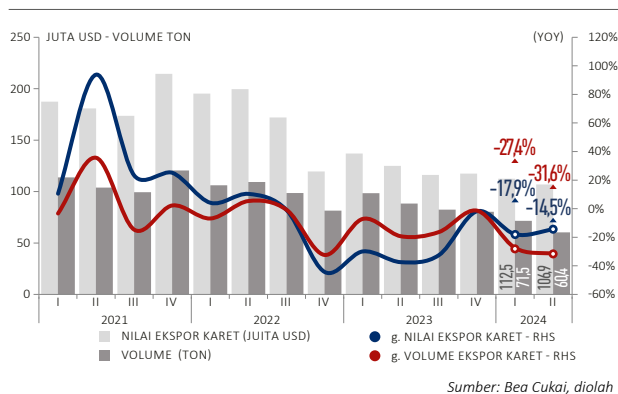
pangsa sebesar 4,4% – (Grafik 1.6). Di tengah perbaikan harga karet internasional, nilai dan volume ekspor karet masing-masing berkontraksi sebesar -14,5% (yoy) dan -31,6% (yoy) di triwulan II 2024 – (Grafik 1.8). Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya aktivitas negara tujuan ekspor utama karet Sumatera Utara seperti Jepang yang tercermin dari indeks PMI yang berada di bawah level ekspansi – (Grafik 1.5).

Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor komoditas kopi mencapai 2,5% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 73,3% (yoy). Hal ini lebih disebabkan base effect nilai dan volume ekspor kopi pada triwulan I 2023 yang sangat rendah sehingga pertumbuhan nilai dan volume ekspor kopi pada triwulan I 2024 mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Dari segi nominal, nilai ekspor kopi pada periode laporan tercatat sebesar USD78,5 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD82,4 juta namun



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.7 Ekspor CPO



Grafik 1.8 Ekspor Karet

lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar USD76,5 juta. Harga kopi di pasar internasional yang terus menunjukkan pemulihan pada triwulan II 2024 berdampak pada tetap tingginya nilai ekspor kopi. Di sisi lain, volume ekspor kopi pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 10,5 ton, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 11,0 ton – (Grafik 1.9).

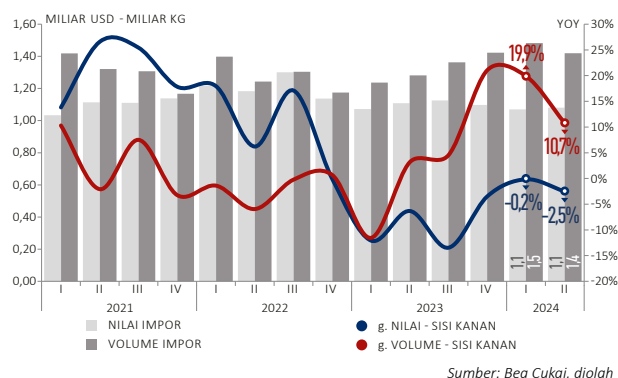


IMPOR
%(YOY)

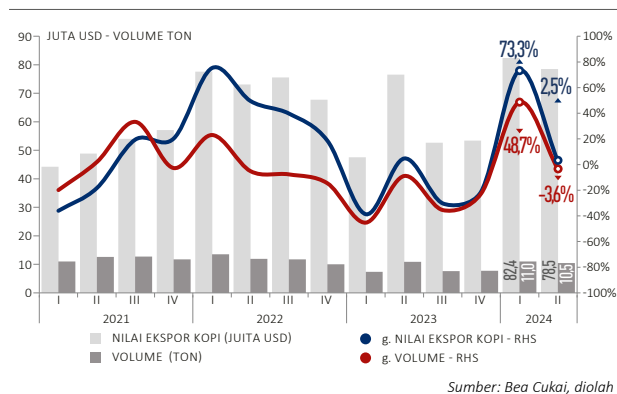
10,54 13,10

■ Triwulan I 2024 ■ Triwulan II 2024

Sejalan dengan kinerja ekspor, komponen impor triwulan II 2024 mengalami peningkatan. Kinerja impor Sumatera Utara triwulan II 2024 tumbuh



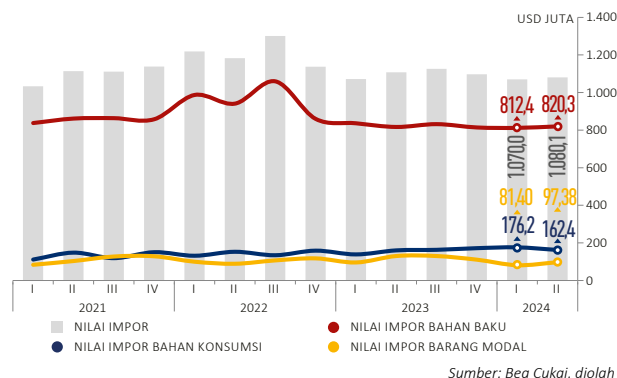
Grafik 1.10 Nilai dan Volume Impor



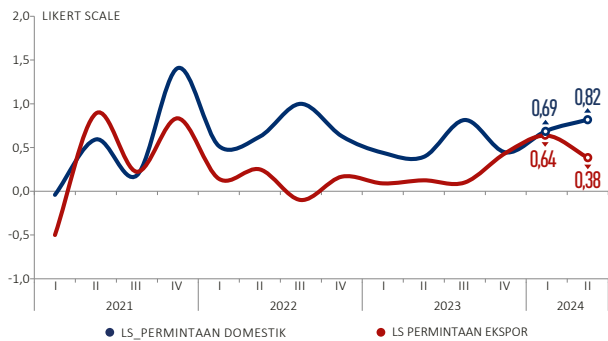
Grafik 1.9 Ekspor Kopi

13,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,54% (yoy). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai impor berkontraksi sebesar -2,5% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,2% (yoy). Meski demikian, dari segi nominal, nilai impor Sumatera Utara mencapai USD1,1 miliar, relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya. Tetap tingginya nilai impor mengindikasikan aktivitas ekonomi yang cukup baik pada periode laporan. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan sebesar 10,7% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 19,9% (yoy) – (Grafik 1.10).

Berdasarkan kelompoknya, realisasi impor bahan baku mendominasi pangsa nilai impor Sumatera Utara dengan pangsa sebesar 76,67% diikuti barang konsumsi dengan pangsa 15,18%. Akibatnya, meningkatnya nilai impor bahan baku menjadi USD820,3 juta dan tetap tingginya nilai



Grafik 1.11 Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang



Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.12 Likert Scale Permintaan Domestik dan Permintaan Ekspor

impor barang konsumsi menjadi USD162,4 juta pada periode laporan mendorong tetap kuatnya nilai impor barang di Sumatera Utara secara umum – (Grafik 1.11). Perbaikan kinerja impor juga tercermin pada *Likert Scale* Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan permintaan aktivitas industri dalam negeri dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya - (Grafik 1.12)

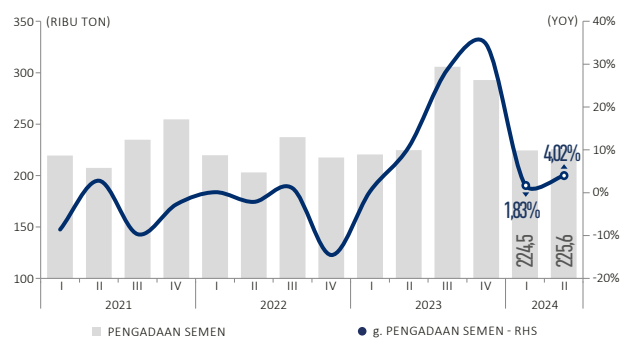


**INVESTASI
PMTB
%(YOY)**

4,38  **4,40**

■ Triwulan I 2024 ■ Triwulan II 2024

Kinerja investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sedikit meningkat mengindikasikan menguatnya keyakinan investor terhadap perekonomian domestik pasca berlalunya Pemilu 2024. Kinerja investasi PMTB menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2024 dengan capaian sebesar 4,40% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,38% (yoy). Meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor konstruksi dan turut tercermin pada peningkatan volume penjualan semen domestik triwulan laporan yang tumbuh sebesar 4,02% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,83% (yoy) (Grafik 1.13).

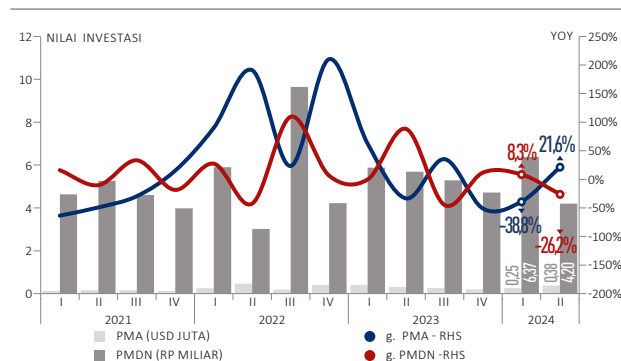


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.13 Pengadaan Semen

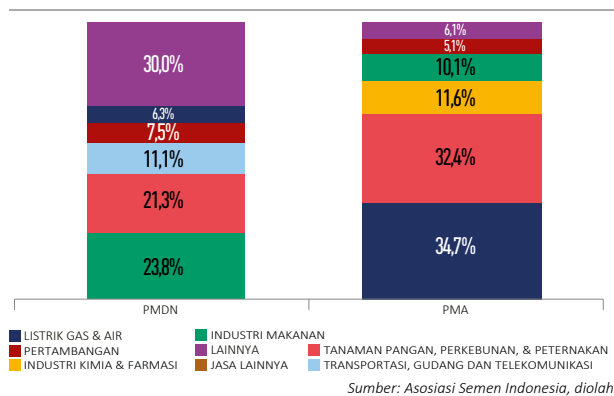
Adapun nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan II 2024 mencapai Rp4,20 miliar atau terkontraksi -26,2% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp6,37 miliar dengan pertumbuhan 8,3% (yoy) – (Grafik 1.14). Realisasi investasi PMDN utamanya berasal dari sektor Industri Makanan (23,8%) dan sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (21,3%) – (Grafik 1.15). Sementara itu, nilai investasi PMA pada triwulan II 2024 menunjukkan perbaikan tumbuh sebesar 21,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -38,8% (yoy). Perbaikan PMA ini utamanya didorong oleh investasi di sektor Listrik, Gas, dan Air (34,7%) dan sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (32,4%).

Bank Indonesia bersama tim North Sumatra Invest (NSI) secara aktif terus mendorong promosi investasi di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2024, kegiatan tersebut di antaranya *site visit* proyek investasi strategis di Sumatera Utara pada tanggal 25-26 Juni 2024 bersama dengan



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.14 Realisasi Investasi



Grafik 1.15 Pangsa Realisasi Investasi

Konsulat Jenderal dan Konsul Kehormatan di Kota Medan. *Site visit* ini mengambil tema SIAP! (*Strengthen Investment through Attractive Projects*) yang memiliki makna pentingnya penguatan sektor investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan proyek investasi yang menarik dan potensial. Adapun kegiatan ini ditujukan sebagai upaya promosi proyek investasi *ready now* antara lain Toba Caldera Resort, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung serta proyek investasi *ready next* hasil penjarangan NSI *Promotion Forum* tahun 2023 dan *North Sumatra Investment Challenge* (NICe) tahun 2024 antara lain (i) Potensi Agrowisata Lumbanjudu (Kabupaten Toba), (ii) Pembangunan Pusat Pasar Berastagi (Kabupaten Karo), serta (iii) Kawasan Terintegrasi Wisata Bukit Lawang-Tangkahan (Kabupaten Langkat). Kegiatan *site visit* turut berkolaborasi dengan melibatkan fungsi *Regional Investment Relation Unit* (RIRU) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bengkulu, dan Aceh. Selain itu, NSI turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri diantaranya pendampingan kunjungan *Pensutra Alliance Berhad* ke kantor PT Dhirga Surya dan PT Angkasa Pura Aviast (Airport City) pada tanggal 2 Mei 2024, menerima kunjungan *Vice Chairman, Institute for International Strategy, The Japan Research Institute* pada tanggal 30 Mei 2024, serta pendampingan promosi proyek Toba Caldera Resort dengan PT Mitra Jaya Realty pada kegiatan *International Tourism Investment Forum* (ITIF) 5-6 Juni 2024.



KONSUMSI RUMAH TANGGA %(YOY)

5,54

■ Triwulan I 2024

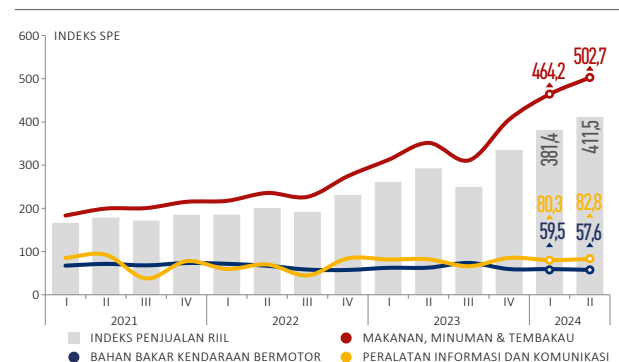


5,40

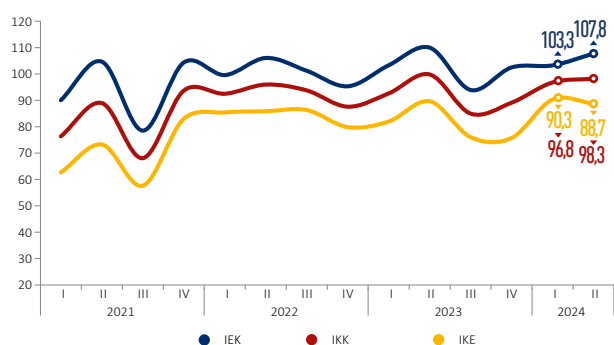
■ Triwulan II 2024

Meskipun tumbuh lebih moderat sebesar 5,40% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,53% (yoy), Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 51% dari total PDRB. Pertumbuhan yang lebih moderat ini diperkirakan disebabkan oleh berlangsungnya Pemilu di triwulan I 2024 yang mendorong konsumsi lebih tinggi di triwulan tersebut dibandingkan triwulan laporan. Namun demikian, beberapa indikator konsumsi masih menunjukkan tren yang positif sehingga mampu menopang pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan laporan. Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang konsisten meningkat dari triwulan III 2023 khususnya untuk makanan, minuman dan tembakau yang naik menjadi 502,7 pada periode laporan – (Grafik 1.16).

Sejalan dengan SPE, Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada periode laporan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatatkan angka 98,3 pada triwulan II 2024, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar



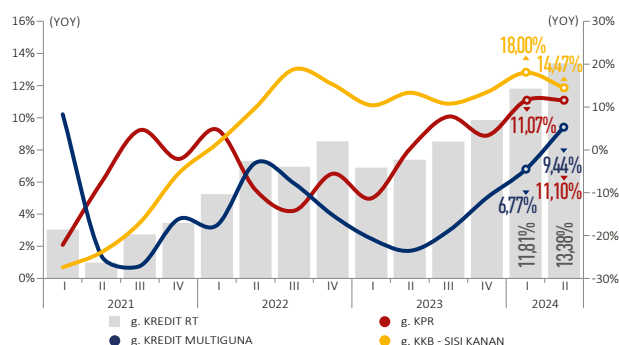
Grafik 1.16 Survei Penjualan Eceran



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.17 Survei Konsumen Bank Indonesia

96,8 – (Grafik 1.17). Kenaikan IKK didorong oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mencapai 107,8 pada periode laporan. Daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,67% pada tahun 2024, diiringi dengan upaya Pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, dan gaji ke-14, mendorong optimisme penghasilan masyarakat pada 6 bulan mendatang dan meningkatkan IEK.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.18 Kredit Konsumsi

Penyaluran kredit rumah tangga juga terpantau meningkat pada triwulan laporan. Kredit rumah tangga tumbuh 13,38% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 11,81% (yoy) - (Grafik 1.18). Berdasarkan segmennya, pertumbuhan kredit rumah tangga tetap kuat baik dari jenis kredit KPR (11,10%, yoy), KKB (14,47%, yoy), dan Multiguna (9,44%, yoy).

Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 terpantau mengalami perlambatan. Kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh sebesar 1,61%

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

	2021					2022					2023					2024	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94	5,02	5,01	4,88	4,95
LAPANGAN USAHA																	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68	2,98	3,02	3,42	3,72
Pertambangan dan Penggalian	-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37	3,23	3,46	3,91	5,29
Industri Pengolahan	1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92	3,13	3,44	3,73	4,44
Pengadaan Listrik, Gas	-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36	3,33	2,16	3,22	2,86
Pengadaan Air	3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47	2,89	2,89	3,10	2,90
Konstruksi	-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81	7,60	6,41	6,43	6,45
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06	6,91	5,81	5,42	5,27
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41	11,38	13,12	7,51	5,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19	10,87	10,22	11,63	9,75
Informasi dan Komunikasi	4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82	7,83	7,80	7,85	6,71
Jasa Keuangan	1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68	5,29	5,50	4,25	6,06
Real Estate	0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85	-0,25	3,20	3,03	3,32
Jasa Perusahaan	-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35	3,63	6,68	3,75	3,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36	0,10	1,93	4,80	4,77
Jasa Pendidikan	0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27	6,37	7,39	7,36	5,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33	8,70	6,43	3,69	5,49
Jasa lainnya	-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14	8,22	9,55	4,15	5,19

Sumber: BPS (diolah)



KONSUMSI PEMERINTAH %(YOY)

2,04

■ Triwulan I 2024



1,61

■ Triwulan II 2024

(yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,04% (yoy). Kinerja Konsumsi Pemerintah mengalami perlambatan tecermin dari realisasi belanja APBD triwulan II 2024 yang mengalami penurunan pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.7). Pada triwulan II 2024, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp4,94 triliun atau 33,29% dari pagu belanja tahun 2024, lebih rendah dari realisasi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,25 triliun atau terserap 36,77% dari pagu P-APBD 2023. Meski demikian, deselerasi Konsumsi Pemerintah lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal seiring dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan PON XXI di Sumatera Utara mencakup pembangunan stadion, jalan, dan fasilitas parkir di *Sport Center*.

1.3 LAPANGAN USAHA PERTANIAN, INDUSTRI PENGOLAHAN, DAN KONSTRUKSI TUMBUH LEBIH TINGGI



PERTANIAN %(yoy)

3,42

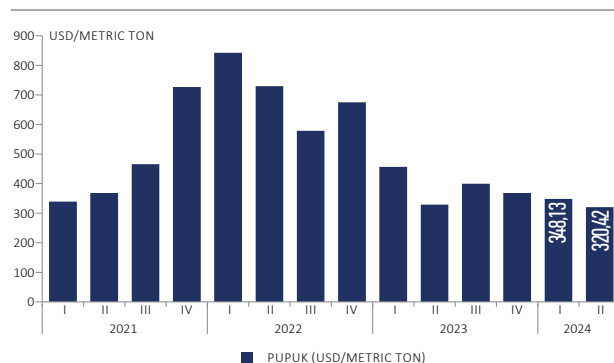
■ Triwulan I 2024



3,72

■ Triwulan II 2024

Kinerja LU Pertanian melanjutkan tren akselerasi dan meningkat pada triwulan II 2024. Kinerja



Sumber: Bloomberg, diolah

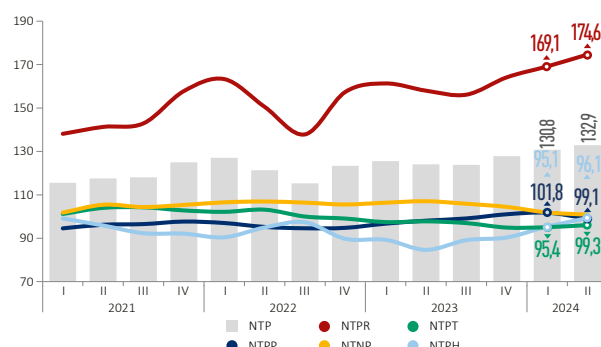
Grafik 1.19

Perkembangan Harga Pupuk

LU Pertanian pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,42% (yoy). Kondisi ini didukung oleh meningkatnya produksi kelapa sawit dan tren normalisasi harga pupuk – (Grafik 1.19) yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan NTPR dan NTPH – (Grafik 1.20). Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) secara total pada triwulan II 2024 sebesar 132,9, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 130,8. Faktor lainnya adalah cuaca yang lebih kondusif serta menguatnya permintaan pada periode HBKN Idul Fitri dan Idul Adha.

Kenaikan NTP ini juga tecermin dari peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS). Harga TBS tumbuh mencapai 18,6% (yoy) pada triwulan II 2024, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 0,1% (Grafik 1.21).

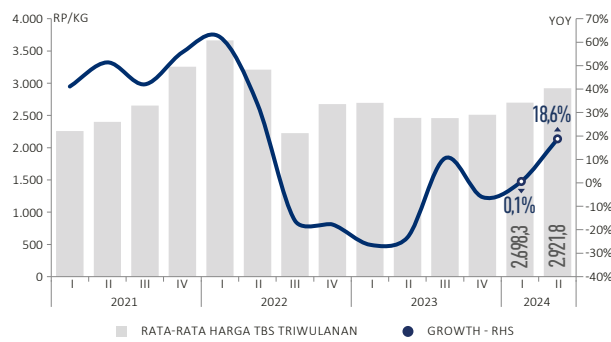
Meskipun demikian, akselerasi kinerja LU Pertanian tertahan pergeseran panen raya padi sawah ke



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.20

Nilai Tukar Petani



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.21 Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit

triwulan I 2024 diikuti dengan penurunan harga gabah kering giling dan gabah kering panen pada periode laporan – (Grafik 1.22). Hal ini turut berdampak pada penurunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) dari 101,8 pada triwulan I 2024 menjadi 99,1 pada triwulan II 2024.

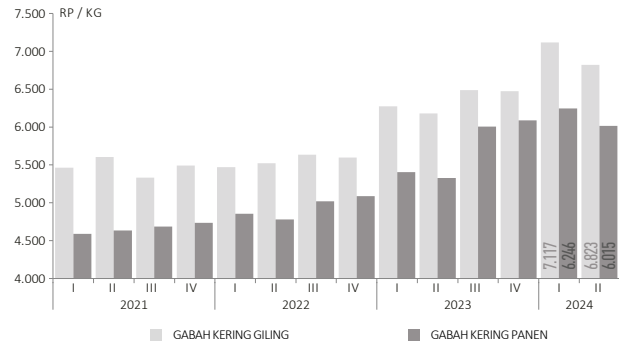
Dari segi pembiayaan, kinerja pembiayaan LU Pertanian tercatat mengalami perbaikan pada periode laporan. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan II 2024 mencapai -1,5% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -4,4% (yoy) – (Grafik 1.23). Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan perbankan pada LU Pertanian dari Rp44,5 triliun di triwulan I 2024 menjadi Rp46,6 triliun di triwulan laporan.

Kinerja LU Industri Pengolahan turut terakselerasi didorong perbaikan kinerja ekspor – (Grafik 1.2) seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional – (Grafik 1.4). LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,44% (yoy), lebih tinggi



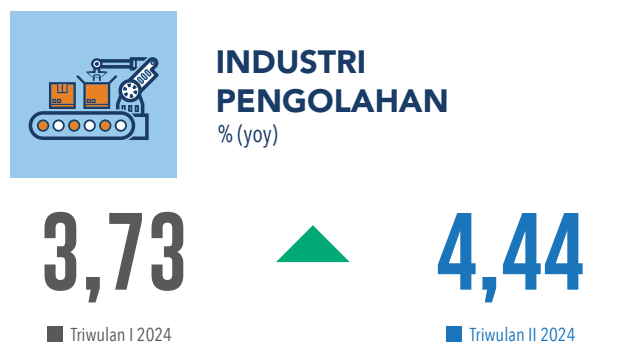
Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.23 Kredit Pertanian

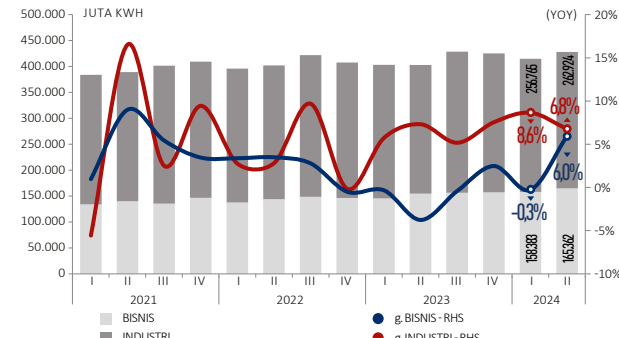


Sumber: BPS, BKP Kementan, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Harga Gabah

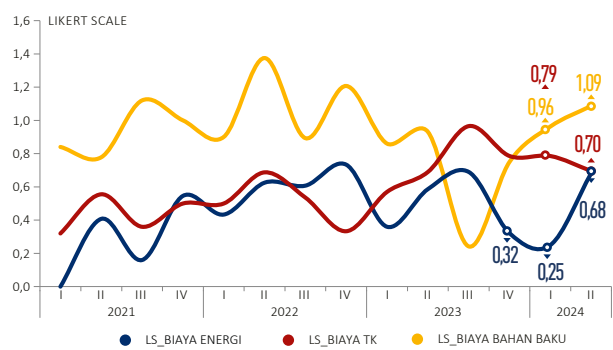


dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,73% (yoy). Aktivitas industri negara mitra dagang utama seperti India, Singapura, dan Korea Selatan yang berada di zona ekspansif – (Grafik 1.5) turut meningkatkan kinerja LU Industri Pengolahan. Kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih baik ini turut tercermin dari konsumsi listrik industri di Sumatera Utara yang mengalami kenaikan pada triwulan II 2024 – (Grafik 1.24) disertai adanya kenaikan biaya bahan baku dan biaya energi yang turut mendorong kenaikan biaya produksi – (Grafik 1.25).



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.24 Konsumsi Listrik Industri



Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.25 Likert Scale Biaya Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Energi

Selain itu, pembiayaan perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2024 terpantau tetap tinggi dari triwulan sebelumnya. Kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2024 tumbuh 13,1% (yoy), dari triwulan I 2024 yang sebesar 2,4% (yoy) – (Grafik 1.26). Kebutuhan pembiayaan korporasi terutama untuk keperluan aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, dan mendukung aktivitas investasi.



KONSTRUKSI % (yoy)

6,43  6,45

■ Triwulan I 2024

■ Triwulan II 2024

Kinerja LU Konstruksi terpantau membaik pada triwulan II 2024. Pertumbuhan LU Konstruksi tercatat 6,45% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,43% (yoy). Kondisi ini utamanya didorong oleh pembangunan 36 *venue* PON XXI di 10 Kabupaten/Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum. Peningkatan kinerja LU Konstruksi ini turut terlihat pada peningkatan pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan laporan sebesar 4,02% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,83% (yoy) (Grafik 1.13).



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.26 Kredit Industri Pengolahan

Dari segi pembiayaan, penyaluran kredit LU Konstruksi terkontraksi -22,7% (yoy) pada triwulan II 2024 dari tumbuh sebesar 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 1.27). Hal ini lebih disebabkan faktor *base effect* penyaluran kredit LU Konstruksi pada triwulan II 2023 yang tumbuh tinggi. Sementara itu, dari segi nominal, realisasi pembiayaan perbankan pada LU Konstruksi menunjukkan sedikit peningkatan dari Rp6,0 triliun di triwulan I 2024 menjadi Rp6,2 triliun di triwulan laporan.



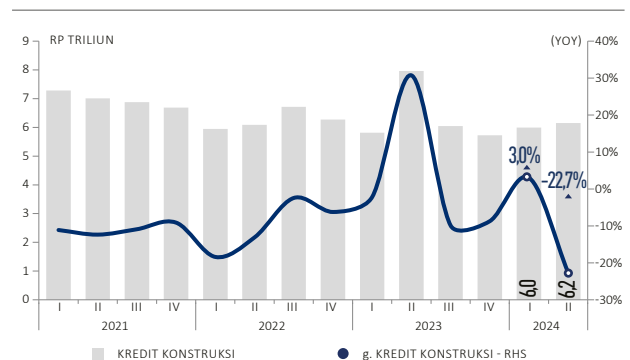
PERDAGANGAN % (yoy)

5,42  5,27

■ Triwulan I 2024

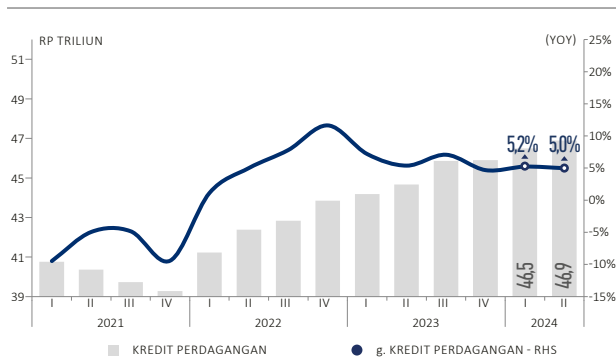
■ Triwulan II 2024

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2024 terpantau melambat dibanding triwulan



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.27 Kredit Konstruksi

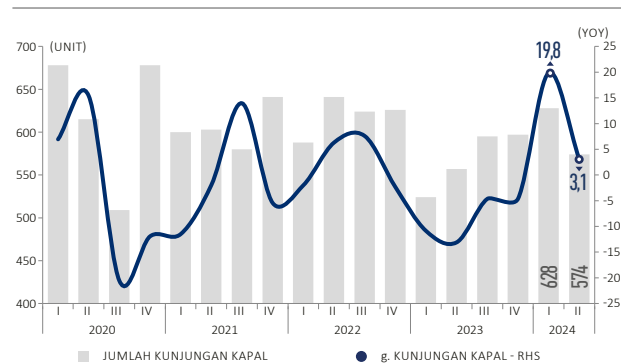


Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.28 Kredit Perdagangan

sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 5,27% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,42% (yoy). Meski Indeks Penjualan Riil – (Grafik 1.2) dan Indeks Keyakinan Konsumen – (Grafik 1.3) mengalami peningkatan pada periode laporan, namun kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih moderat turut berdampak pada deselerasi LU Perdagangan. Kendati demikian, tetap kuatnya pemulihan ekonomi domestik seiring dengan meningkatnya permintaan pada perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha mampu menahan perlambatan LU Perdagangan lebih dalam – (Grafik 1.12).

Selanjutnya, pertumbuhan penyaluran kredit LU Perdagangan tetap kuat. Penyaluran kredit LU Perdagangan pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,0% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh



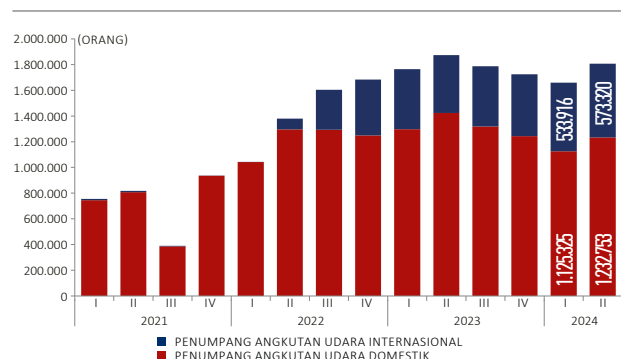
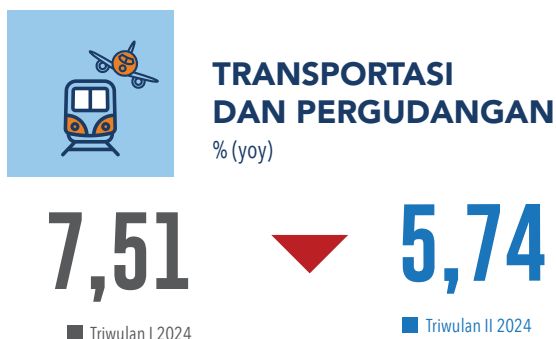
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.29 Jumlah Kunjungan Kapal

sebesar 5,2 % (yoy) – (Grafik 1.28). Hal ini turut menopang kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2024.

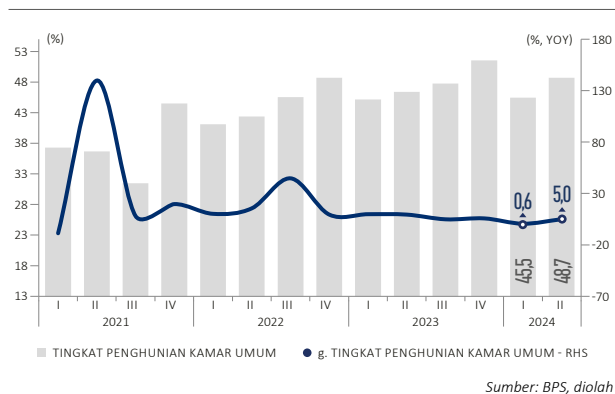
Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh melambat dari 7,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,74% (yoy). Termoderasinya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan kapal dari 19,8% (yoy) pada triwulan I 2024 menjadi 3,1% (yoy) pada triwulan II 2024 – (Grafik 1.29).

Meski demikian, deselerasi kinerja LU Transportasi dan Pergudangan lebih dalam tertahan oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan udara – (Grafik 1.30) dan peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dari 0,6% (yoy) pada triwulan I 2024 menjadi 5,0% (yoy) pada triwulan II 2024 – (Grafik 1.31).



Sumber: BPS, diolah

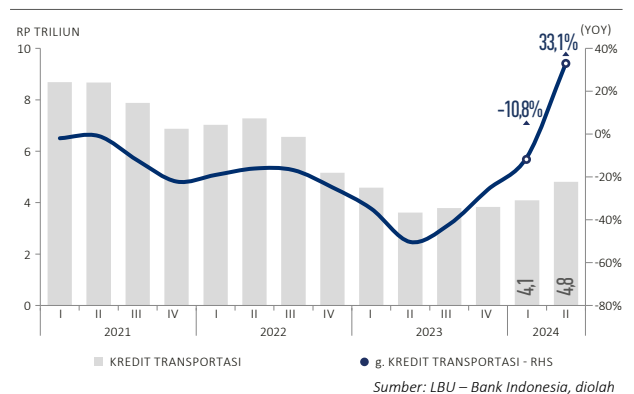
Grafik 1.30 Jumlah Penumpang Angkutan Udara



Grafik 1.31 Tingkat Penghunian Kamar

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada debitur usaha di LU Transportasi dan Pergudangan turut menunjukkan pemulihan.

Pertumbuhan kinerja kredit transportasi LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2024 sebesar 33,1% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar -10,8% (yoy) - (Grafik 1.32).



Grafik 1.32 Kredit Transportasi





► BOKS 1

Melangkah Bersama Melalui Program Kolaborasi NSI Day dan KKSU Tahun 2024



“Provinsi Sumatera Utara mendorong investasi, perdagangan, dan pariwisata melalui penyelenggaraan *North Sumatra Invest* (NSI) Day dan Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) tahun 2024. Kegiatan tersebut bertujuan mendorong realisasi investasi, perluasan UMKM go export, dan menarik wisatawan ke Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat”.

Upaya peningkatan kinerja sektor investasi, perdagangan, dan pariwisata terus diperkuat di Sumatera Utara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan



Gambar B1.1 Program Kolaborasi NSI Day Dan KKSU Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan NSI Day dan KKSU dengan tema “*Rap Pamajuhon Sumatera Utara*”, yang artinya bersama majukan Sumatera Utara. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan bagian dari penunjukan Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI) pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Istana Maimun Kota Medan.

Opening ceremony dihadiri oleh Deputy Gubernur BI, Deputy Bidang Koordinator Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Pengembangan Potensi Daerah (P2D) Kementerian Investasi/BKPM, Kepala Bidang Investasi Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pj. Gubernur Sumatera Utara, pelaku usaha, dan UMKM potensial.

Kegiatan NSI Day sendiri mengusung tema “*Driving Economic Growth: Unlocking Opportunities through Sustainable Investment, Trade, and Tourism*” dengan turut mempromosikan 18 (delapan belas) proyek investasi prospektif yang tersebar di 4 (empat) provinsi di Pulau Sumatera melalui peran *regional investor relation unit* (RIRU), yaitu Sumatera Utara, Aceh,



Gambar B1.2 Dokumentasi Perhelatan NSI DAY dan KKSU Tahun 2024

Bengkulu, dan Lampung. Melalui kegiatan NSI Day dan KKSU 2024 terdapat beberapa *outcome* yang dihasilkan diantaranya:

1. Terdapat 10 penandatanganan kerja sama investasi dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar.
2. Omset penjualan KKSU senilai Rp91,7 miliar. Total transaksi telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar.
3. Pencapaian *business matching* pembiayaan UMKM senilai Rp10,8 miliar.
4. Turut mempromosikan 301 UMKM baik *offline* maupun *online*.
5. Dihadiri oleh 282.571 pengunjung.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Junda Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Indonesia selaku *campaign manager* Gernas BBI-GBWI Sumatera Utara mencanangkan 3 (tiga) inisiatif program dalam rangka penguatan ekonomi diantaranya pertama, digitalisasi UMKM melalui program *onboarding* ke *marketplace* serta pelatihan *digital marketing* yang bekerjasama dengan *top brands e-commerce*, serta sosialisasi dan fasilitasi pembuatan QRIS untuk *merchant* UMKM. Kedua, promosi investasi dan perdagangan UMKM melalui *business matching* di dalam dan luar negeri khususnya untuk komoditas kopi, kuliner, dan wastra. Ketiga, program pengembangan pariwisata seperti pembinaan desa wisata dan revitalisasi destinasi pariwisata unggulan di Kota Medan seperti Istana Maimun dalam rangka mendukung konsep ekowisata.

Senada dengan hal tersebut, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni mengapresiasi pelaksanaan NSI Day dan KKSU tahun 2024 yang sekaligus sebagai lokasi pelaksanaan *harvesting* Gernas BBI-GBWI. Melalui penguatan sektor investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan jumlah UMKM naik kelas baik perluasan kapasitas/skala, kemudahan dalam proses pembiayaan, pemasaran yang menuju arah digital, dan penyerapan tenaga kerja melalui pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih terakselerasi.

Tim NSI secara aktif akan terus berupaya dalam mendorong sektor investasi, perdagangan, dan pariwisata. Melihat rapor investasi triwulan II 2024

Sumatera Utara sedikit melambat dari triwulan I 2024 sebesar -2,97% (qto) atau -4,16% (yoy) pada triwulan yang sama periode sebelumnya. Hal tersebut disinyalir oleh perilaku investor yang memilih *wait and see* terhadap kondisi terkini menjelang Pilkada serentak. Namun, realisasi investasi Sumatera Utara masih berpotensi untuk terakselerasi positif yang didukung oleh beberapa realisasi investasi infrastruktur lainnya seperti finalisasi *venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara di triwulan III 2024 dan pembangunan proyek *multiyears* jalan tol di Sumatera Utara.



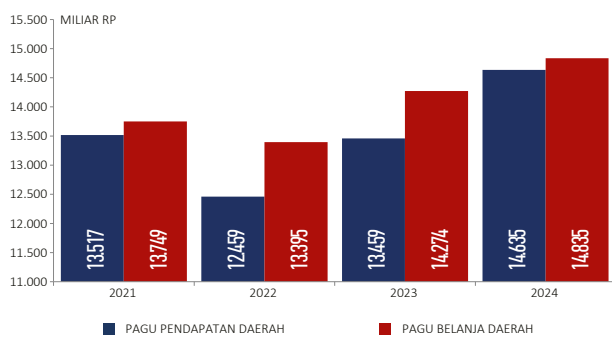


Bab II

Keuangan Pemerintah

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan, namun menurun dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan II 2024 sebesar 43,15% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan II 2023 sebesar 38,43% yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan II 2024 mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja yakni Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2024 terpantau meningkat hingga 3,69% (yoy) dari tahun 2023. Sementara itu, realisasinya pada triwulan II 2024 adalah sebesar 43,54% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 37,52% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Modal.





Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.1 Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara

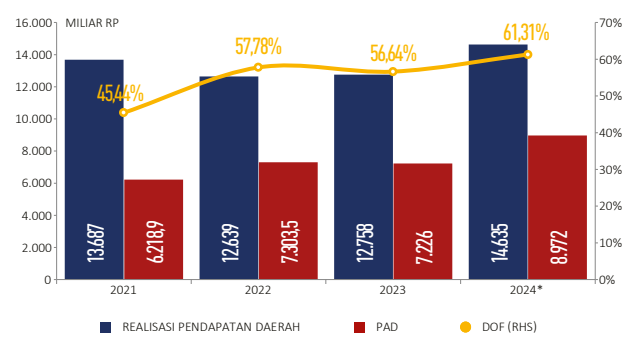
2.1 GAMBARAN UMUM APBD 2024

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Struktur pendapatan mengalami peningkatan sebesar 8,74% (yoy) dari Rp13,46 triliun pada P-APBD 2023 menjadi Rp14,64 triliun. Struktur belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 3,93% (yoy) dari Rp14,27 triliun menjadi Rp14,83 triliun – (Grafik 2.1).

Peningkatan struktur pendapatan hingga 8,74% (yoy) dalam APBD 2024 tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. PAD mengalami peningkatan pagu sebesar 14,19% (yoy), sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 2,44% (yoy) dari P-APBD 2023. Pemerintah Daerah meyakini pendapatan Pajak Daerah di tahun 2024 akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, pagu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar -73,92% (yoy).

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD 2024 Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan. Peningkatan pagu belanja didorong oleh peningkatan pagu Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu Belanja



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

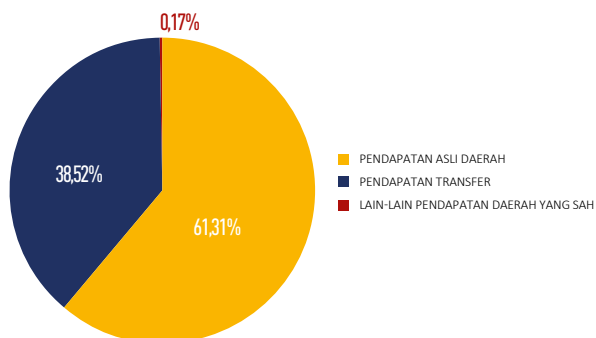
Grafik 2.2 Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara

Operasi dan Belanja Transfer masing-masing meningkat sebesar 17,63% (yoy) dan 4,30% (yoy) dari P-APBD 2023. Sementara itu, pagu Belanja Tak Terduga meningkat sebesar 42,41% (yoy) dari P-APBD 2023. Di sisi lain, komponen Belanja Modal mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun sebelumnya.

2.1.1 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2024 Mengalami Peningkatan

Peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan optimisme perekonomian yang tetap kuat di Provinsi Sumatera Utara. Proyeksi kenaikan penerimaan PAD dalam APBD 2024 didorong oleh optimisme Pemerintah Daerah terhadap kenaikan penerimaan pajak seiring telah dibukanya sektor-sektor utama dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan mengurangi insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha secara bertahap. Hal ini juga tecermin dari kenaikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)¹ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 56,64% pada realisasi APBD 2023 menjadi 61,31% pada pagu APBD 2024 – (Grafik 2.2). Selanjutnya, pendapatan transfer juga mencatat peningkatan sebesar 2,44% pada pagu pendapatan APBD 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat penurunan pada APBD 2024 sebesar -73,92% (yoy). Adapun pada tahun 2024, pagu pendapatan didominasi oleh komponen PAD sebesar 61,31%, sehingga upaya

¹ DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiskal untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

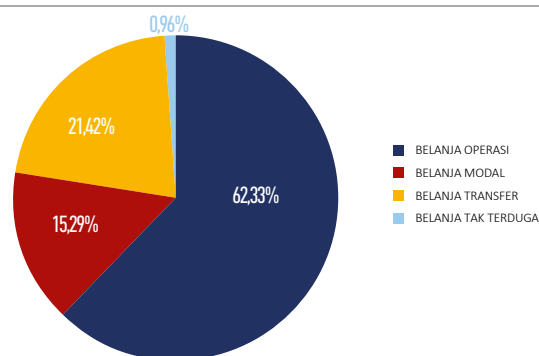
Grafik 2.3

Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

mengoptimalkan potensi PAD menjadi salah satu kunci dari kinerja penerimaan daerah - (Grafik 2.3).

2.1.2 Sejalan dengan Pagu Pendapatan, Pagu Anggaran Belanja APBD 2024 Turut Mengalami Peningkatan

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja APBD 2024 di Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan hingga 3,93% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2023. Pagu anggaran belanja APBD 2024 naik menjadi Rp14,83 triliun dari Rp14,27 triliun. Adapun peningkatan pagu belanja berasal dari komponen Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu komponen Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 17,63% (yoy) pada APBD 2024. Peningkatan pagu Belanja Operasi pada APBD 2024 secara umum disebabkan oleh peningkatan pagu pada Belanja Pegawai 1,39% (yoy), Belanja Barang dan Jasa 38,39% (yoy), serta Belanja Operasi Lainnya 22,37% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8% pada tahun 2024 dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang membutuhkan dana yang besar karena mencakup biaya persiapan mulai dari pendaftaran calon hingga logistik untuk proses pemilihan dan penghitungan suara. Lebih lanjut, komponen Belanja Operasi memiliki pangsa terbesar dari pagu anggaran belanja APBD 2024, yakni Rp9,25 triliun atau setara dengan 62,33% dari total pagu anggaran belanja. Dengan demikian,



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.4

Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

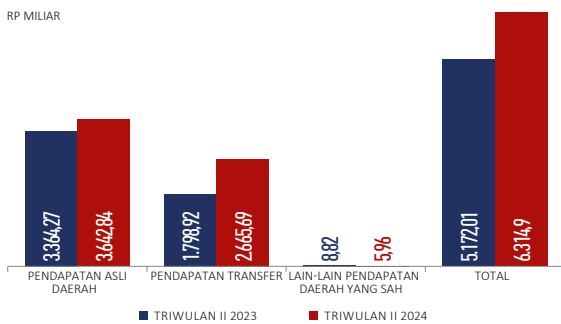
peningkatan pagu Belanja Operasi turut berdampak pada peningkatan pagu belanja APBD 2024 secara umum. Adapun peningkatan pagu Belanja Tak Terduga diperkirakan seiring dengan asumsi potensi risiko bencana di tahun 2024 dan anggaran untuk pengendalian inflasi di Sumatera Utara - (Grafik 2.4).

Di sisi lain, Belanja Modal mencatat penurunan pagu hingga -30,55% (yoy) pada APBD 2024. Hal ini diperkirakan seiring dengan masih minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII Aceh-Sumut 2024.

2.2 REALISASI APBD TRIWULAN II 2024

2.2.1 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan II 2024 Meningkat

Realisasi pendapatan pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp6,31 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan di triwulan II 2023 sebesar Rp5,17 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen PAD dan Pendapatan Transfer dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya - (Grafik 2.5). Sementara itu, realisasi komponen Lain-Lain



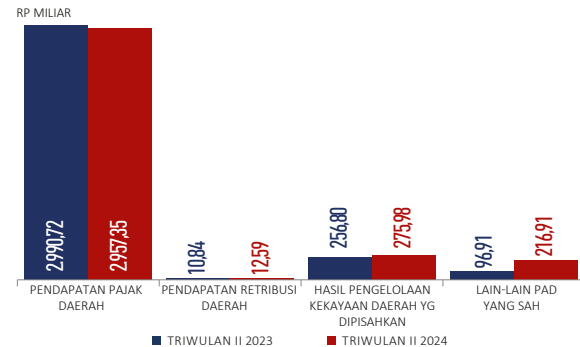
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.5 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan II 2024

Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara nominal, realisasi PAD pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp3,64 triliun, lebih tinggi dari triwulan II 2023 sebesar Rp3,36 triliun – (Grafik 2.5). Berdasarkan sub komponennya, realisasi penerimaan Pajak Daerah tetap tinggi sebesar Rp2,96 triliun pada triwulan II 2024 yang didorong oleh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan, serta dari aktivitas konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Selanjutnya, Retribusi Daerah tumbuh mencapai Rp12,59 miliar pada triwulan II 2024 seiring dengan kenaikan penerimaan retribusi jasa umum. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh menjadi Rp275,98 miliar pada triwulan II 2024 seiring dengan peningkatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. Di sisi lain, realisasi Selain itu, realisasi Lain-lain PAD yang Sah juga menunjukkan peningkatan dari Rp96,91 miliar pada triwulan II 2023 menjadi Rp216,91 miliar pada triwulan II 2024 – (Grafik 2.6).

Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer yang merupakan kontributor tertinggi penerimaan daerah triwulan II 2024 setelah PAD turut



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

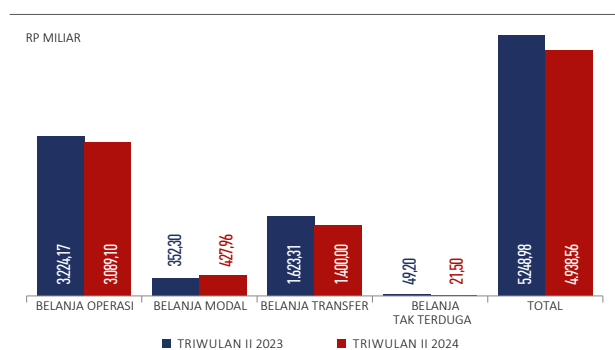
Grafik 2.6 Realisasi PAD Triwulan II 2024

mengalami peningkatan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan transfer pada triwulan II 2024 terealisasi sebesar Rp2,67 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1,80 triliun – (Grafik 2.5). Meningkatnya realisasi ini sejalan dengan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, investasi, dan mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Di sisi lain, realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup komponen Pendapatan Hibah dan komponen Pendapatan Lainnya tercatat menurun. Berdasarkan nominalnya, realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp5,96 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,82 miliar – (Grafik 2.5).

2.2.2 Di Sisi Lain, Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Triwulan II 2024 Tercatat Menurun

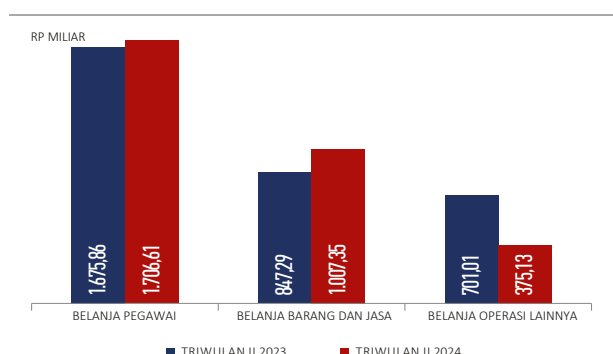
Realisasi belanja APBD triwulan II 2024 mengalami penurunan, didorong oleh penurunan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.7). Pada triwulan II 2024, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp4,94 triliun atau 33,29% dari pagu belanja tahun 2024, lebih rendah dari realisasi yang sama tahun



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.7

Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2024



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.8

Realisasi Belanja Operasi Triwulan II 2024

sebelumnya sebesar Rp5,25 triliun atau terserap 36,77% dari pagu P-APBD 2023.

Realisasi Belanja Operasi pada triwulan II 2024 menunjukkan penurunan dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan II 2024, realisasi Belanja Operasi mencapai Rp3,09 triliun atau setara dengan 33,41% dari pagu APBD 2024, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dirinci per sub komponen, penurunan persentase realisasi Belanja Operasi didorong oleh penurunan pada sub komponen Belanja Operasi Lainnya – (Grafik 2.8). Di sisi lain, penurunan realisasi Belanja Operasi lebih dalam mampu tertahan oleh peningkatan realisasi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa meningkat

dari Rp847,29 miliar menjadi Rp1,01 triliun pada triwulan II 2024 sejalan dengan belanja dalam rangka persiapan Pilkada serentak dan percepatan belanja jasa.

Selanjutnya, realisasi pos Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada triwulan II 2024 juga mengalami penurunan.

Realisasi Belanja Tak Terduga pada triwulan II 2024 mencapai Rp21,50 miliar atau terealisasi sebesar 15,11%, lebih rendah dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,20 miliar atau terealisasi sebesar 49,25% – (Grafik 2.7). Sementara itu, realisasi Belanja Transfer pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp1,40 triliun atau 44,06% dari pagu, lebih rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,62 triliun atau 53,28% dari pagu.

Tabel 2.1

Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.857,57	3.364,27	42,82%	8.972,33	3.642,84	40,60%
Pendapatan Pajak Daerah	7.138,15	2.990,72	41,90%	8.057,91	2.957,35	36,70%
Pendapatan Retribusi Daerah	40,48	10,84	26,78%	36,96	12,59	34,06%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	354,76	265,80	74,92%	331,89	275,98	83,15%
Lain-lain PAD yang Sah	324,19	96,91	29,89%	545,57	216,91	39,76%
PENDAPATAN TRANSFER	5.502,89	1.798,92	32,69%	5.637,01	2.665,69	47,29%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.502,89	1.798,92	32,69%	5.637,01	2.665,69	47,29%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98,06	8,82	8,99%	25,57	5,96	23,31%
Pendapatan Hibah	73,06	0,04	0,05%	7,57	0,03	0,40%
Pendapatan Lainnya	25,00	8,78	35,13%	18,00	5,93	32,94%
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	13.458,52	5.172,01	38,43%	14.634,91	6.314,49	43,15%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi
BELANJA OPERASI	7.860,91	3.224,17	41,02%	9.246,63	3.089,10	33,41%
Belanja Pegawai	3.571,41	1.675,86	46,92%	3.621,08	1.706,61	47,13%
Belanja Barang dan Jasa	2.350,51	847,29	36,05%	3.252,85	1.007,35	30,97%
Belanja Operasi Lainnya	1.938,99	701,01	36,15%	2.372,69	375,13	15,81%
BELANJA MODAL	3.266,14	352,30	10,79%	2.268,45	427,96	18,87%
BELANJA TRANSFER	3.046,55	1.623,31	53,28%	3.177,55	1.400,00	44,06%
BELANJA TAK TERDUGA	99,91	49,20	49,25%	142,28	21,50	15,11%
TOTAL	14.273,52	5.248,98	36,77%	14.834,91	4.938,56	33,29%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Di sisi lain, realisasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan. Realisasi Belanja Modal pada triwulan II 2024 mencapai Rp427,96 miliar atau sebesar 18,87% dari pagu Belanja Modal, lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun 2023 sebesar Rp352,30 miliar atau sebesar 10,79% dari pagu Belanja Modal P-APBD 2023. Kondisi ini diperkirakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan PON XXI di Sumatera Utara mencakup pembangunan stadion, jalan, dan fasilitas parkir di *Sport Center*.

2.3 PAGU BELANJA APBN² UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 LEBIH TINGGI

Secara garis besar, pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, pagu belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Utara sedikit

meningkat sebesar 3,69% (yoy) dengan nominal sebesar Rp25,19 triliun, lebih tinggi dari pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp24,29 triliun. Untuk menghindari prinsip penghitungan ganda, realisasi APBN tidak memperhitungkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai bagian dari penerimaan APBD.

Komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada umumnya mendorong peningkatan pagu belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara.

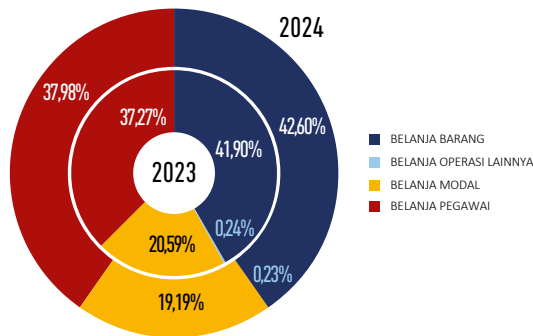
Berdasarkan persentase pangsa dari pagu, komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang memiliki pangsa yang cukup besar dalam pagu belanja APBN di Sumatera Utara yakni masing-masing sebesar 37,98% dan 42,60%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pagu kedua komponen belanja ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam mendorong peningkatan pagu belanja APBN di Sumatera Utara – (Grafik 2.9).

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi
Belanja Operasi	19.288,25	7.839,24	40,64%	20.353,58	9.739,87	47,85%
Belanja Pegawai	9.053,57	4.622,25	51,05%	9.566,19	5.303,89	55,44%
Belanja Barang	10.177,60	3.205,06	31,49%	10.729,35	4.405,11	41,06%
Belanja Operasi Lainnya	57,08	11,93	20,90%	58,03	30,87	53,20%
Belanja Modal	5.001,48	1.274,10	25,47%	4.833,54	1.226,41	25,37%
Total	24.289,73	9.113,34	37,52%	25.187,12	10.966,28	43,54%

Sumber: DJPb Provinsi Sumatera Utara

2 tidak termasuk TKDD



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.9 Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara

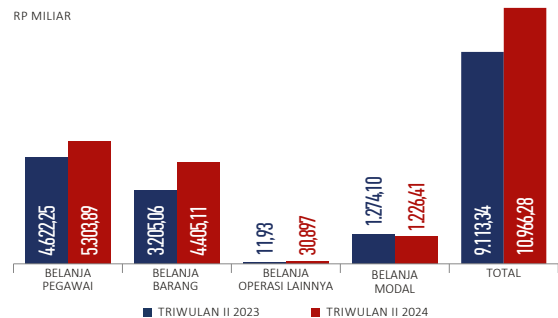
Sementara itu, pagu Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pagu Belanja Modal menurun sebesar -3,36% (yoy) menjadi Rp4,83 triliun.

2.4 REALISASI BELANJA APBN PADA TRIWULAN II 2024 MENGALAMI PENINGKATAN

Realisasi belanja APBN di Sumatera Utara pada triwulan II 2024 terpantau meningkat dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBN pada triwulan berjalan tahun 2024 adalah sebesar Rp 10,97 triliun, lebih tinggi daripada triwulan II 2023 sebesar Rp9,11 triliun. Adapun peningkatan realisasi belanja APBN terutama terjadi pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.10).

Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan pada triwulan II 2024. Realisasi Belanja Pegawai mencatat peningkatan dari Rp4,62 triliun pada triwulan II 2023 menjadi Rp5,30 triliun pada triwulan berjalan.

Realisasi Belanja Barang pada triwulan II 2024 juga terpantau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Barang tercatat Rp4,41 triliun, lebih



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.10 Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja

tinggi dari triwulan II 2023 yang terealisasi sebesar Rp3,21 triliun utamanya untuk kebutuhan pendanaan pelaksanaan Pilkada serentak dan belanja gedung dan bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lebih lanjut, realisasi Belanja Operasi Lainnya turut mengalami peningkatan pada triwulan II 2024. Realisasi Belanja Operasi Lainnya pada triwulan II 2024 sebesar Rp30,87 miliar, lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp11,93 miliar. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya realisasi Belanja Bantuan Sosial pada triwulan berjalan.

Di sisi lain, realisasi Belanja Modal tercatat mengalami sedikit penurunan pada triwulan II 2024. Realisasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 25,37% dari pagu, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,27 triliun atau 25,47% dari pagu. Belanja Modal ini terutama digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan bendungan Lau Simeme. Adapun penurunan realisasi Belanja Modal tersebut diperkirakan seiring dengan pembatalan sejumlah PSN di Provinsi Sumatera Utara seperti Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran dan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat.





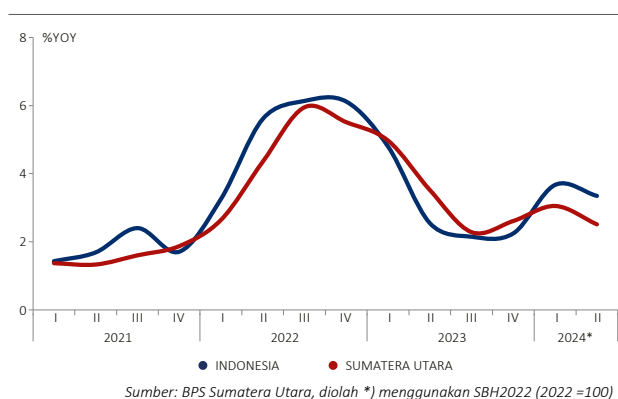
Bab III

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dalam sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Provinsi Sumatera Utara masih tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Transportasi. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bawang merah, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin (SKM). Peningkatan harga cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh menurunnya pasokan akibat faktor cuaca yang menyebabkan adanya banjir di sentra produksi. Selanjutnya, peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Emas perhiasan juga menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi *safe haven*. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).





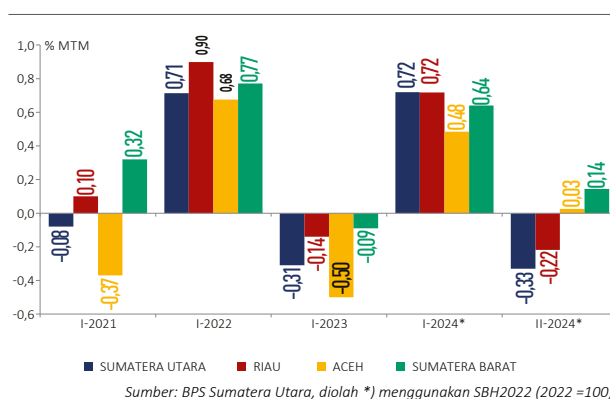
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

3.1 KINERJA INFLASI TRIWULAN II 2024

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,51% (yoy) pada triwulan laporan – (Grafik 3.1). Menurunnya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan pasokan komoditas pangan akibat masuknya masa panen di berbagai daerah dan masuknya pasokan komoditas dari luar daerah.

Sementara itu, secara spasial, inflasi IHK Provinsi Sumatera Utara mencatatkan inflasi tahunan tertinggi kelima di wilayah Sumatera pada triwulan II 2024, di atas inflasi daerah di Wilayah Sumatera lainnya seperti Jambi sebesar 3,33% (yoy), Aceh sebesar 3,08% (yoy). Di sisi lain, secara bulanan, inflasi Provinsi Sumatera Utara justru tercatat sebagai inflasi terendah di wilayah Sumatera pada triwulan II 2024 - (Grafik 3.2).

Secara umum, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan bersumber dari kenaikan harga yang terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,48% (yoy), diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan



Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya

Kelompok Transportasi yang memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,25% (yoy) dan 0,12% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai merah, beras, bawang merah, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin (SKM) yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,79% (yoy), 0,63% (yoy), 0,43% (yoy), 0,22% (yoy), dan 0,18% (yoy). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh cukup tingginya perdagangan antar wilayah dari daerah sentra di Sumatera, faktor cuaca di daerah penghasil (Sumatera Utara dan Sumatera Barat), serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino di daerah sentra juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Emas perhiasan juga menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan di Sumatera Utara sebagai akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi safe haven. Peningkatan harga pada emas perhiasan diperkirakan karena ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi



Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan II 2024

Inflasi Triwulan II 2024					
April		Mei		Juni	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
BERAS	0,58	CABAI MERAH	1,00	CABAI MERAH	0,79
CABAI MERAH	0,47	BAWANG MERAH	0,61	BERAS	0,63
BAWANG MERAH	0,38	BERAS	0,56	BAWANG MERAH	0,43
DAGING AYAM RAS	0,27	EMAS PERHIASAN	0,19	EMAS PERHIASAN	0,22
EMAS PERHIASAN, TELUR AYAM, SKM	0,17	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,17	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,18

Deflasi Triwulan II 2024					
April		Mei		Juni	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
IKAN TONGKOL	-0,05	IKAN DENCIS	-0,20	DAGING AYAM RAS	-0,28
PIR	-0,03	IKAN TONGKOL	-0,14	IKAN DENCIS	-0,12
UDANG BASAH	-0,03	UDANG BASAH	-0,07	UDANG BASAH	-0,08
DAGING BABI	-0,02	PIR	-0,04	TOMAT	-0,05
IKAN ASIN TERI	-0,02	IKAN ASIN TERI	-0,03	SAWI HIJAU	-0,04

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

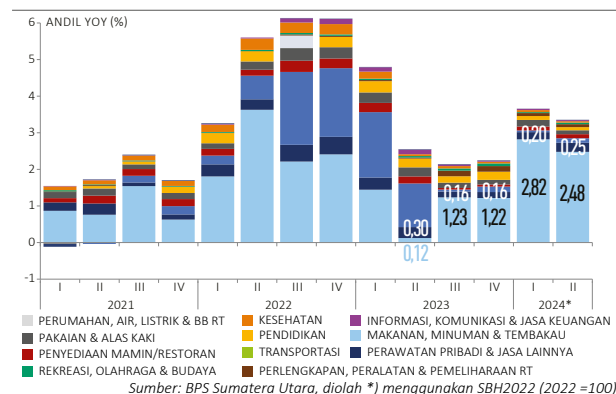
alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga emas di dalam negeri. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan harga sejumlah komoditas. Sejumlah komoditas menunjukkan deflasi yang cukup dalam, sehingga menahan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi antara lain daging ayam ras, ikan dencis, udang basah, tomat, dan sawi hijau dengan andil deflasi masing-masing komoditas sebesar 0,28% (yoy), 0,12% (yoy), 0,08% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,04% (yoy). Penurunan harga komoditas khususnya pada perikanan dan sayuran disebabkan oleh tingginya pasokan akibat masa panen.

3.2 ANDIL INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Memberikan Andil Inflasi Terbesar

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar sebesar 2,48% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,82% (yoy) - (Grafik 3.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas beras, cabai merah, beras, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM) yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,79% (yoy), 0,63% (yoy), 0,43% (yoy), dan 0,18% (yoy).



Grafik 3.3 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok

Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh cukup tingginya perdagangan antar wilayah dari daerah sentra di Sumatera, faktor cuaca di daerah penghasil (Sumatera Utara dan Sumatera Barat), serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino di daerah sentra juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Memberikan Andil Inflasi Tertinggi Kedua

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi tertinggi kedua sebesar 0,25% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (yoy) – (Grafik 3.3). Kenaikan andil inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 0,22% (yoy), serta lipstik, deodorant, bedak, tarif gunting rambut pria, jam tangan, dan shampo masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Peningkatan harga pada emas perhiasan diperkirakan karena ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga

emas di dalam negeri. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas berkaitan dengan kebersihan didorong dari tingginya permintaan masyarakat menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, serta HBKN Idul Adha.

Kelompok Transportasi Memberikan Andil Inflasi yang Cukup Signifikan

Kelompok Transportasi mencatatkan andil inflasi sebesar 0,12% (yoy), merupakan tertinggi ketiga pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberi andil inflasi sebesar 0,05% (yoy) (Grafik 3.3).

Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan harga pada tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,06% (yoy), serta komoditas bensin, mobil, sepeda motor, dan cuci kendaraan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan harga komoditas ini diperkirakan terjadi seiring tingginya permintaan masyarakat menjelang dan selama HBKN Idul Fitri dan HBKN Idul Adha yang turut dibarengi dengan libur anak sekolah.

3.3 INFLASI SPASIAL

Mayoritas Kota dan Kabupaten IHK di Sumatera Utara mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2024 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Padangsidimpuan dengan angka inflasi sebesar 4,13% (yoy), kemudian diikuti Kab. Karo sebesar 3,81% (yoy), Kota Sibolga sebesar 3,75% (yoy), Kota Gunungsitoli sebesar 3,48% (yoy), Kab. Deliserdang sebesar 3,37% (yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 3,35% (yoy), Kota Medan sebesar 3,31% (yoy), dan Kab. Labuhanbatu dengan inflasi terendah sebesar 3,18% (yoy) - (Tabel 3.2). Secara umum, tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan sebesar 3,35% (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,51% (yoy).

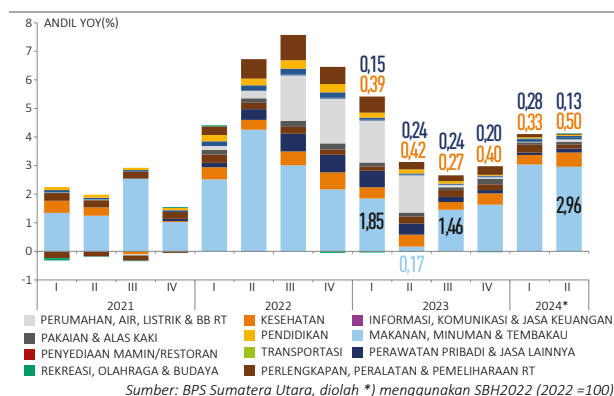


Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional										
Kota	2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflasi IHK, % mtm										
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	0,71	1,40	1,00	1,50	-0,31	0,31	0,37	0,57	0,72	-0,33
Medan	0,68	1,39	0,98	1,54	-0,30	0,29	0,38	0,61	0,73	-0,45
Sibolga	0,93	1,12	0,33	1,44	-0,66	0,62	0,44	0,08	0,72	0,12
Pematangsiantar	0,77	1,36	1,50	1,61	-0,30	0,52	0,16	0,56	0,61	-0,55
Padangsidimpuan	1,11	1,29	0,99	0,64	-0,18	0,21	0,49	0,21	0,97	0,11
Gunung Sitoli	0,39	2,72	0,61	1,79	-0,91	0,21	0,38	0,21	0,37	0,10
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								0,12	-0,51
Deli Serdang									0,61	0,08
Labuhanbatu									1,62	-0,91
Nasional	0,66	0,61	1,17	0,66	0,18	0,14	0,19	0,41	0,52	-0,08
Inflasi IHK, % ytd										
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	1,54	4,18	5,23	6,12	0,28	0,68	1,29	2,25	1,53	1,65
Medan	1,44	4,08	5,12	6,10	0,17	0,52	1,12	2,19	1,62	1,73
Sibolga	2,27	4,68	6,13	6,43	1,12	2,17	3,12	2,80	2,46	2,84
Pematangsiantar	1,93	4,36	5,13	6,16	0,63	1,35	1,50	2,29	1,84	1,68
Padangsidimpuan	2,40	5,34	6,67	6,40	1,41	2,08	2,91	2,95	2,23	2,59
Gunung Sitoli	1,76	4,80	5,83	5,74	-0,04	0,12	1,94	2,36	1,58	1,58
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								0,82	1,04
Deli Serdang									0,93	1,27
Labuhanbatu									3,42	2,44
Nasional	1,20	3,19	4,84	5,51	0,68	1,24	1,63	2,61	0,93	1,07
Inflasi IHK, % yoy										
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	3,26	5,61	6,14	6,12	4,80	2,55	2,15	2,25	3,67	3,35
Medan	3,14	5,49	6,01	6,10	4,77	2,47	2,06	2,19	3,62	3,31
Sibolga	4,42	6,50	6,92	6,43	5,22	3,88	3,40	2,80	4,28	3,75
Pematangsiantar	3,62	5,71	6,26	6,16	4,81	3,10	2,50	2,29	3,84	3,35
Padangsidimpuan	4,42	6,71	7,57	6,40	5,37	3,11	2,65	2,95	4,10	4,13
Gunung Sitoli	3,36	6,44	7,16	5,74	3,86	1,01	1,85	2,36	3,90	3,48
Karo	Kabupaten baru SBH 2022 (baru mulai dicacah pada tahun 2024)								4,88	3,81
Deli Serdang									2,89	3,37
Labuhanbatu									5,87	3,18
Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Kota Padangsidimpuan Mencatatkan Inflasi Tertinggi

Kota Padangsidimpuan mencatatkan inflasi tertinggi di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2024, Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi sebesar 4,13% (yoy). Sumber utama inflasi di Kota Padangsidimpuan didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,96% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi



Grafik 3.4 Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok

pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,09% (yoy), 0,68% (yoy), dan 0,42% (yoy). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,50% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan, sabun mandi, dan shampo dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,35% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

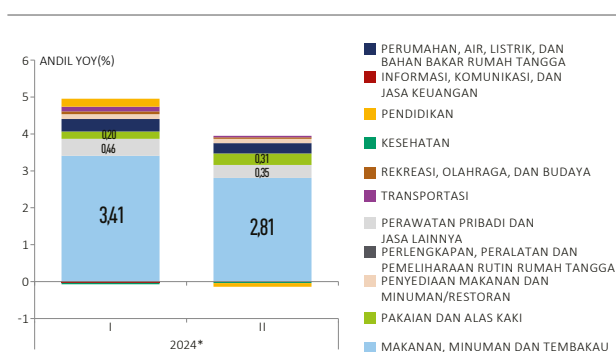
Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran memberikan andil inflasi terbesar

ketiga dengan angka 0,14% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas kopi siap saji, bakso siap santap, dan teh siap saji dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan konsumsi sepanjang bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta adanya HBKN Idul Adha di Tw II 2024.

Di sisi lain, inflasi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan II 2024, komoditas ikan dencis, daging ayam ras, dan pir mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,13% (yoy), 0,13% (yoy), dan 0,06% (yoy).

Kabupaten Karo Mencatatkan Inflasi Tertinggi Kedua

Kabupaten Karo mencatatkan inflasi tertinggi Kedua di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2024, Kab. Karo mengalami inflasi sebesar 3,81% (yoy). Sumber utama inflasi di Kab. Karo didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,81% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,55% (yoy), 0,64% (yoy), dan 0,56% (yoy). Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.5 Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok

tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,35% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,26% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,31% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas nasi dengan lauk, gulai, dan sayur olahan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14% (yoy), 0,07% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan tingginya permintaan menjelang HBKN Idul Fitri dan HBKN Idul Adha.

Di sisi lain, inflasi Kab. Karo lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan II 2024, komoditas ikan dencis, tomat, dan tembakau mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,59% (yoy), 0,49% (yoy), dan 0,40% (yoy).

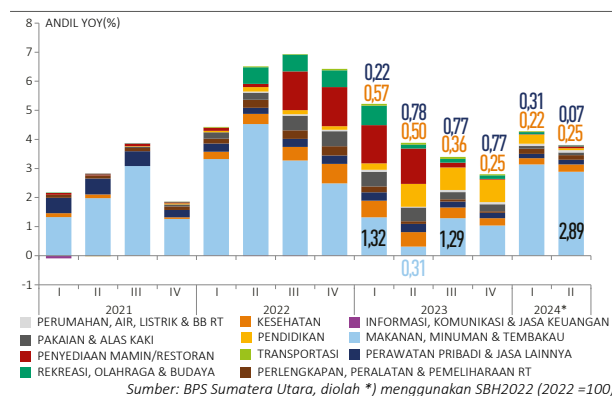


Kota Sibolga Mencatatkan Inflasi Tertinggi Ketiga

Kota Sibolga mencatatkan inflasi tertinggi ketiga di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2024, Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 3,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 4,28% (yoy). Sumber utama inflasi di Kota Sibolga didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,83% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan bawang merah, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,84% (yoy), 0,76% (yoy), dan 0,56% (yoy). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,25% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,28% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,16% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni kerudung/jilbab, sandal karet wanita, dan baju anak



Grafik 3.6 Inflasi Kota Sibolga per Kelompok

stelan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02% (yoy), 0,02% (yoy), dan 0,01% (yoy). Kenaikan harga pakaian ini disebabkan dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri dan Idul Adha di triwulan laporan.

Di sisi lain, inflasi Kota Sibolga lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan I 2024, komoditas ikan cakalang, ikan serai, dan popok bayi mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,29% (yoy), 0,12% (yoy), dan 0,10% (yoy).

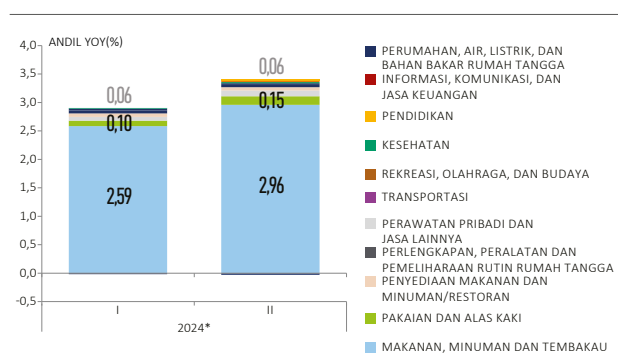
Kota Gunungsitoli Mencatatkan Penurunan Inflasi

Kota Gunungsitoli mencatatkan penurunan inflasi pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2024, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 3,90% (yoy). Sumber utama inflasi di Kota Gunungsitoli didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,35% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,83% (yoy), 0,76% (yoy), dan 0,34% (yoy). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh





Grafik 3.7 Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.8 Inflasi Kabupaten Deli Serdang per Kelompok

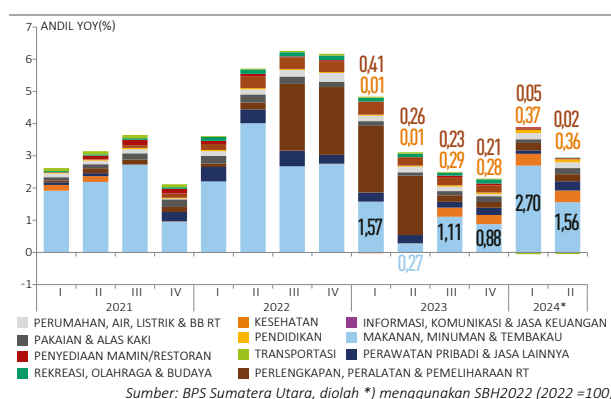
Deli Serdang pada triwulan II 2024. Kelompok ini mencatatkan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Adapun peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,04% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Di sisi lain, laju inflasi Kabupaten Deli Serdang lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan II 2024, komoditas daging ayam ras, udang basah, dan tomat mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,61 % (yoy), 0,36%, dan 0,22 % (yoy).

Kota Pematangsiantar Mengalami Inflasi pada Triwulan Laporan

Inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 3,35% (yoy). Nilai realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,84 % (yoy). Inflasi Kota Pematangsiantar didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 1,56% (yoy) pada triwulan II 2024. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.9 Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok

utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas beras, cabai merah, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69% (yoy), 0,45% (yoy), dan 0,23% (yoy). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi. Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Kelompok Pendidikan juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan II 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,36% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan biaya uang kuliah akademi/PT dengan andil inflasi sebesar 0,21% (yoy). Adapun peningkatan uang kuliah akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar terbesar berikutnya dengan andil inflasi mencapai 0,29% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi

sebesar 0,26% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

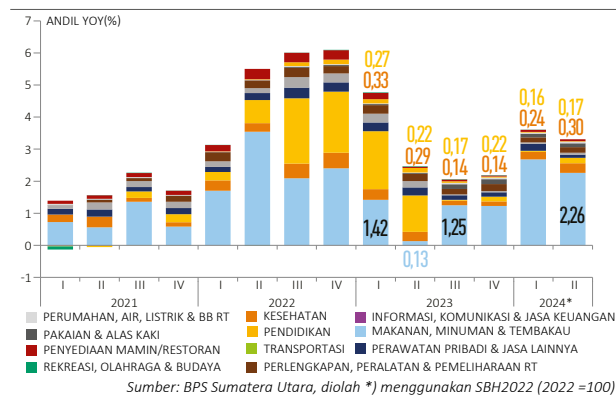
Di sisi lain, inflasi Kota Pematangsiantar lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan II 2024, komoditas daging ayam ras, ikan asin teri, dan ikan tongkol mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,40% (yoy), 0,10% (yoy), dan 0,09% (yoy).

Kota Medan Mencatatkan Peningkatan Tekanan Inflasi

Pada triwulan II 2024, Kota Medan mencatat inflasi 3,31% (yoy), menurun dari triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 3,62% (yoy).

Sumber utama tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 2,26% (yoy) pada triwulan II 2024. Peningkatan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga beras, cabai merah, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,51% (yoy), 0,46% (yoy), dan 0,43% (yoy). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi. Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir yang terjadi di daerah pusat produksi (Brebes dan Solok) sehingga adanya penurunan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi kedua terbesar yang memberikan andil inflasi sebesar 0,30% (yoy)



Grafik 3.10 Inflasi Kota Medan per Kelompok

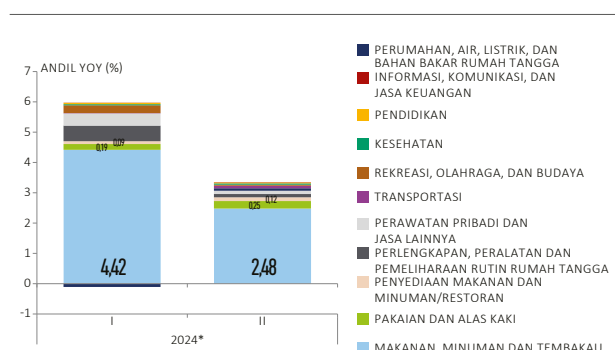
pada triwulan II 2024. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,29% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga dengan andil inflasi sebesar 0,17% (yoy) pada triwulan II 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas ini cenderung dipengaruhi dari tingginya permintaan masyarakat saat HBKN Idul Fitri dan HBKN Idul Adha yang juga diiringi dengan libur sekolah.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Medan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Pada triwulan II 2024, komoditas daging ayam ras, ikan dencis, dan pir menjadi penyumbang deflasi terdalam Kota Medan dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,19% (yoy), 0,12% (yoy), dan 0,04% (yoy).

Kabupaten Labuhanbatu Mencatatkan Inflasi Terendah

Tekanan inflasi di Kabupaten Labuhanbatu tercatat mengalami inflasi terendah di antara 8 Kota/Kab IHK Sumatera Utara. Pada triwulan



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.11 Inflasi Kab. Labuhanbatu per Kelompok

laporan, inflasi Kab. Labuhanbatu tercatat sebesar 3,18% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, inflasi tersebut didorong oleh sumbangan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 2,43% (yoy), 0,36% (yoy), dan 0,21% (yoy).

Tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara umum didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, dan cabai rawit, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,83% (yoy), 0,55% (yoy), dan 0,42% (yoy). Peningkatan harga

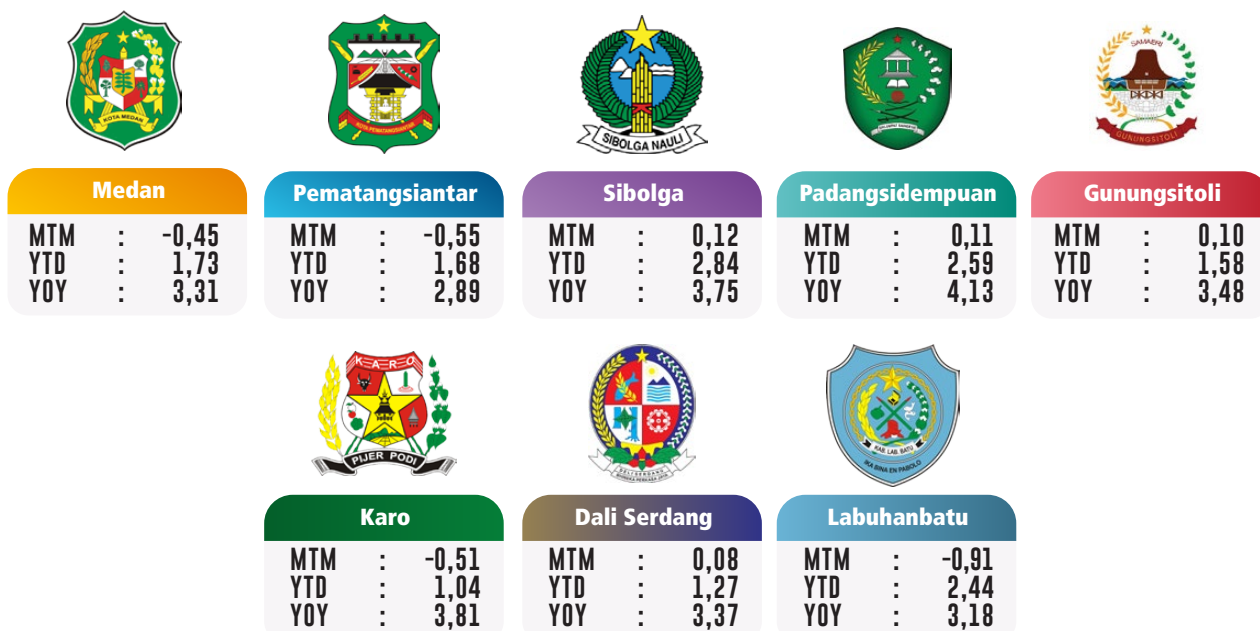
cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh faktor cuaca di daerah penghasil serta banyaknya libur di hari keagamaan yang membuat petani kerap tidak turun ke ladang yang menyebabkan penurunan produksi. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga turut menjadi penyumbang inflasi Kab. Labuhanbatu pada triwulan II 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,36% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga seragam sekolah anak dengan andil inflasi sebesar 0,12% (yoy). Kenaikan harga kedua komoditas ini terjadi seiring dengan masuknya tahun ajaran baru untuk anak sekolah.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,19% (yoy) pada triwulan I 2024. Kenaikan harga emas perhiasan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini disebabkan

Gambar 3.1 Inflasi di Kota/Kab IHK Sumatera Utara Triwulan I 2024

Perkembangan Inflasi secara spasial di Kota IHK Sumatera Utara



Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel

Andil Inflasi Triwulan II 2024 (yoy%)								
No.	Medan		Sibolga		Pematangsiantar		Padangsidempuan	
1	BERAS	0,512	CABAI MERAH	0,841	BERAS	0,694	CABAI MERAH	1,093
2	CABAI MERAH	0,460	BERAS	0,756	CABAI MERAH	0,451	BERAS	0,678
3	BAWANG MERAH	0,429	BAWANG MERAH	0,558	EMAS PERHIASAN	0,289	BAWANG MERAH	0,424
4	EMAS PERHIASAN	0,288	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,471	BAWANG MERAH	0,228	EMAS PERHIASAN	0,350
5	KENTANG	0,161	EMAS PERHIASAN	0,282	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,214	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,211
No.	Gunungsitoli		Karo		Deli Serdang		Labuhanbatu	
1	CABAI MERAH	0,833	BAWANG MERAH	1,555	CABAI MERAH	1,528	CABAI MERAH	0,830
2	BERAS	0,756	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,641	BERAS	0,874	BERAS	0,554
3	ANGKUTAN UDARA	0,359	CABAI MERAH	0,557	CABAI HIJAU	0,278	CABAI RAWIT	0,422
4	BAWANG MERAH	0,339	BERAS	0,528	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,252	BAWANG MERAH	0,391
5	CABAI RAWIT	0,280	EMAS PERHIASAN	0,263	BAWANG MERAH	0,227	TELUR AYAM RAS	0,370
Andil Deflasi Triwulan II 2024 (yoy%)								
No.	Medan		Sibolga		Pematangsiantar		Padangsidempuan	
1	DAGING AYAM RAS	-0,190	IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	-0,294	DAGING AYAM RAS	-0,397	IKAN DENCIS	-0,129
2	IKAN DENCIS	-0,118	IKAN SERAI	-0,115	IKAN ASIN TERI	-0,101	DAGING AYAM RAS	-0,128
3	PIR	-0,038	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,096	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,089	PIR	-0,063
4	PEPAYA	-0,034	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,093	IKAN DENCIS	-0,076	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,059
5	SAWI HIJAU	-0,024	CUMI-CUMI	-0,082	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG	-0,072	BAYAM	-0,040
No.	Gunungsitoli		Karo		Deli Serdang		Labuhanbatu	
1	DAGING BABI	-0,443	IKAN DENCIS	-0,591	DAGING AYAM RAS	-0,608	IKAN DENCIS	-0,267
2	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,215	TOMAT	-0,487	UDANG BASAH	-0,365	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG	-0,191
3	IKAN DENCIS	-0,131	TEBAKAU	-0,404	TOMAT	-0,223	BAWANG PUTIH	-0,178
4	SABUN DETERGEN BUBUK	-0,088	IKAN ASIN TERI	-0,186	BAYAM	-0,123	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-0,174
5	IKAN MERAH	-0,075	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0,125	KANGKUNG	-0,116	MINYAK GORENG	-0,146

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

oleh ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kab. Labuhanbatu tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Pada triwulan II 2024, komoditas ikan dencis, ikan kembung, dan bawang putih mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar 0,27% (yoy), 0,19%, dan 0,18% (yoy).

3.4 KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Realisasi inflasi di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan, sebagai langkah pengendalian inflasi ke depan perlu dukungan kuat berbagai program

pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara, terutama melalui GNPIP dengan mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selama triwulan II 2024, hal-hal yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa Upaya diantaranya:

- Pendataan tarif angkutan udara dalam negeri dari semua maskapai yang beroperasi yang dilakukan oleh pihak otoritas bandara setiap harinya guna memantau serta mengawasi kenaikan tarif angkutan udara yang melebihi Tarif Batas Atas



- (TBA), berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Utara.
- b. Melakukan serangkaian pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara masif di beberapa daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sumut dalam HLM TPID untuk menyediakan pangan murah selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri bagi masyarakat yakni berupa peningkatan frekuensi pasar murah khususnya saat HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, sampai dengan April 2024 tercatat telah terlaksana Operasi Pasar Murah 198 titik, dan Gerakan Pangan Murah di 196 titik.
 - c. Guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, Pemerintah Kota Medan melalui PUD Pasar Kota Medan juga menghadirkan 1 unit mobil pasar murah keliling pada 21 kecamatan secara bergiliran di Kota Medan yang menjajakan 3 komoditas kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir setiap hari kerja dengan harga subsidi Pemerintah Kota Medan.
 - d. Melakukan serangkaian pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara masif di beberapa daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sumut dalam Surat Edaran nomor 100.3.4/12/2024 tanggal 31 Mei tentang upaya menjaga inflasi tahun 2024 serta menjaga stabilisasi harga menjelang hari raya Idul Adha 1445 H. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam Rangka HBKN Idul Adha 1445 H di Halaman Kantor Dinas Pekebunan dan Peternakan Provsu pada tanggal 14 Juni 2024 serta telah dilakukan Pasar Murah dalam rangka memperingati Hari Krida di Kabupaten Karo pada tanggal 27 Juni 2024.
 - e. Telah ditetapkan IP 400 di 9 desa di Kab. Langkat, 2 desa di Kab. Serdang Bedagai dan 1 desa di Kota Tebing Tinggi dengan luas lahan 1.373 Ha, yang berdampak pada peningkatan masa tanam dari 3 kali menjadi 4 kali per tahun. Dukungan yang diberikan adalah penyediaan benih, pupuk organik, NPK, dan pestisida kepada petani serta pendampingan oleh PPL.
 - f. Optimalisasi realisasi pupuk subsidi kepada petani dengan hanya menggunakan KTP.
 - g. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melakukan penjajakan dan pembelian cabai merah langsung ke petani/keompok tani, dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pengembangan KAD serta untuk menyikapi tingginya harga kebutuhan pangan di Kota Medan khususnya cabai merah.
 - h. Menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di BULOG dalam jumlah yang mencukupi baik beras SPHP maupun beras komersil di bawah harga HET.
 - i. Peningkatan produksi juga terus dilakukan pada komoditas yang belum mencapai swasembada seperti bawang merah dan kacang kedelai. Peningkatan produktivitas bawang merah melalui program Pangan Kita Bersama di Kabupaten Humbang Hasundutan dan di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan teknik budidaya bawang merah dengan biji yang lebih terbebas dari risiko penyakit serta dapat memotong biaya produksi dan teknologi digital farming untuk mencapai efisiensi dalam pemupukan. Kemudian, dalam pengembangan swasembada kedelai, saat ini Pesantren Taruna Al-Qolam bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia berhasil mengembangkan budidaya kedelai di Sumatera Utara. Kedepan, akan dilakukan replikasi budidaya kedelai di lahan klaster padi Gapoktan Harapan sebagai tanaman selingan pasca panen. Selain itu, replikasi juga akan dilakukan pada pesantren binaan lainnya di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024. Diharapkan hal ini dapat menjadi langkah awal mendukung peningkatan produktivitas kedelai yang saat ini masih didominasi impor.

Ketersediaan Pasokan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, diantaranya:

- a. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi dengan optimalisasi penggunaan pompa air PLTS untuk area persawahan tadah hujan yang belum tersedia jaringan irigasi di Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhan Batu, dan Kab. Langkat.



- g. TPID Provinsi Sumatera Utara melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur pengawasan dan peruntukkan dan kuota bahan bakar subsidi, sebagai langkah antisipasi peningkatan permintaan akibat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.
- h. TPID Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Satgas ternak, melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak, komunikasi informasi dan edukasi biosecurity kandang ternak, pemberian bantuan obat-obatan hewan ternak, serta verifikasi surat kesehatan sebagai antisipasi memburuknya infeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak di Sumatera Utara.
- i. Dalam rangka merespon adanya kenaikan biaya saprodi untuk pupuk dan obat-obatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk biosaka yakni pupuk cair yang dibuat dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diyakini mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%,
- j. Distribusi Bantuan Benih Padi pada tanggal 18 s/d 20 April 2024 di Kabupaten Labuhan Batu. Jumlah bantuan yang disalurkan adalah seluas 150 ha dengan volume 3.750 kg dengan varietas inpari 32 yang berada di Kecamatan Panai Tengah, Desa Sei Nahodaris sebanyak 6 kelompok tani, serta:
- k. Telah dilaksanakan Sidak Pasar dalam rangka memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri pada tanggal 2 April di Pasar Petisah yg dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pada tanggal 4 April di Pasar Sei Sikambing yg dipimpin oleh Pj Gubernur Sumut.
- l. Sidak Pasar dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Sumatera Utara, terutama menyikapi kenaikan harga bawang putih pada tanggal 19 Mei 2024 di Pasar Petisah dan Pasar MMTC dihadiri oleh KPPU Wilayah I, Satgas pangan, OPD terkait, dan Bank Indonesia.
- m. Launching Gerakan Tanam Perluasan Areal Tanam Padi Gogo Dalam Rangka Mendukung Ketahanan

Pangan Nasional Tahun 2024 dan Pengendalian Inflasi di Kab. Simalungun bersama Kodim 0207 Simalungun, Polres Simalungun serta dihadiri Ketua Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Sumut dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut di Nagori Bah Bulian Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun pada tanggal 31 Mei 2024.

- n. Pelaksanaan sidak terhadap hotel, restoran, dan tempat karaoke terhadap gas LPG 3kg tanggal 7 Juni 2024. Dari hasil sidak, tidak ditemukan penggunaan gas LPG 3kg pada tempat yang telah disurvei.
- o. Pelaksanaan panen bersama cabai merah Demonstration Plot (Demplot) Good Agricultural Practices (GAP) klaster cabai merah Kabupaten Karo binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada 21 Juni 2024. Dalam kegiatan tsb juga sekaligus penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Sarana dan Prasarana Pertanian bagi 3 (tiga) Gapoktan di Kecamatan Dolat Rayat.

Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan untuk mendorong kelancaran distribusi adalah:

- a. Sinergi Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan sejumlah instansi dalam mempermudah aturan lalu-lintas distribusi pangan melalui pengutamaan akses yang baik dan lancar terhadap kendaraan pengangkut bahan pangan di dalam kota. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap jalur transportasi darat yang rawan bencana alam.
- b. Melakukan sidak pasar secara berkala berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam rangka memastikan kelancaran distribusi khususnya menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
- c. BULOG telah memperluas distribusi bahan pangan khususnya beras SPHP hingga ke ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, Transmart, dan Indogrosir, serta kerjasama dengan Grab (Grab Benefit).



Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, serta membangun persepsi positif masyarakat diantaranya:

- a. Bank Indonesia Sumatera Utara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat usulan pengendalian inflasi di daerah dan himbuan melaksanakan High Level Meeting (HLM) kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten berikut dengan evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 secara periodik.
- b. Telah diterbitkan SE Gubernur Sumut tanggal 14 Maret 2024 perihal Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2024 serta Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri I 2024. OPD terkait diminta mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, optimalisasi operasi pasar murah, memastikan ketersediaan stok pangan, memastikan kelancaran distribusi dan melakukan moral persuasion untuk pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pangan pokok.
- c. Telah dilakukan Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan serta Gerakan Pangan Murah dalam rangka menghadapi Idul Fitri pada 1 April 2024 di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provsu.
- d. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID Sumatera Utara pada 5 April 2024 dalam rangka evaluasi harga komoditas pangan strategis jelang Idul Fitri. Rakor tersebut juga bertujuan untuk konsolidasi lebih lanjut dgn TPID kab/kota perihal penyampaian laporan harian ke Kemedagri dan laporan triwulanan/tahunan ke Kemenko.
- e. Program Mudik Gratis pada 6 April 2024 oleh Pemerintah Provsu sebagai upaya menekan angka kecelakaan, dan mengantisipasi dampak inflasi transportasi. Mudik gratis ini diikuti sebanyak 2.500 orang.
- f. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Komoditas Pangan dengan Gapokan Juli Tani dan Stakeholders yang menangani Pangan di Deli Serdang pada tanggal 3 Mei 2024 dalam rangka peningkatan produksi cabai merah.
- g. Telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam bentuk MoU dan PKS antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo pada tanggal 13 Mei 2024 dengan komoditas yang dikerjasamakan antara lain: telur ayam ras, cabai merah, dan ikan beku.
- h. Telah dilaksanakan HLM TPID & TP2DD wilayah Sisibataslabuhan (Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan) pada 22 Mei 2024. HLM bertujuan untuk menetapkan sinergi ketahanan pangan dan kolaborasi perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah untuk kesejahteraan Sisibataslabuhan.
- i. Telah diterbitkan SE Gubernur Sumut tanggal 31 Mei 2024 perihal Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2024 serta Menjaga Stabilisasi Harga Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H. OPD terkait diminta untuk mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, melakukan sinergi pengawasan, intervensi pasar mealui pasar murah/GPM, memastikan ketersediaan stok dan distribusi pasokan pangan melalui subsidi ongkos angkut. Disamping itu, OPD juga diminta untuk melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan penyesuaian tarif yang menjadi kewenangan pemda, melakukan moral persuasion, hingga merealisasikan dana BTT.
- j. Pelaksanaan berbagai rapat koordinasi dan HLM dalam rangka pengendalian inflasi, antara lain:
 - i. Rapat koordinasi stabilisasi harga barang pokok di Provinsi Sumatera Utara (5 Juni 2024) dalam rangka menjaga stabilisasi harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan upaya pengendalian inflasi daerah menjelang HBKN Idul Adha 2024.
 - ii. Rapat TPID Tebing Tinggi tanggal 6 Juni 2024 yang membahas evaluasi pengendalian inflasi Mei 2024 dan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha 2024.



- iii. Rapat Koordinasi/HLM TPID Sumatera Utara menjelang HBKN Idul Adha dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Memenuhi Kecukupan Pasokan dan Efisiensi Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis dalam Rangka Menghadapi HBKN Idul Adha 2024 pada tanggal 11 Juni 2024
- iv. HLM TPID Serdang Bedagai dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Produk Pangan Unggulan menuju Ekonomi Berdaya Saing” di Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 Juni 2024

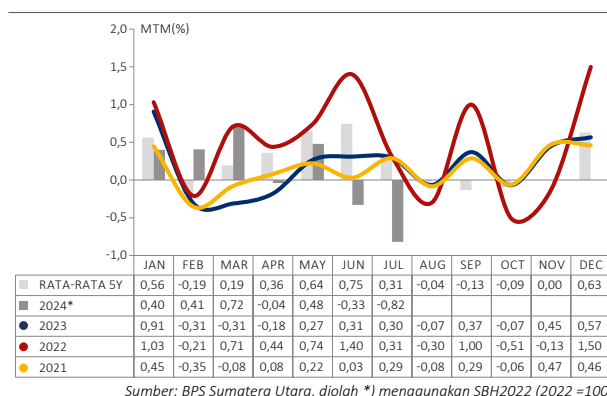
3.5 PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN III 2024

Provinsi Sumatera Utara Mencatatkan Deflasi Pada Juli 2024

Secara bulanan, gabungan kota/kabupaten IHK Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2024 mengalami deflasi. Tingkat deflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 0,82% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (Juni 2024) yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm) – (Grafik 3.12). Adapun angka realisasi deflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang mengalami deflasi mencapai 0,18% (mtm) dan relatif lebih rendah dari rerata historis inflasi tiga tahun terakhir yang sebesar 0,30% (mtm). Sumber deflasi terutama terjadi karena penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (antara lain cabai merah, bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan ikan tongkol), dan juga kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Secara spasial, dari 8 kota/kab IHK di Sumatera Utara, tercatat seluruh kota/kab mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi di Deli Serdang 1,35% (mtm), diikuti oleh Labuhanbatu 1,00% (mtm), Sibolga 0,81% (mtm), Padangsidimpuan 0,65% (mtm), Medan 0,64% (mtm), Karo 0,62% (mtm), Gunungsitoli 0,33% (mtm) dan Pematangsiantar 0,31% (mtm).

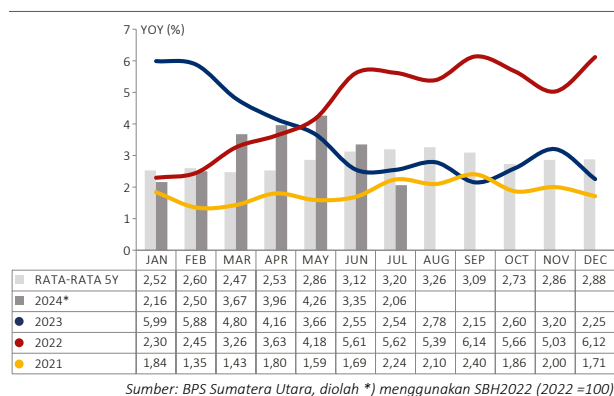
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang deflasi pada Juli 2024.



Grafik 3.12 Historis Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Utara

Kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar 2,45% (mtm), dengan andil deflasi bulanan sebesar 0,88% (mtm). Deflasi tersebut utamanya didorong oleh penurunan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, tomat, daging ayam ras dan ikan tongkol dengan andil deflasi bulanan masing-masing sebesar 0,28%, 0,27%, 0,10%, 0,07% dan 0,05%. Penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan tomat terutama didorong oleh peningkatan pasokan selama musim panen di sentra produksi, seperti Batubara (cabai merah), Simalungun dan Dairi (bawang merah), Karo dan Dairi (Tomat). Harga daging ayam ras juga menurun seiring dengan peningkatan produksi dan penurunan harga pakan ternak, terutama jagung.

Adapun secara tahunan, inflasi Gabungan Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,06% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,35% (yoy) – (Grafik 3.13). Inflasi tahunan pada Juli 2024 juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 3,47% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi Juli 2024 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,26% (yoy), 0,28% (yoy), dan 0,12% (yoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga beras, cabai merah, dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,52% (yoy), 0,31% (yoy), dan 0,19%



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah *) menggunakan SBH2022 (2022 =100)

Grafik 3.13 Historis Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Utara

(yoy). Selanjutnya, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,25% (yoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki utamanya didorong oleh kenaikan harga seragam sekolah anak dan baju muslim wanita dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Tekanan Inflasi Triwulan III 2024 Diperkirakan Tetap Tinggi

Inflasi gabungan kota/kabupaten IHK Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024, dan berada dalam sasaran target inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy).

Tekanan inflasi bersumber dari akselerasi harga pada seluruh komponen disagregasi, baik *Core Inflation (CI)*, *Administered Price (AP)*, dan *Volatile Food (VF)*. Arah komponen CI mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh potensi meningkatnya kegiatan kampanye politik menjelang Pilkada yang mendorong mobilitas dan peningkatan permintaan sembako (bansos), potensi peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, hingga potensi berlanjutnya peningkatan harga emas dunia (safe haven). Selanjutnya, inflasi komponen VF justru diperkirakan menurun akan didorong oleh adanya beberapa rencana panen komoditas di wilayah Sumatera Utara pada triwulan III 2024: (i) Padi yang panen besar pada Juli - September (terakhir panen besar pada Feb-April); (ii) Cabai Merah yang panen besar pada Juli -

Agustus. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tingginya inflasi VF (yoy) akibat dari proyeksi cuaca di Jawa yang masuk ke musim kemarau sehingga memengaruhi produksi di Jawa. Arah komponen AP juga diperkirakan akan sedikit mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh tingginya permintaan masyarakat dari sisi Angkutan Udara terkait pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara, namun harga ini akan tetap terjaga seiring normalisasi harga yang sudah cukup tinggi sepanjang TW II pada momen HBKN Idul Fitri.

Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 diperkirakan disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara meskipun tekanannya masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2024. Tekanan ini diduga dapat terjadi dengan masih terjaganya konsumsi masyarakat ditengah prakiraan pasokan yang cukup untuk triwulan III 2024. Pasokan yang cukup ini didorong dengan adanya rencana panen yang terjadi di berbagai daerah, seperti cabai merah dan padi yang mulai panen di bulan di beberapa kabupaten sentra di Sumatera Utara.

Selanjutnya, Kelompok Transportasi diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas dan tingginya permintaan masyarakat dari sisi Angkutan Udara terkait pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara meskipun harganya diperkirakan akan tetap terjaga seiring normalisasi harga dari triwulan II 2024.

Berdasarkan perkembangan tersebut, secara keseluruhan pada triwulan III 2024, laju inflasi Gabungan Provinsi Sumatera Utara diperkirakan mengalami tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2024.







Bab IV

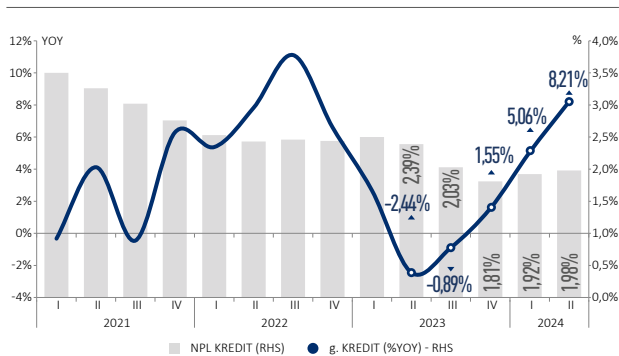
Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan kredit di Sumatera Utara semakin menguat. Pada Tw-II 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat dari 5,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,21% (yoy), didorong oleh pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja).

Kredit Rumah Tangga tumbuh menguat seiring dengan peningkatan konsumsi selama perayaan Idul Fitri, serta berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Selain itu, kredit korporasi pada sektor perdagangan dan industri pengolahan juga tumbuh menguat seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan peningkatan investasi sektor swasta.

Sementara itu, risiko penyaluran kredit masih cukup rendah yang tercermin dari Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,98%, dan tingkat kesehatan perbankan juga cukup baik yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 82,7%.





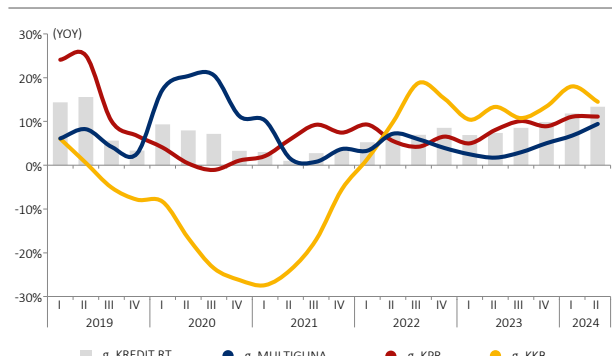
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara

4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

Penyaluran kredit di Sumatera Utara semakin meningkat dengan risiko yang terjaga. Pada triwulan II 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 8,21% (yoy) dari triwulan sebelumnya 5,06% (yoy) dengan risiko yang terjaga, tercermin dari *Non Performing Loan (NPL)* yang rendah sebesar 1,98% – (Grafik 4.1). Hal ini didorong oleh tetap kuatnya seluruh jenis kredit baik kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh kuat seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sedikit melambat dengan pertumbuhan yang cenderung berimbang antara segmen mikro, kecil dan menengah. Kinerja kredit korporasi mencatatkan perbaikan didorong oleh meningkatnya kredit modal kerja. Meski demikian, secara sektoral kredit di sektor pertanian masih tertahan, terutama pada subsektor perkebunan, seiring dengan perilaku *wait and see* pelaku usaha perkebunan sawit terhadap penurunan permintaan CPO negara utama tujuan ekspor.

Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 82,7%, sehingga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.



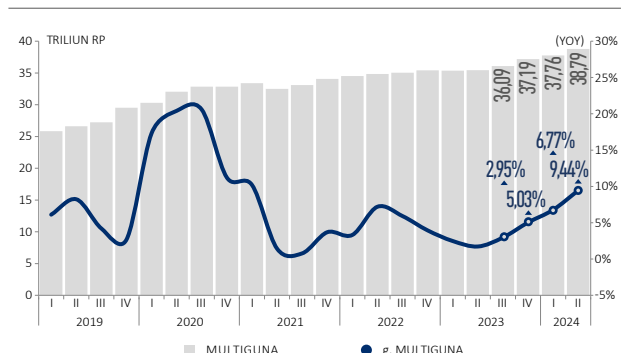
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

Pada triwulan II 2024, kredit rumah tangga tumbuh menguat seiring dengan berlanjutnya insentif pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp81,72 triliun atau tumbuh 13,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2024 sebesar 11,81% (yoy) (Grafik 4.2). Menguatnya pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 14,47% (yoy) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 11,10% (yoy), serta tetap kuatnya pertumbuhan kredit multiguna sebesar 9,44% (yoy).

Kinerja kredit rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit multiguna. Dengan pangsa yang mendominasi kredit RT (±47%), kredit multiguna tercatat tumbuh 9,44% (yoy) pada triwulan II 2024, meningkat dari sebelumnya 6,77% pada triwulan I-2024 – (Grafik 4.3). Hal ini didorong oleh solidnya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Kredit Multiguna



Tabel 4.1

Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor

KKB	Growth (%)		Pangsa (%)		Kontribusi	
	Q1'24	Q2'24	Q1'24	Q2'24	Q1'24	Q2'24
Mobil Roda Empat	20,1%	15,4%	83,0%	83,2%	16,7%	12,8%
Sepeda Bermotor	19,4%	15,8%	14,7%	14,1%	2,8%	2,2%
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-40,9%	-47,0%	1,8%	1,4%	-0,7%	-0,7%
Kendaraan Bermotor Lainnya	67,5%	209,1%	0,6%	1,3%	0,4%	2,7%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

konsumsi di Sumatera Utara seiring dengan masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri .

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tetap kuat pada triwulan-II 2024. Pertumbuhan KKB tercatat tetap tinggi pada triwulan II-2024 yang tercatat 14,47% (yoy). Berlanjutnya insentif makroprudensial berupa LTV 0% disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang mengakselerasi pembelian kendaraan bermotor dengan melalui kredit. Selain itu, munculnya merk-merk di mobil berbasis bahan bakar maupun listrik seperti Hyundai, Wuling, Morris Garage (MG), VinFast, dan *Build Your Dreams* (BYD) disertai dengan promosi yang gencar dan insentif fiskal (PPN), terutama pada pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), mendorong masyarakat untuk mencoba dan melakukan pergantian kendaraan.– (Tabel 4.1).

KPR juga tumbuh tinggi didorong dari seluruh tipe rumah maupun apartemen. Pertumbuhan KPR pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 11,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2024 yang tercatat 11,07% (yoy). Hal ini didorong LTV 100% yang disertai dengan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 50% untuk hunian maupun rumah komersial dengan harga Rp 2 – 5 miliar rupiah.

Akselerasi KPR terlihat dari pertumbuhan kredit pada berbagai tipe Rumah Tinggal, baik Tipe 21 sebesar 34,9% (yoy); Tipe 22 s.d 70 sebesar 8,7% (yoy), dan Tipe diatas 70 yang tumbuh dari 11,9% (yoy); Flat atau Apartemen baik s.d Tipe 21 sebesar 2,7% (yoy); Tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 27,2% (yoy); hingga Flat atau Apartemen Tipe diatas 70 sebesar 8,5%

Tabel 4.2

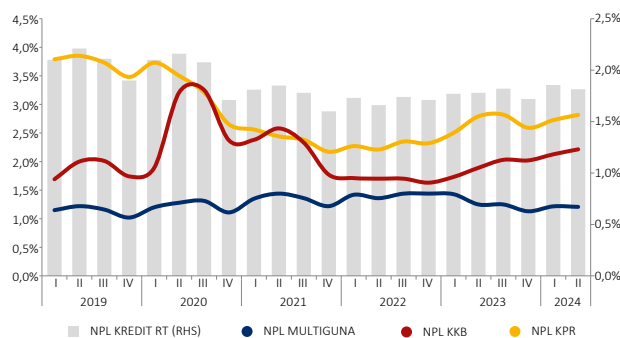
Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

KPR	Growth (% yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi	
	Q1'24	Q2'24	Q1'24	Q2'24	Q1'24	Q2'24
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	-74,6%	34,9%	0,9%	3,2%	-0,6%	1,1%
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	-2,5%	8,7%	47,2%	53,0%	-1,2%	4,6%
Rumah Tinggal Tipe Datas 70	15,7%	11,9%	35,2%	34,8%	5,5%	4,2%
Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	-7,8%	2,7%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	28,9%	27,2%	1,0%	1,1%	0,3%	0,3%
Flat atau Apartemen Tipe Datas 70	17,2%	8,5%	1,2%	1,2%	0,2%	0,1%
Rumah Toko atau Rumah Kantor	146,4%	15,4%	14,4%	6,5%	21,1%	1,0%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

(yoy). Hal ini sejalan dengan insentif PPN DTP yang diperkirakan menyasar properti segmen menengah. Selain itu, PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Hal ini juga mendorong pertumbuhan kredit Rumah Toko atau Rumah Kantor menjadi 15,4% (yoy) pada triwulan-II 2024 (Tabel 4.2).

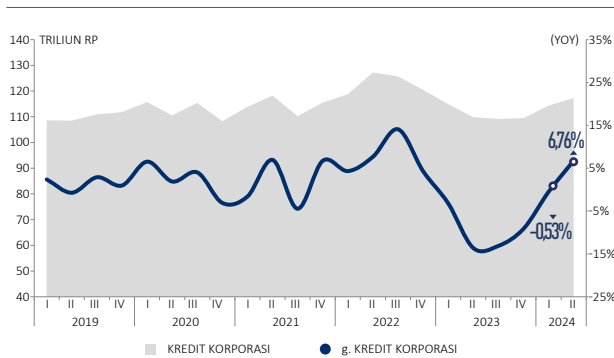
Kualitas kredit Rumah Tangga yang tercermin dari besarnya Non-Performing Loan (NPL) tetap berada di bawah 5%. NPL kredit Rumah Tangga tercatat menurun pada triwulan laporan, dari 1,86% pada triwulan I-2024 menjadi 1,81% pada triwulan laporan. Penurunan NPL terjadi segmen kredit multiguna dari 1,22% pada triwulan I-2024 menjadi 1,21% pada triwulan II-2024. Disisi lain, NPL kredit KPR naik dari 2,72% pada triwulan laporan, NPL KKB naik dari 2,13% pada triwulan I-2024 menjadi 2,21% pada triwulan laporan – (Grafik 4.4).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4

NPL Kredit Rumah Tangga



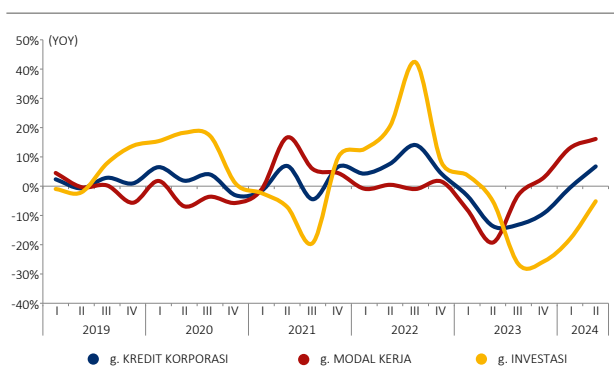
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Korporasi

4.1.2 Pembiayaan Korporasi

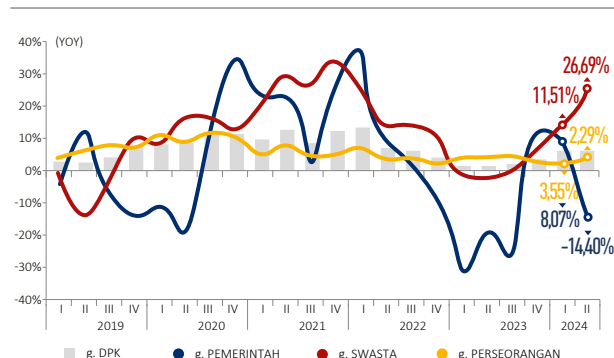
Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2024 mulai meningkat. Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2024 meningkat sebesar 6,76% (yoy) setelah triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar -0,53% (yoy) – (Grafik 4.5).

Perbaikan pertumbuhan kredit korporasi didorong peningkatan likuiditas sektor swasta, tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta yang tumbuh tinggi, terutama pada nilai di atas Rp 10 miliar. Namun demikian, apabila dilihat secara sektoral, kredit pertanian yang mayoritas didominasi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, masih tumbuh negatif. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya permintaan ekspor CPO ke negara mitra utara dan masih cukupnya likuiditas korporasi swasta seiring dengan tingginya harga CPO pada triwulan II 2024. Dengan kondisi tersebut, korporasi eksportir kelapa sawit masih menahan ekspansi dan apabila



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK Sumatera Utara berdasarkan Sektor

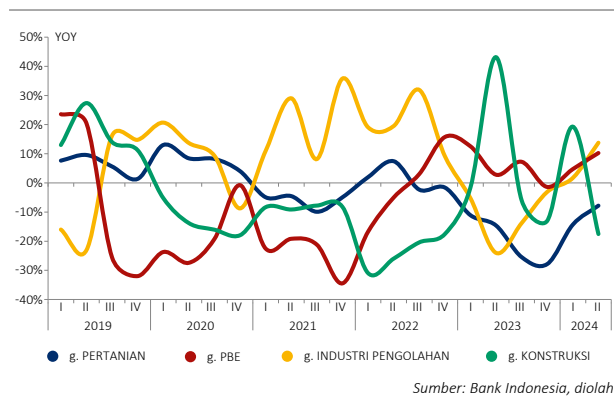
melakukan ekspansi masih cukup menggunakan dana sendiri. – (Grafik 4.6).

Berdasarkan jenis penggunaan, seluruh jenis berada dalam *path* perbaikan – (Grafik 4.7).

Pada triwulan II 2024, kredit modal kerja korporasi terakselerasi dari 13,0% (yoy) menjadi 16,2% (yoy) pada triwulan-II 2024. Peningkatan ini utamanya didorong oleh sektor perdagangan seiring dengan peningkatan konsumsi jelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Di satu sisi, kredit investasi juga berada dalam tren pemulihan dari -18,0% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi -5,1% (yoy) pada triwulan II-2024. Masih melimpahnya likuiditas di sektor swasta sehingga kegiatan investasi diperkirakan masih didanai dari likuiditas perusahaan. Di tengah perbaikan kredit korporasi, kualitas kredit korporasi masih tetap terjaga, tampak dari tingkat NPL kredit koperasi yang tetap rendah sebesar 1,4% pada triwulan II 2024.

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan kredit terlihat pada sektor perdagangan dan industri pengolahan, sedangkan sektor pertanian masih tertahan – (Grafik 4.8).

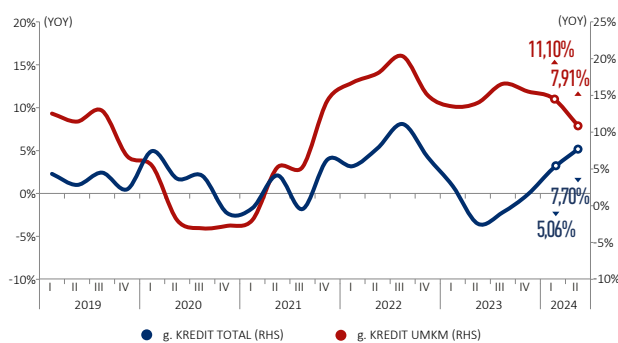
Kredit Industri Pengolahan pada triwulan II 2024 masih tumbuh sebesar 13,1% (yoy) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemulihan juga terlihat pada sektor perdagangan, besar dan eceran (PBE) yang tercatat tumbuh 10,3% (yoy) pada triwulan II 2024 dari sebelumnya tumbuh sebesar 4,8% (yoy). Tingginya likuiditas di sektor tersebut mendorong sektor swasta untuk mengutamakan pemanfaatan dana



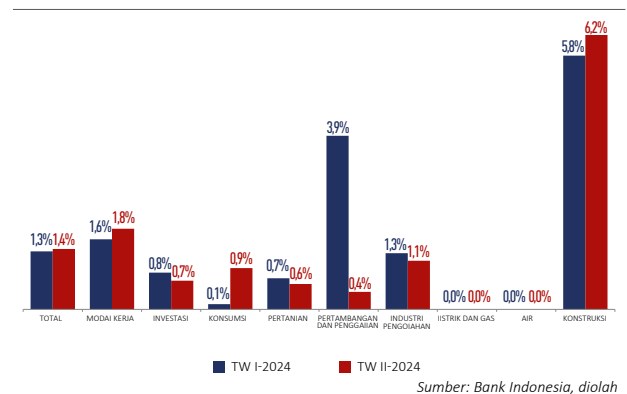
Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

kas atau setara kas yang dimiliki untuk mendanai ekspansi perusahaan. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi pada sektor utama lainnya yakni pertanian masih terbatas yakni -7,8% (yoy) sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -14,3% (yoy), serta pada sektor Konstruksi yang kembali berkontraksi sebesar -17,6% (yoy) setelah sebelumnya berhasil tumbuh sebesar 4,8% (yoy).

Selanjutnya, dilihat berdasarkan rasio kredit yang bermasalah, NPL kredit korporasi tetap terjaga pada level yang rendah. Pada triwulan II 2024, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,4% atau cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi sektoral, sektor yang mengalami penurunan NPL adalah Industri Pengolahan dari 1,3% menjadi 1,1% pada triwulan laporan serta sektor Pertanian dari 0,7% menjadi 0,6% pada triwulan laporan. Terbatasnya pertumbuhan kredit yang disertai penurunan NPL di sektor pertanian mengkonfirmasi bahwa terbatasnya intermediasi pada sektor tersebut



Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit UMKM

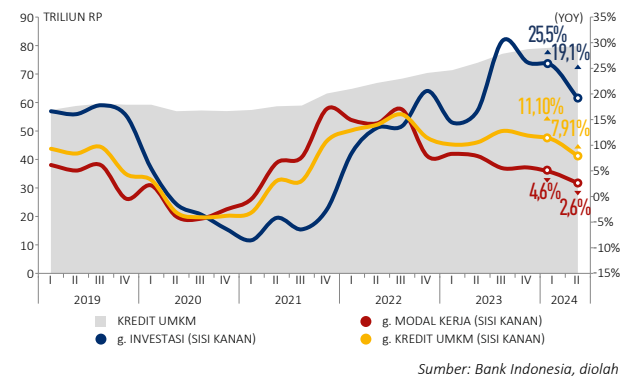


Grafik 4.9 NPL Kredit Korporasi

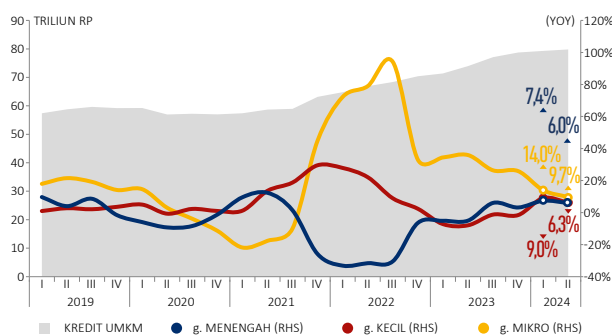
tidak terkait dengan faktor kehati-hatian. Di sisi lain, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan NPL meski tidak terlalu besar, seperti sektor konstruksi (Grafik 4.9).

4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pertumbuhan kredit UMKM masih tinggi, meski melambat dari triwulan sebelumnya. Kredit yang disalurkan untuk UMKM pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp79,81 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 7,91% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,10% (yoy) – (Grafik 4.10). Berdasarkan jenis kreditnya, kredit modal kerja yang mendominasi pangsa kredit UMKM hingga 65% masih menunjukkan tren penurunan menjadi 2,6% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit investasi sedikit termoderasi dari 25,5% (yoy) pada triwulan I-2024 menjadi 19,1% (yoy) pada triwulan II-2024 – (Grafik 4.11).



Grafik 4.11 Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM

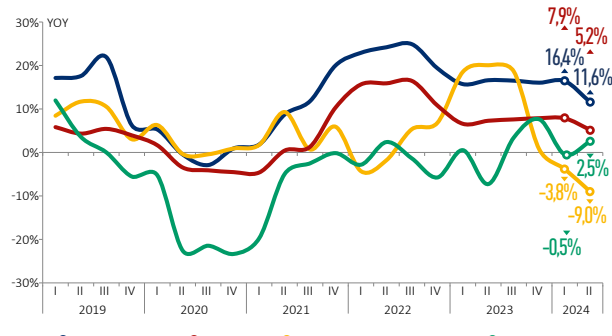
Ditinjau dari segmennya, pertumbuhan kredit UMKM di triwulan-II 2024 cenderung berimbang.

Secara nominal, pangsa kredit terbesar berasal dari segmen mikro sebesar 50,63%, diikuti oleh segmen kecil 27,89% dan menengah 21,48%. Pertumbuhan penyaluran kredit pada segmen usaha cenderung berimbang pada triwulan-II 2024. Pertumbuhan kredit kelompok mikro pada triwulan II 2024 tetap tumbuh sebesar 9,7% (yoy) – (Grafik 4.12). Selanjutnya, kredit kelompok kecil juga turut menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,3% (yoy) meskipun sedikit menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 9,0% (yoy). Sedangkan kredit menengah melemah terbatas dengan pertumbuhan pada triwulan laporan sebesar 7,4% (yoy) dari triwulan I-2024 yang tumbuh sebesar 6,0% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan di beberapa sektor – (Grafik 4.13).

Penyaluran kredit UMKM di sektor pertanian tumbuh tetap tinggi sebesar 11,6% (yoy), meski sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,4% (yoy). Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas panen dan produksi Tandan Buah Segar (TBS) masih berlangsung seiring cuaca yang kondusif. Penyaluran kredit di sektor PBE juga tetap tinggi yakni sebesar 5,2% (yoy). Di sisi lain, kinerja kredit UMKM di sektor industri pengolahan mengalami pelemahan.

Rasio kredit bermasalah UMKM meningkat dari 3,40% menjadi sebesar 3,44%. Kredit UMKM segmen mikro, yang memiliki share tertinggi mencapai

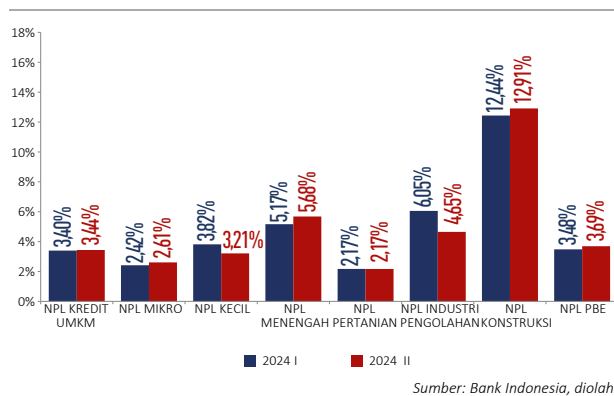


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

51%, mencatatkan NPL yang rendah meski sedikit meningkat dari 2,42% menjadi 2,61% pada triwulan berjalan. NPL di segmen menengah juga meningkat terbatas dari 5,17% menjadi 5,68% pada triwulan berjalan. Di satu sisi, NPL kredit UMKM kecil tergolong mengalami penurunan yakni dari 3,82% di triwulan I-2024 menjadi 3,21% di triwulan II-2024. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, rasio kredit bermasalah LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU PBE masih berada pada kondisi aman (dibawah 5%). Namun demikian, perkembangan NPL LU konstruksi masih perlu diperhatikan ke depannya karena memiliki risiko kredit diatas 5% – (Grafik 4.14). Kondisi ini sejalan dengan hasil FGD dengan perbankan di Kota Medan yang menyatakan bahwa LU Konstruksi merupakan sektor prioritas pembiayaan dengan risiko tinggi dengan dampak ekonomi yang besar.

Bank Indonesia melalui kebijakannya senantiasa terus berupaya mendorong optimalisasi realisasi kredit baik kredit secara keseluruhan maupun UMKM. Dalam upaya meningkatkan pembiayaan perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 memberikan insentif bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, dan/atau perbankan yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) harian sampai dengan sebesar 100 bps yang berlaku efektif sejak



Grafik 4.14 Perkembangan NPL Kredit UMKM

1 Maret 2022. Adapun kewajiban pemenuhan RPIM yang tercantum dalam PBI Nomor 24/3/PBI/2022 dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali pada posisi Desember 2022 dengan penetapan target RPIM sesuai dengan penilaian mandiri bank tersebut. Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, target RPIM yang ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

Di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga mendorong pengembangan UMKM melalui pemenuhan target Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Adapun target pengembangan tersebut di antaranya pengembangan UMKM *go marketplace*, UMKM *go cashless*, fasilitasi UMKM *go export*, dan pemberdayaan kelompok UMKM wanita. Selain dari target TPAKD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia turut mengembangkan UMKM binaan Bank Indonesia melalui pembinaan, pendampingan, dan *business matching*, serta pembukuan melalui pelatihan pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sehingga mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.





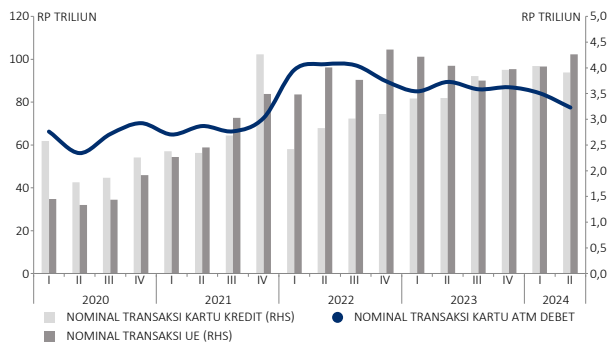


Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II-2024, transaksi sistem pembayaran tumbuh melambat. Transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Nominal transaksi kartu ATM debit yang tumbuh melambat pada triwulan II-2024 diperkirakan terjadi seiring dengan munculnya berbagai inovasi instrumen pembayaran lainnya, seperti digital banking, sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam bertransaksi. Daya beli masyarakat bawah masih didukung oleh penyerapan bantuan sosial yang sesuai dengan rencana. Akselerasi sistem pembayaran non tunai didukung oleh perbaikan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Selain itu secara keseluruhan, aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II-2024 mencatatkan net inflow sebesar Rp2.4 triliun. Lebih lanjut, layanan kegiatan usaha penukaran valas (KUPVA) mengalami sedikit penurunan. Di sisi lain, transaksi transfer dana melalui PJP LR masih berkontraksi sejalan dengan penyesuaian pemulihan aktivitas remitansi secara persisten.





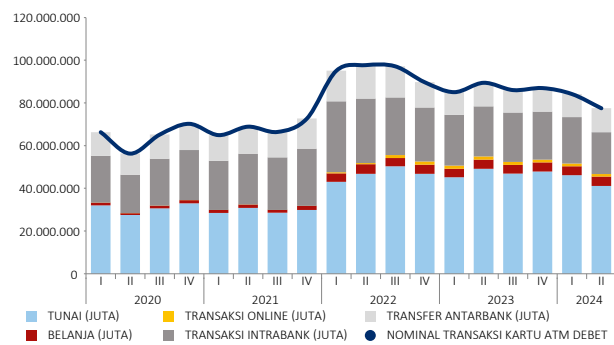
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE

5.1 SISTEM PEMBAYARAN TERUS TUMBUH MESKIPUN MELAMBAT

Pada triwulan II-2024, transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Salah satu instrumen yang terus menunjukkan tren peningkatan yaitu Uang Elektronik. Peningkatan penggunaan Uang Elektronik tercermin baik dari pertumbuhan nominal transaksi sebesar 5.53% (yoy) maupun volume transaksi sebesar 19.21% (yoy) (Grafik 5.1). Meningkatnya penggunaan non-tunai sejalan dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan fasilitas kanal pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal). Meskipun demikian, pada triwulan II-2024, nominal transaksi kartu ATM debit dan kartu kredit di Sumatera Utara mengalami perlambatan.

Nominal transaksi kartu ATM debit yang tumbuh melambat pada triwulan II-2024 diperkirakan terjadi seiring semakin meningkatnya transaksi digital banking. Pada triwulan II-2024, nominal transaksi kartu ATM debit tercatat kontraksi sebesar -13.35% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2024 sebesar -1.03% (yoy) (Grafik 5.1). Penurunan nominal transaksi kartu ATM debit terlihat pada transaksi tarik tunai, belanja, transaksi online, transfer antar bank dan intra bank (Grafik 5.2).

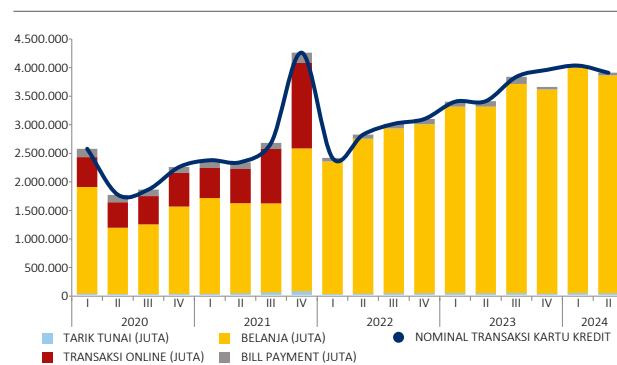
Transaksi kartu kredit di Sumatera Utara juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan II-



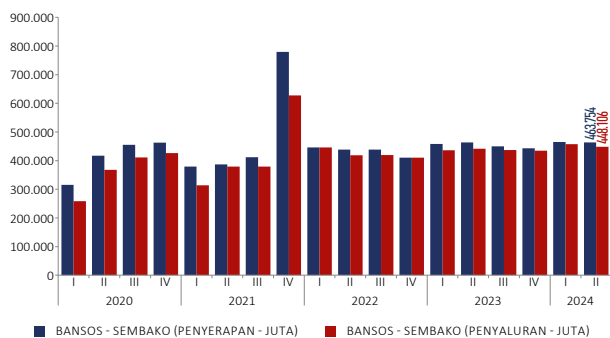
Grafik 5.2 Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit

2024, pertumbuhan nominal transaksi kartu kredit di Sumatera Utara yang menunjukkan perlambatan, yaitu dari 18.06% (yoy) pada periode sebelumnya menjadi sebesar 14.56% (yoy). Lebih lanjut, pada nominal transaksi kartu kredit menunjukkan penurunan hampir di seluruh kategori transaksi diantaranya pada transaksi belanja dan *bill payment*. Namun demikian transaksi tarik tunai terus menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 4% (yoy) pada triwulan II-2024 (Grafik 5.3).

Daya beli masyarakat bawah ditopang oleh penyerapan bantuan sosial (bansos). Penyaluran program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berjalan lancar. Pada penyaluran bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap berjalan dengan lancar. Pada triwulan II 2024, penyaluran BPNT tercatat Rp463.75 miliar dengan tingkat penyerapan 96.63% atau sebesar Rp448.11 miliar (Grafik 5.4). Hingga triwulan II 2024, mekanisme penyaluran BPNT di Sumatera Utara masih dilakukan



Grafik 5.3 Alokasi Penggunaan Kartu Kredit



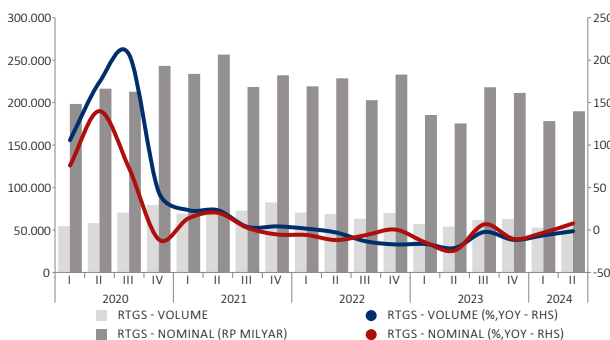
Sumber: Kementerian Sosial, diolah

Grafik 5.4 Perkembangan BPNT

melalui dua metode, yaitu metode tunai (PT. Pos) dan non tunai (Himbara dan BSI).

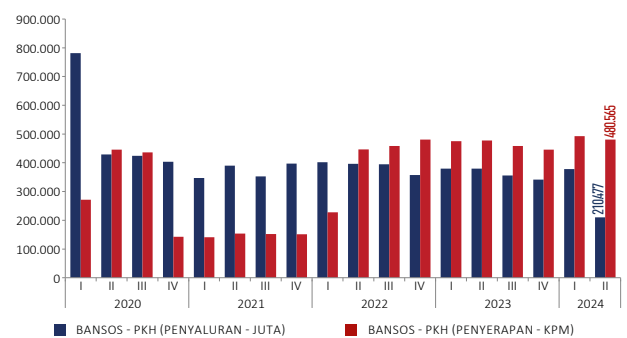
Sejalan dengan program BPNT, pada Program Keluarga Harapan (PKH) penyaluran juga masih berjalan lancar. Penyaluran PKH pada tahap II 2024 sebesar Rp210,48 miliar, sementara dari sisi jumlah KPM penyerapan tercatat sebanyak 480.56 ribu KPM atau dengan tingkat penyerapan 98,04% yang menunjukkan penyerapan PKH masih berjalan dengan baik (Grafik 5.5).

Di sisi lain, transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) kembali pulih dan menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan nominal transaksi sistem RTGS pada triwulan II-2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp189.91 triliun atau meningkat menjadi sebesar 8.2% (yoy). Sejalan dengan peningkatan nominal transaksi, volume transaksi RTGS pada triwulan II-2024 tercatat meningkat meskipun masih



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan RTGS

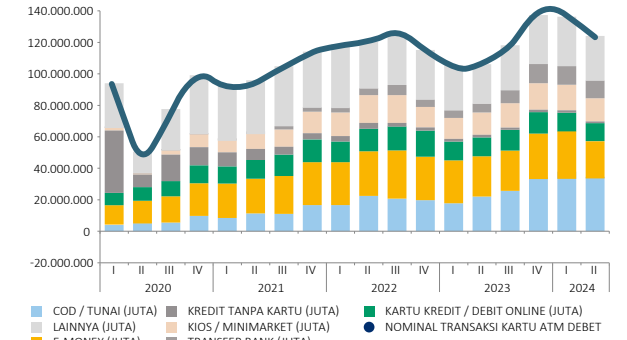


Sumber: Kementerian Sosial, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan PKH

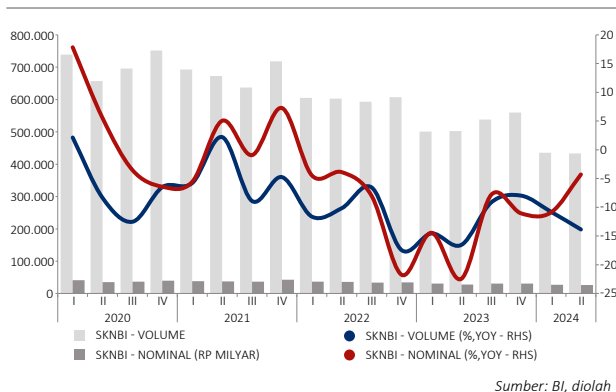
berada pada sisi kontraksi pada angka 53.2 ribu transaksi atau meningkat menjadi -1.4% (yoy), lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan I-2024 sebesar 52.8 ribu transaksi atau -7.6% (yoy) (Grafik 5.6).

Transaksi e-commerce menunjukkan perlambatan pada Tw-II 2024. Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan nominal transaksi e-commerce yang dari yang semula 22.1% (yoy) pada triwulan I 2024, selanjutnya berada pada angka 13.4% (yoy) pada triwulan-II 2024 dengan nominal transaksi e-commerce sebesar Rp115.7 triliun (Grafik 5.7). Penurunan tersebut juga tercermin pada volume transaksi e-commerce yang menjadi 26.1 juta transaksi pada triwulan II-2024 dari yang sebelumnya 28.1 juta transaksi pada triwulan I-2024. Berdasarkan metode pembayarannya, sebagian besar pengguna e-commerce bertransaksi melalui e-money (20.52%), tunai (18.12%), serta kredit tanpa kartu (12.51%).



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi E-Commerce



Sumber: BI, diolah

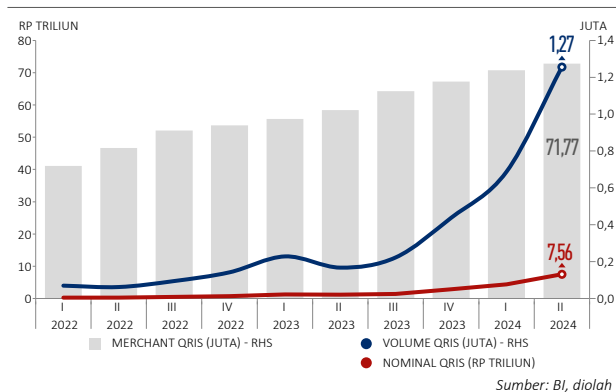
Grafik 5.8 Perkembangan SKNBI

Penggunaan infrastruktur SKNBI kembali menunjukkan agresivitasnya, meskipun masih berada pada sisi kontraksi. Pada triwulan II-2024, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI menunjukkan tren peningkatan menjadi sebesar -4.7% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar -12.3% (yoy). Namun demikian, perbaikan tersebut belum diiringi dengan peningkatan volume transaksi SKNBI yang tumbuh melambat pada angka negatif sebesar -13.8% (yoy) (Grafik 5.8). Pertumbuhan pada sisi kontraksi transaksi SKNBI terjadi seiring dengan munculnya infrastruktur sistem pembayaran lain menyebabkan proporsi penggunaan SKNBI terbagi ke infrastruktur tersebut.

5.2 PROGRAM ELEKTRONIFIKASI BERJALAN LANCAR

Perkembangan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus terakselerasi. Peningkatan penggunaan uang elektronik ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara. QRIS merupakan standarisasi pembayaran melalui metode QR Code atau kode baca cepat dari Bank Indonesia sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Pada triwulan II-2024, jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara sebanyak 1.27 juta merchant atau tumbuh sebesar 24.6% (yoy). Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui kemudahan sistem pembayaran



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.9 Perkembangan QRIS

yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal), Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terus berupaya mendorong perluasan implementasi QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran digital.

Edukasi dan sosialisasi pembayaran digital intensif dilakukan guna mendorong akseptasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut jumlah pengguna QRIS di Sumatera Utara tercatat telah mencapai 2.53 juta pengguna atau tumbuh 37.35% (yoy). Dalam rangka mendorong akseptasi pembayaran non tunai pada triwulan II 2024 berbagai inisiasi program yang dilaksanakan seperti kolaborasi sosialisasi dan *user experience* bersama dengan regulator, pemerintah daerah, komunitas, serta berbagai stakeholder lainnya.

Guna mendukung percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, program elektronifikasi di Sumatera Utara terus diperluas. Perluasan dilakukan ke beberapa sektor seperti moda transportasi, pariwisata, hingga transaksi keuangan Pemerintah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah dari tunai menjadi non tunai. ETPD bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi di bidang sistem pembayaran.



Secara semesteran perkembangan digitalisasi daerah tercermin pada Indeks ETPD. Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya. Implementasi ETPD terus diperluas baik dari sisi perluasan elektronifikasi transaksi maupun pemanfaatan kanal pembayaran digital menjadi faktor yang mendorong peningkatan angka Indeks ETPD di Wilayah Sumatera Utara.

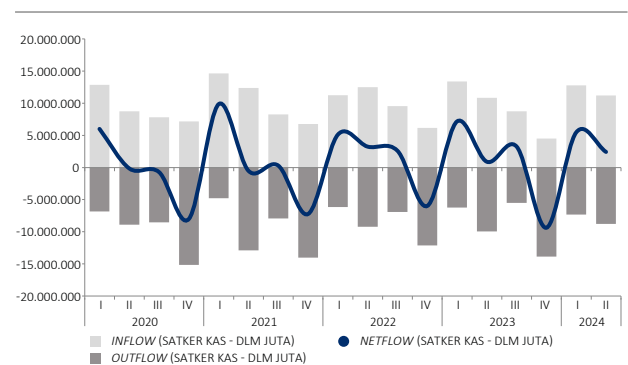
Adapun skor IETPD pada periode Semester I- 2024 seluruh pemda telah berada pada kategori Digital. Meskipun demikian, implementasi ETPD terus diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan TP2DD di daerah diantaranya pelaksanaan *Capacity Building* TP2DD se wilayah Sumatera Utara, Rapat Koordinasi TP2DD, *High Level Meeting* TP2DD, *Capacity Building* TP2DD dan lainnya.

5.3 ALIRAN UANG KARTAL MENGALAMI *NET INFLOW*

Pada triwulan II-2024, arus kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menunjukkan *net inflow* pada angka Rp2.4 triliun. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah aliran kas inflow (*inflow*) kepada Bank Indonesia se- Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar Rp11.1 triliun. Transaksi *outflow* juga mengalami peningkatan dari Rp 7.3 triliun pada triwulan I-2024 menjadi Rp 8.7 triliun pada triwulan II-2024 (Grafik 5.10).

Pada triwulan II-2024, arus kas pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia menunjukkan net *outflow* sebesar Rp898.98 miliar. Kondisi tersebut sesuai dengan pola tahunan arus kas pada Kas Titipan.

Jumlah uang palsu di Sumatera Utara selama triwulan II-2024 mengalami penurunan. Pada triwulan II-2024, temuan uang palsu di wilayah



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.10 Perkembangan *Inflow* - *Outflow*

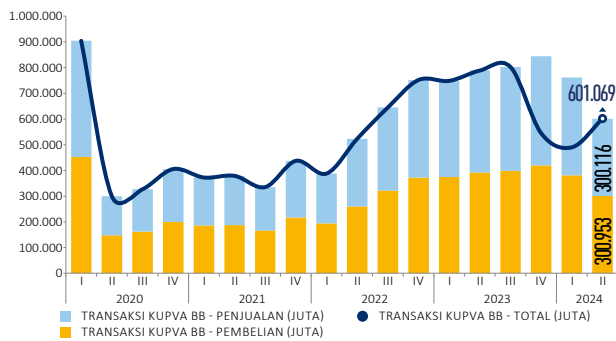
kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.892 lembar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2024 yaitu sebanyak 1.991 lembar. Sebagai upaya pengendalian peredaran uang palsu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara secara rutin melakukan edukasi pengenalan ciri ciri keaslian uang Rupiah dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan uang palsu di masyarakat.

5.4 ALIRAN TRANSFER DANA LINTAS NEGARA MASIH TERKONTRAKSI

Dukungan pasar keuangan, termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat, diperlukan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah dan perekonomian. Oleh karena itu, aturan transaksi valas terhadap Rupiah antara penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dengan pihak lain diselenggarakan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Pada triwulan II 2024, terdapat 39 KUPVA BB berizin di Sumatera Utara. Transaksi KUPVA BB tercatat sebesar 601.069 miliar atau terkontraksi sebesar -23.80% (yoy) (Grafik 5.10). Penurunan tersebut mengindikasikan industri KUPVA-BB yang realtif stagnan dengan kontraksi yang terbatas. Meskipun demikian, mata uang Asia masih tetap mendominasi transaksi KUPVA-BB seperti MYT, THB, dan SGD.

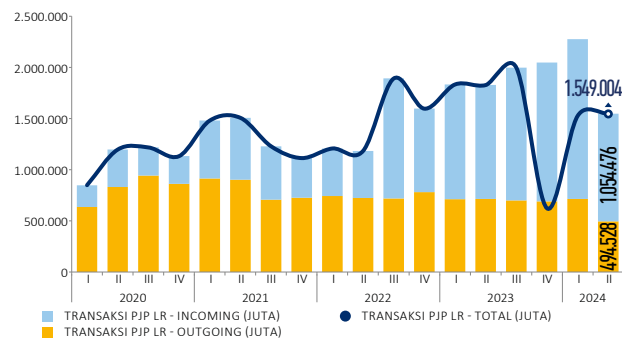




Sumber: BI, diolah

Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Transfer dana merupakan kegiatan pemindah bukuan sejumlah dana kepada penerima yang diawali dengan perintah pengiriman yang disebut perintah transfer dana, hingga dana diterima oleh penerima. Bank Indonesia juga mengatur proses perizinan, penyelenggaraan transfer dana, dan penyampaian laporan oleh penyelenggara. Tujuannya, menjamin keamanan dan kelancaran transfer dana. Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin Bank Indonesia.



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.12 Perkembangan Transaksi PJP-LR

Pada triwulan II-2024, terdapat 8 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP-LR) berizin di Sumatera Utara, dengan total kegiatan transaksi dana mencapai Rp1.55 triliun mengalami penurunan hingga -15.30% (yoy) dengan nominal transaksi dana yang masuk sebesar Rp494.52 miliar, sementara transaksi dana yang keluar sebesar Rp1.05 triliun (Grafik 5.11). Penurunan tersebut diindikasikan oleh penyesuaian mobilitas masyarakat termasuk pada aktivitas transfer dana baik dari Singapura, Malaysia, dan lainnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan



► BOKS 2

Kesiapan TP2DD dalam Mendukung Optimalisasi Implementasi dan Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sumatera Utara

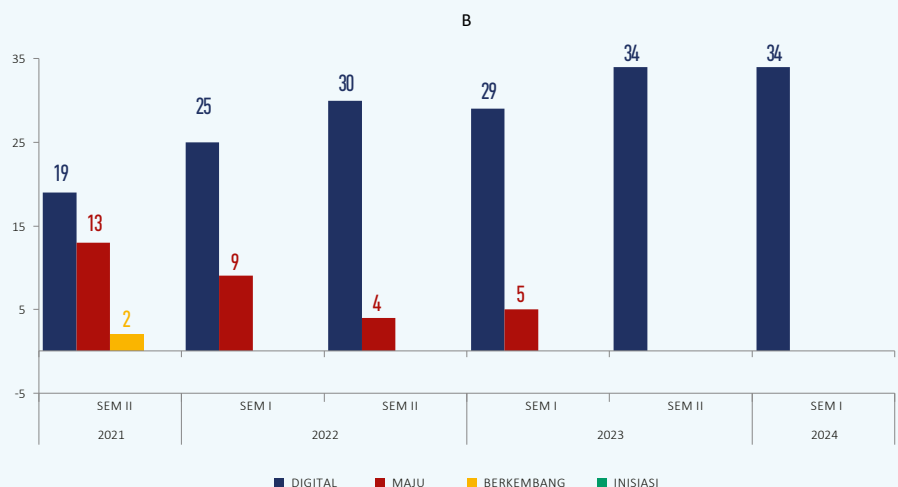


Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Indeks ETPD) periode Semester I Tahun 2024, Pemda di wilayah Sumatera Utara berhasil mempertahankan seluruhnya berada pada kategori digital. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya komitmen dan inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penilaian Indeks ETPD dilakukan sebagai *monitoring* aspek implementasi, realisasi, dan kesiapan lingkungan strategis. Melalui dukungan program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), ketersediaan kanal pembayaran non tunai telah diimplementasikan pada sebagian besar daerah di Sumatera Utara. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan realisasi kanal non tunai tersebut. Selain itu, penguatan dari sisi lingkungan strategis harus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan implementasi dan perluasan ETPD di masing-masing daerah.

Dalam rangka mendorong realisasi yang lebih optimal, telah dilakukan sosialisasi dan *user experience* bagi wajib pajak dan retribusi khususnya mengenai perkembangan keuangan digital serta perlindungan konsumen. Selain itu, Bank RKUD juga terus mendorong program kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan



■ INISIASI ■ BERKEMBANG ■ MAJU ■ DIGITAL



Gambar B2.1 (a) Sebaran Kab/Kota di Sumut berdasarkan Kategori Hasil Indeks ETPD Sem I-2024 (b) Perkembangan Indeks ETPD Sumatera Utara 2021-2024



Gambar B2.2 (a) *High Level Meeting* TP2DD Provinsi Sumatera Utara diikuti oleh Kab/Kota, (b) *Capacity Building Self assessment Championship* & Pengisian Indeks ETPD, (c) Pelaksanaan Program Sinergi TP2DD dan Perluasan Keuangan Digital QRIS

melalui pemberian reward bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara non tunai baik menggunakan QRIS maupun kanal digital lainnya. Selain itu, KPwBI Prov. Sumut juga terus mendukung Bank RKUD untuk berinovasi melalui pengembangan layanan agar terus dilakukan. Saat ini PT. Bank Sumut selaku Bank RKUD telah memiliki persetujuan sebagai *issuer* QRIS dan tengah berproses mempersiapkan sebagai *acquirer* QRIS bekerjasama dengan salah satu Penyedia Jasa Pembayaran lain.

Guna mengoptimalkan lingkungan strategis, TP2DD Sumatera Utara mendukung pemerataan kualitas jaringan telekomunikasi melalui program Satria yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, penguatan regulasi harapannya juga terus didukung oleh Kepala Daerah untuk mendukung kelancaran transaksi non tunai termasuk Perkada mengenai Kartu Kredit Indonesia. KPwBI Prov. Sumut sebagai bagian dari TP2DD juga senantiasa mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan *High Level Meeting*, *Capacity Building*, serta Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi Program TP2DD untuk menjaga keberlangsungan dan capaian kinerja TP2DD sejalan dengan upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Foto : Mesjid Rata Medan, Sumatera Utara
Sumber : Shutterstock



Bab VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 menjadi 5,10% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,24%. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 7,99% dari 8,15% pada Maret 2023. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

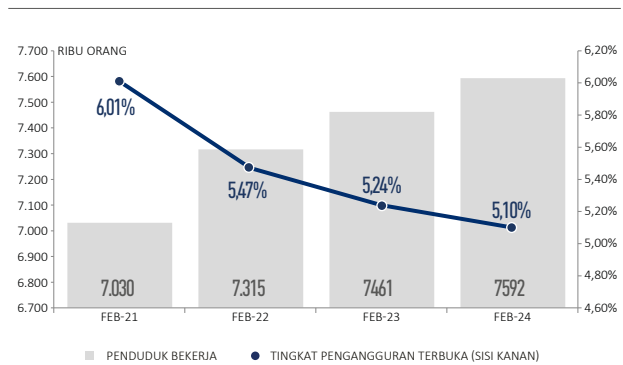


Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara pada Februari 2024 mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Februari 2024 tercatat 5,10% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,24%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan tetap tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 70,30% pada Februari 2024, tetap tinggi jika dibandingkan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 70,60%. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Konstruksi, dan LU Administrasi Pemerintahan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,18%, 0,66%, dan 0,60%.

Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan mengalami penurunan. Angka kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2024 sebesar 7,99% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 8,15%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 1,24 juta orang pada September 2022 menjadi 1,23 juta orang pada Maret 2024.

Ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin melalui rasio Gini mengalami penurunan. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2024 sebesar 0,297, lebih rendah dibandingkan September 2023 yang sebesar 0,326. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN SUMATERA UTARA MENGALAMI PERBAIKAN



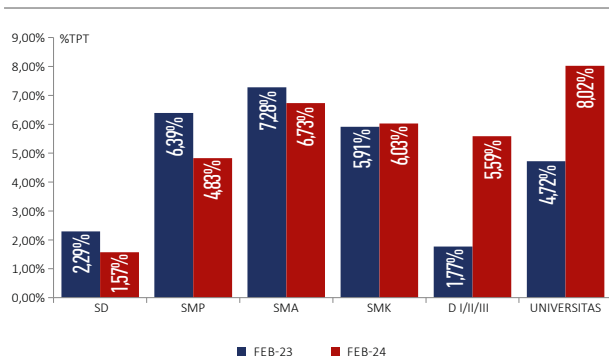
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara

Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada Februari menurun, tercermin dari indikator TPT yang turun dibanding tahun lalu menjadi 5,10% - (Grafik 6.1). Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami penurunan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Meski demikian, angka TPT Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional yang saat ini tercatat 4,82%. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya, Sumatera Utara menempati posisi ke-12 persentase TPT tertinggi dari total 38 provinsi.

Penurunan TPT didorong oleh menurunnya TPT di daerah tempat tinggal. Pada Februari 2024, TPT di wilayah perkotaan berada pada angka 6,51%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,78%, dengan penurunan sebesar 0,27% poin. Sementara itu, TPT di wilayah perdesaan pada Februari 2024 sebesar 3,31%, juga lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,44%, dengan penurunan sebesar 0,13% poin.

Penurunan TPT paling besar terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) – (Grafik 6.2). Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMP pada Februari 2024 sebesar 4,83%, menurun dibandingkan Februari 2023 sebesar 6,39%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan, jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma,



Sumber: BPS, diolah

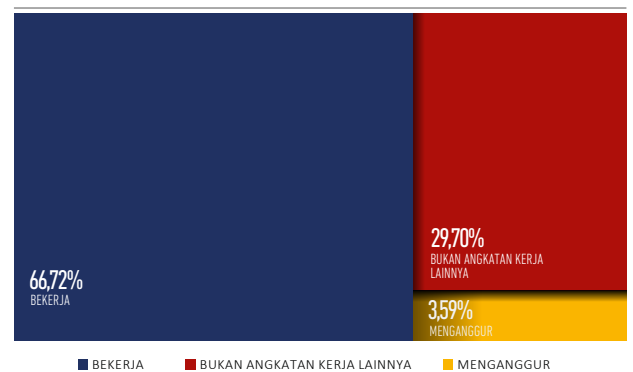
Grafik 6.2 TPT Menurut Jenjang Pendidikan

dan Universitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat sebesar 126 ribu orang, dari 7,87 juta orang per Februari 2023 menjadi 8,00 juta orang per Februari 2024. Sama halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 131 ribu orang menjadi 7,59 juta orang pada Februari 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,46 juta orang. Adapun pangsa penduduk bekerja di Sumatera Utara adalah sebesar 66,72% - (Grafik 6.3).¹

TPAK Sumatera Utara Agustus 2023 Mengalami Sedikit Penurunan. Angka TPAK pada Februari 2024 sebesar 70,30% sedikit menurun dibandingkan Februari 2023 sebesar 70,60%. TPAK² adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Meskipun demikian, jumlah penduduk usia kerja yang tercatat meningkat dari 11,15 juta orang pada Februari 2023 menjadi 11,38 juta orang pada Februari 2024 - (Grafik

- 1 TPT secara spesifik mengukur proporsi individu yang aktif mencari pekerjaan dan siap bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja, menyoroti dinamika pasar kerja aktif. Sedangkan pengertian "penduduk menganggur" mencakup semua individu tanpa pekerjaan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka sedang mencari pekerjaan atau tidak.
- 2 TPAK adalah indikator yang lebih luas yang tidak hanya menunjukkan jumlah orang yang bekerja, tetapi juga mereka yang bersedia dan mampu bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, mencerminkan kondisi pasar kerja secara keseluruhan.

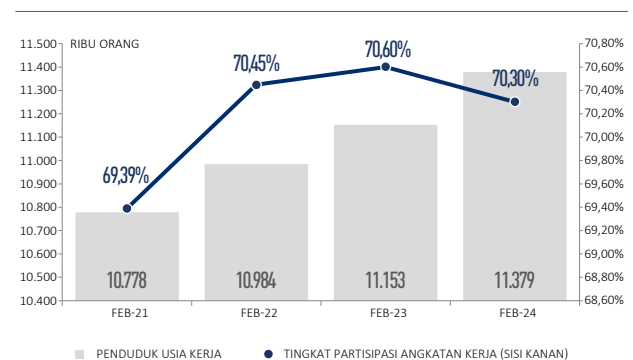


Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

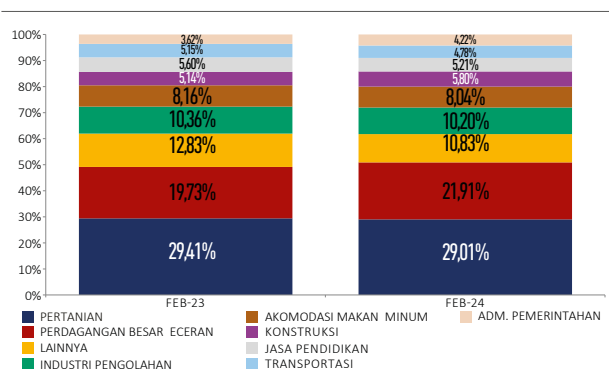
6.4). Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak serta diiringi oleh jumlah serapan tenaga kerja.

Meningkatnya kondisi perekonomian pada awal tahun 2024 berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU. Pada Februari 2024, LU yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dibandingkan tahun lalu di antaranya pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Konstruksi, serta LU Administrasi Pemerintahan - (Grafik 6.5). Peningkatan serapan tenaga kerja pada ketiga LU tersebut sejalan dengan kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2024, khususnya pada LU Adm.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK



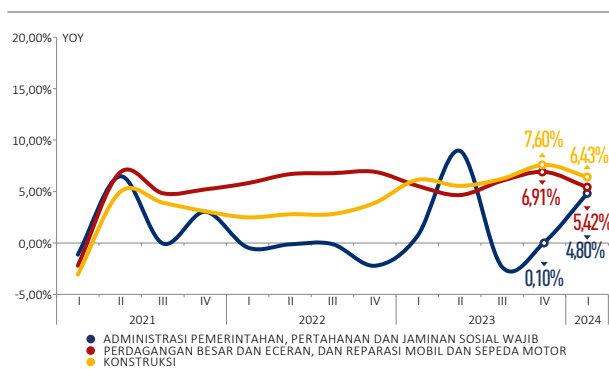
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.5 Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha

Pemerintahan – (Grafik 6.6). Meningkatnya daya beli masyarakat dan membaiknya aktivitas perekonomian menjadi faktor pendorong pertumbuhan PDRB, yang kemudian berimplikasi pada serapan tenaga kerja yang meningkat.

Pada LU Perdagangan Besar Eceran, pangsa serapan tenaga kerja pada Februari 2024 sebesar 21,91%, meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 19,73% seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Selanjutnya pangsa serapan tenaga kerja pada LU Konstruksi meningkat dari 5,14% pada Februari 2023 menjadi 5,80% pada Februari 2024. Lebih lanjut pada LU Administrasi Pemerintah, pangsa serapan tenaga kerja pada Februari 2024 sebesar 4,22%, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 3,62%, Perbaikan serapan tenaga kerja pada LU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan pertumbuhan PDRB LU Administrasi Pemerintahan pada triwulan I 2024 yang didorong oleh tingginya belanja pemerintah seiring dengan dilaksanakannya Pemilu.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan, meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara. Pangsa serapan tenaga kerja LU Pertanian pada Februari 2024 sebesar 29,01%, turun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 29,41% – (Grafik 6.5). Penurunan serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengindikasikan penurunan minat penduduk bekerja pada LU tersebut, yang berpotensi menjadi permasalahan struktural jangka panjang



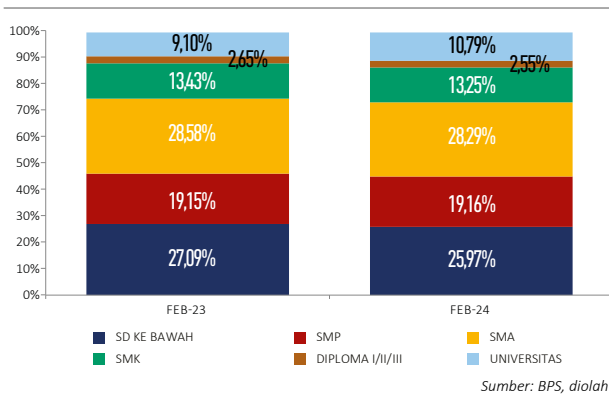
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.6 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

terutama dalam ketahanan pangan, mengingat potensi utama Sumatera Utara adalah sektor pertanian.

Dari sisi tingkat pendidikan, tenaga kerja berpendidikan atas dan tinggi mendominasi struktur tenaga kerja di Sumatera Utara. Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan tinggi atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan minimal SMA/SMK di Sumatera Utara adalah sebesar 54,88% pada Februari 2024, meningkat dibandingkan pada Februari 2023 sebesar 53,76%. Namun demikian, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa 46,24%, dengan rincian tenaga kerja berpendidikan SMP sebanyak 19,16% dan SD ke bawah sebanyak 25,97% dari total tenaga kerja – (Grafik 6.7). Berdasarkan profil tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut, diperlukan peningkatan kerja sama antardunia pendidikan dengan perusahaan (*link and match*) sehingga dapat menghasilkan pekerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar di Sumatera Utara.

Jumlah pekerja dengan jam kerja tidak penuh meningkat dari 2,50 juta orang per Februari 2023 menjadi 2,77 juta orang per Februari 2024. Pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja 1-34 jam per minggu. Namun, penduduk yang bekerja lebih atau sama dengan 35 jam kerja per minggu atau biasa disebut sebagai pekerja penuh, pada Februari 2024 ini



Grafik 6.7 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

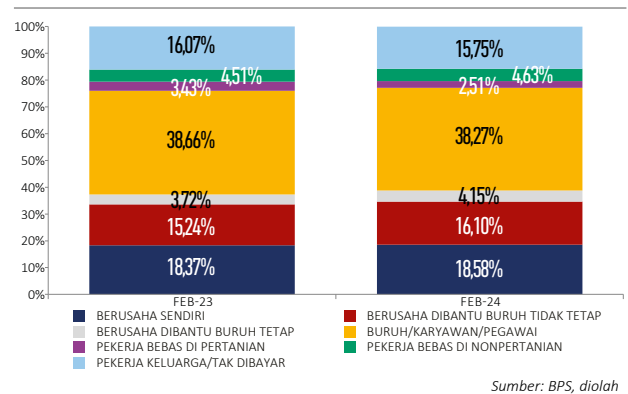
mengalami penurunan menjadi 4,82 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 4,96 juta orang – (Tabel 6.1). Peningkatan jumlah pekerja mengindikasikan kondisi perekonomian yang membaik terutama pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja khususnya pekerja tidak penuh yang semakin meningkat.

Tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi komposisi status pekerjaan utama tenaga kerja di Sumatera Utara. Dari sisi status pekerjaan utama, tenaga kerja di Sumatera Utara didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai dengan pangsa sebesar 38,27%. Namun demikian, minat berwirausaha pada tenaga kerja di Sumatera Utara juga cukup tinggi, tercermin dari pangsa tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 18,58%, menempati posisi kedua pangsa tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama terbesar di Sumatera Utara - (Grafik 6.8).

Tabel 6.1 Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/ Tidak Penuh)

Klasifikasi Pekerja	Jumlah Pekerja (Ribu Orang)					(yoy)
	Feb-21	Feb-22	Feb-23	Feb-24	Selisih	
Pekerja Penuh (≥35 jam per minggu)	4.668	4.601	4.959	4.818	(141)	-2,84%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam per minggu)	2.362	2.714	2.502	2.775	273	10,91%
-Setengah Penganggur	607	631	518	685	167	32,24%
-Pekerja Paruh Waktu	1.755	2.083	1.984	2.090	106	5,34%
Jumlah	7.030	7.315	7.461	7.593	132	1,77%

Sumber: BPS, diolah



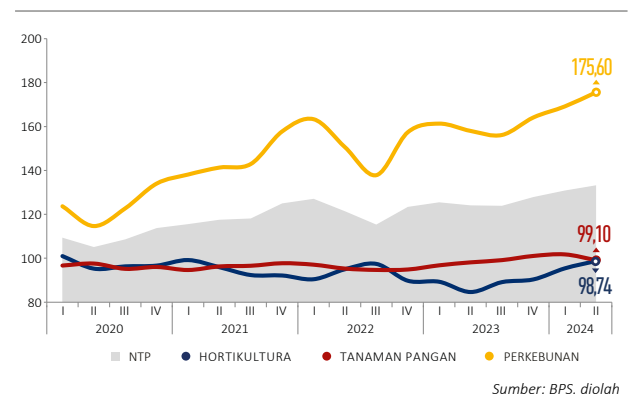
Grafik 6.8 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

6.2 KESEJAHTERAAN

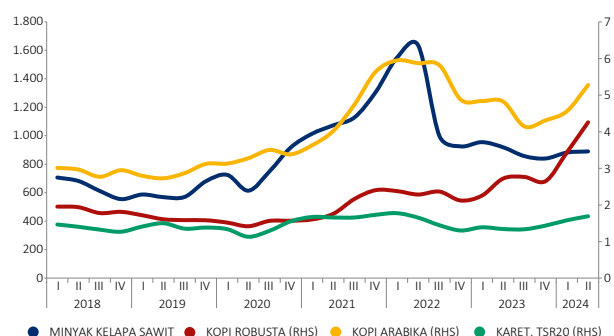
6.2.1 Nilai Tukar Petani

Pada triwulan II 2024, kesejahteraan petani di Sumatera Utara mengalami kenaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan II 2024 sebesar 133,19 atau meningkat 2,39 basis poin dibandingkan dengan triwulan I-2024 yang sebesar 130,80 – (Grafik 6.9).

Kenaikan NTP pada triwulan II 2024 terutama didorong oleh NTP Tanaman Perkebunan Rakyat. NTP sub LU Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada triwulan II 2024 tercatat mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 175,60 atau naik 6,46 basis poin dari sebelumnya 169,14 di triwulan I-2024 – (Grafik 6.9). Tren kenaikan harga TBS dan komoditas kopi di tengah cuaca yang lebih kondusif menjadi faktor pendorong kenaikan NTPR – (Grafik 6.10). Sejalan dengan NTPR, NTP tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 0,71 basis poin



Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 6.10 Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan

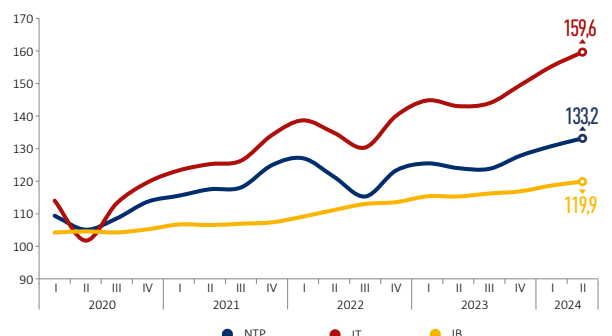
dari 101,06 di triwulan IV-2023 menjadi 101,77 di triwulan I 2024. Hal yang sama juga terjadi pada NTP subLU hortikultura yang mengalami kenaikan 5,01 basis poin menjadi 95,38 dari triwulan sebelumnya sebesar 90,36 – (Grafik 6.9).

Sejalan dengan tren NTP, tingkat penerimaan petani turut mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Pada triwulan II 2024, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 159,6, sementara indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 119,9, sehingga secara umum petani Sumatera Utara pada triwulan II 2024 mengalami kondisi surplus – (Grafik 6.11). Meski secara keseluruhan NTP Sumatera Utara berada di atas level 100, NTP di atas 100 hanya dialami oleh petani yang bekerja di subLU Perkebunan seiring dengan meningkatnya harga komoditas kopi dan kelapa sawit. Sementara itu, subLU tanaman pangan kembali berada di bawah 100 bersama dengan hortikultura yang sudah terjadi setidaknya sejak 2017. Hal ini berbeda dengan level NTP nasional, baik subLU Perkebunan, Tanaman Pangan, maupun Hortikultura berada di atas 100.

6.2.2 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan³ di Sumatera Utara pada Maret 2024 sebesar 7,99% dari jumlah

³ Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

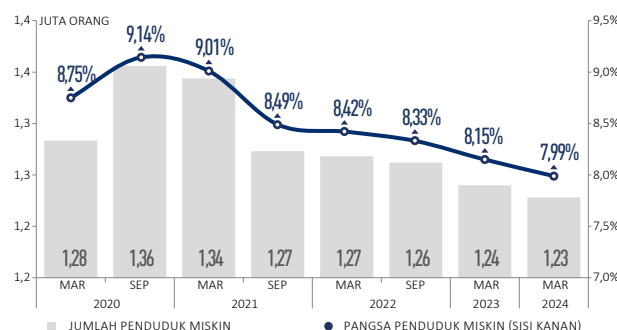


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.11 IT dan IB Sumatera Utara

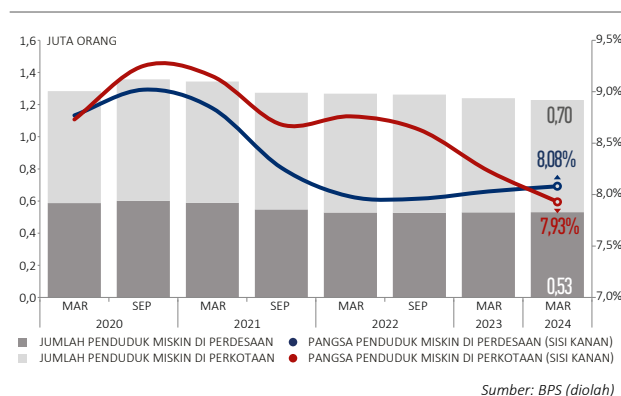
penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 8,15%. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,24 juta orang pada September 2022 menjadi 1,23 juta orang pada Maret 2023 – (Grafik 6.12). Adapun angka kemiskinan di Sumatera Utara tersebut lebih rendah daripada nasional sebesar 9,03%.

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, sementara di perdesaan justru mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 697 ribu orang atau turun sebesar 1,76% dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 530 ribu orang atau meningkat 0,15% secara triwulanan seiring dengan meningkatnya TPT perdesaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan yang sebesar 8,03% lebih rendah dibandingkan dengan



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.12 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara



Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan

tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 8,23% - (Grafik 6.13). Hal ini seiring dengan lebih tingginya biaya hidup di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan andil 75,20% di perkotaan dan 78,13% di perdesaan. Terdapat 5 (lima) komoditas utama pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah. Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik (Tabel 6.2).

Berkurangnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) secara akumulatif kota dan desa turun dari 1,26 menjadi 1,23. Penurunan P1 terjadi perkotaan, namun di perdesaan terjadi kenaikan. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun dari 0,32 menjadi 0,30 – (Grafik 6.14). Penurunan P2 terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan

Tabel 6.2 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan

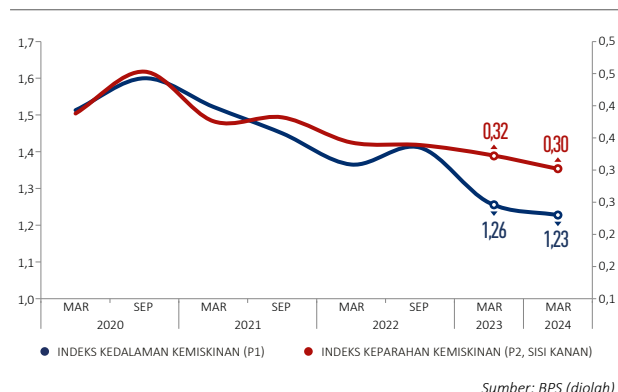
Perkotaan		Perdesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
Makanan	75,20%	Makanan	78,13%
Beras	22,54%	Beras	30,41%
Rokok kretek filter	12,43%	Rokok kretek filter	10,42%
Tongkol/tuna/cakalang	4,47%	Tongkol/tuna/cakalang	3,60%
Daging Ayam Ras	3,99%	Cabai Merah	3,53%
Telur Ayam Ras	3,73%	Telur Ayam Ras	3,28%
Cabai Merah	3,18%	Gula Pasir	2,35%
Bukan Makanan	24,80%	Bukan Makanan	22,29%
Perumahan	6,13%	Perumahan	5,70%
Bensin	3,98%	Bensin	3,04%
Listrik	3,04%	Pendidikan	1,80%
Pendidikan	2,38%	Listrik	1,67%
Perlengkapan Mandi	1,23%	Perlengkapan Mandi	1,17%
Pakaian jadi prp dewasa	0,84%	Pakaian jadi anak anak	0,89%

Sumber : BPS, diolah

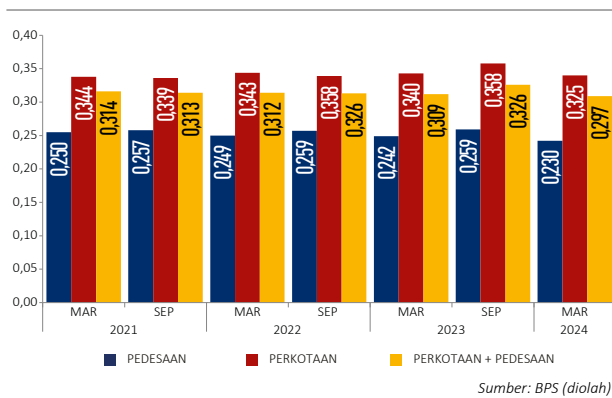
kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang di kota, meskipun sebaliknya terjadi di desa. Selanjutnya turunnya indeks P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

6.2.3 Ketimpangan Pendapatan Mengalami Penurunan

Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1.



Grafik 6.14 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan



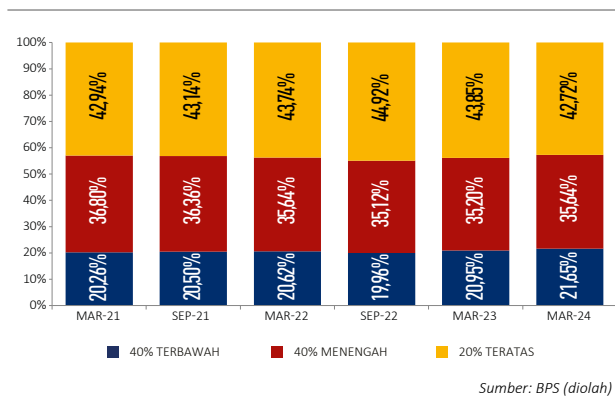
Grafik 6.15 Perkembangan Rasio Gini

Rasio Gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin berkurang. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2024 adalah sebesar 0,297, lebih rendah daripada September 2023 yang sebesar 0,326 – (Grafik 6.15). Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2024 yang sedikit lebih rendah daripada ketimpangan pada September 2022. Rasio Gini Sumatera Utara juga tercatat masih lebih rendah daripada rasio Gini nasional yang sebesar 0,379.

Ketimpangan di perkotaan lebih besar dari pedesaan. Pada Maret 2024, rasio Gini di wilayah perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,325, menurun dari periode September 2023 yang sebesar 0,358 dan lebih besar dibandingkan rasio Gini di pedesaan, yakni 0,230 – (Grafik 6.15).

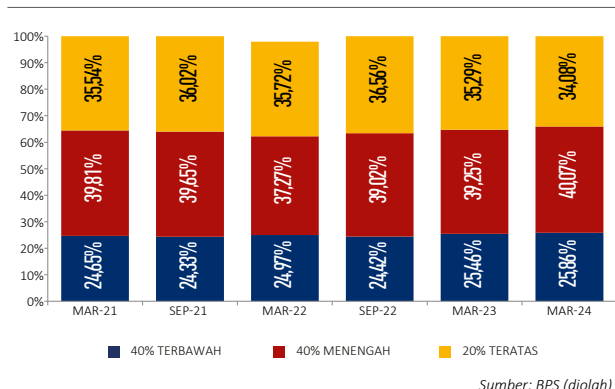
Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah. Pangsa pengeluaran kelompok 40% terbawah penduduk perkotaan di Sumatera Utara yang sebesar 21,65% menunjukkan ketimpangan yang rendah⁴ – (Grafik 6.16). Porsi ini sedikit meningkat dari Maret 2023 yang sebesar 20,95%. Untuk menekan rasio Gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan bantuan pendapatan melalui program bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi produktif.

⁴ Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dalam kategori rendah apabila di atas 17%.



Grafik 6.16 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan

Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan di Sumatera Utara juga masuk dalam kategori rendah dengan pangsa 40% kelompok masyarakat berpendapatan terbawah mencapai 25,86% - (Grafik 6.17). Porsi ini meningkat dari Maret 2023 dengan pangsa sebesar 24,46%. Selanjutnya pangsa 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah di wilayah pedesaan naik menjadi 40,07%. Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpendapatan teratas menurun menjadi 34,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah pedesaan Sumatera Utara semakinimbang dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah pedesaan yang relatif lebih serupa dibandingkan di wilayah perkotaan.



Grafik 6.17 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Pedesaan

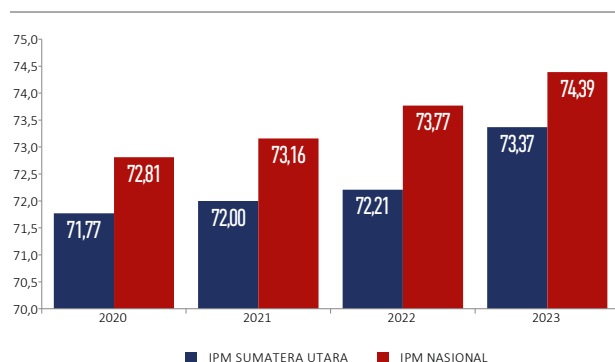


Tabel 6.3 IPM Sumut Menurut Komponen					
Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	69,10	69,23	69,61	69,98
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	10.420,00	10.499,00	10.848,00	11.049,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71,77	72,00	72,21	73,37
Pertumbuhan IPM (yoy)	%	0,83	0,32	0,29	1,61

Sumber: BPS (diolah)

Secara umum, pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.

Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara menjadi 73,37 atau meningkat dari 2022 yang sebesar 72,21 – (Tabel 6.3). Peningkatan IPM didorong oleh perbaikan seluruh komponen. Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara berada di bawah IPM Nasional yang sebesar 74,39 – (Grafik 6.18).



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.18

Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional







Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada rentang 4,5-5,3% (yoy), meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan 2024 diperkirakan tetap kuat didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara itu, *rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan dapat menahan laju kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024.

Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan dapat diandalkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan normalisasi harga bahan baku (pupuk), serta permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel, dan kegiatan Pilkada menjelang akhir tahun 2024. Selain itu, penyelenggaraan PON XXI Aceh – Sumut pada triwulan III-2024 diperkirakan akan mendorong kinerja konstruksi dan pengeluaran investasi bangunan.

Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai antara lain dampak konflik geopolitik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.



7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

7.1.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada 2024 dengan dukungan permintaan domestik yang cukup kuat di tengah risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang kisaran 4,5-5,3% (yoy).

Dari sisi eksternal, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Setelah *rebound* awal yang kuat dari kedalaman pandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan pulih terbatas pada tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan revisi proyeksi dari *World Economic Outlook* bulan Juli 2024 yang memproyeksikan perekonomian global tahun 2024 sejalan dengan proyeksi April 2024 – (Tabel 7.1). Namun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut masih berada di bawah rata-rata tahunan historis (2000–2019) sebesar 3,8% (yoy). Beberapa faktor menghambat pemulihan tersebut, antara lain konsumsi AS dan kinerja perdagangan luar negerinya yang masih terbatas, serta dampak disrupsi industri otomotif di Jepang. Namun, permintaan domestik yang tetap resilien sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan PON XXI, dan berlanjutnya penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan dapat menjaga kinerja lapangan usaha utama di Sumatera Utara di 2024. Selain itu, tingkat inflasi yang diperkirakan terkendali juga berpotensi turut menjaga tingkat keyakinan konsumen dan menopang daya beli masyarakat.

7.1.1.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan ekspektasi ekonomi domestik yang tetap kuat, yang terkait erat dengan peningkatan pendapatan rumah tangga akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan gaji ASN, serta berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah

seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenaikan UMP dan gaji ASN serta program perlindungan sosial ini diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingkat inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Kemudian, terdapat potensi penurunan suku bunga global pada 2024 yang dapat menstimulasi permintaan kredit dalam mendorong konsumsi.

Meskipun demikian, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pengurangan permintaan global dapat menurunkan harga komoditas ekspor Sumatera Utara dan mempengaruhi pendapatan bagi petani, pekerja industri, dan bisnis yang terkait. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga dan daya beli, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi rumah tangga.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan turut terakselerasi seiring penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kapasitas fiskal yang lebih baik. Prospek ekonomi Nasional yang lebih baik di 2024, yang tecermin dari resiliennya permintaan domestik, memberikan optimisme bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan target penerimaannya. Pendapatan tersebut antara lain diharapkan berasal dari peningkatan pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak dari sektor perhotelan dan restoran, yang merupakan indikator penting dari kegiatan ekonomi lokal. Dengan naiknya pendapatan ini, rencana belanja pemerintah daerah diprediksi akan menjadi lebih ekspansif.

Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 diperkirakan turut mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, untuk berbagai keperluan, seperti logistik Pemilu, pembayaran petugas Pemilu, kampanye informasi dan edukasi pemilih, serta keamanan. Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sumatera Utara dapat turut menjadi



Tabel 7.1		Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia					
Negara	%, yoy						
	2022	2023	2024*	2024**	2025*	2025**	
Dunia	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	
Negara Maju	2,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	
Amerika Serikat	2,1	2,5	2,7	2,6	1,9	1,9	
Kawasan Euro	3,5	0,4	0,8	0,9	1,5	1,5	
Jepang	1,0	1,9	0,9	0,7	1,0	1,0	
Britania Raya	4,1	0,1	0,5	0,7	1,5	1,5	
Negara Berkembang	4,0	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2	
Tiongkok	3,0	5,2	4,6	5,0	4,1	4,5	
India	7,2	7,8	6,8	7,0	6,5	6,5	
ASEAN	5,5	4,1	4,5	4,5	4,6	4,6	

Sumber: World Economic Outlook IMF, diolah;
(*) proyeksi April 2024; (**) proyeksi Juli 2024

penggerak konsumsi pemerintah, terutama dari sisi belanja modal.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan turut meningkat pada 2024. Di level global, tingkat suku bunga negara-negara maju yang diperkirakan mulai menurun di 2024 berpotensi meningkatkan kredit investasi dan mendukung kinerja investasi di 2024. Selain itu, mulai berlakunya peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja secara efektif di 2024 dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus melakukan kegiatan promosi investasi dan mengelola persepsi positif terkait Sumatera Utara guna mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara serta menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Walaupun demikian, situasi ekonomi global yang saat ini masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dan kondisi pasar keuangan global yang diperkirakan akan tetap volatil diperkirakan dapat berdampak pada kinerja investasi. Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan di tingkat Nasional dan daerah berpotensi meningkatkan sikap kehati-hatian para investor dalam melakukan investasi.

Kinerja ekspor pada 2024 diperkirakan melambat sejalan dengan perkiraan perlambatan permintaan dunia. *Rebound* ekonomi Tiongkok yang tidak setinggi perkiraan akibat permasalahan struktural pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan berdampak pada kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Lemahnya permintaan pada negara-negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan turut berdampak pada terbatasnya peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar global yang selanjutnya ditransmisikan pada risiko menurunnya surplus neraca perdagangan Sumatera Utara. Meski demikian, masih terdapat peluang meningkatkan kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang memiliki ekonomi yang juga resilien di 2024 seperti India dan negara-negara ASEAN.

7.1.1.2 Komponen Lapangan Usaha

LU Pertanian diperkirakan mengalami perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Walaupun masih terdapat potensi El Nino di 2024, dampaknya terhadap produksi pangan diperkirakan tidak signifikan. Selain itu, serangkaian kebijakan pemerintah yang diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan upaya normalisasi harga bahan baku (pupuk) yang disertai peningkatan alokasi pupuk subsidi diharapkan dapat mempercepat pemulihan LU Pertanian. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit untuk mendukung program biofuel dan penguatan kesejahteraan petani tercermin dari NTP yang tetap tinggi dan kuat diharapkan dapat turut mendorong kinerja LU Pertanian. Namun demikian, harga komoditas di pasar internasional yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih dan masih tingginya biaya produksi dapat berpotensi menahan laju kinerja LU Pertanian.

Kinerja LU Industri Pengolahan dan Perdagangan diperkirakan tetap kuat seiring dengan kuatnya permintaan domestik dan ekspor. Implementasi program hilirisasi industri kelapa sawit untuk kebutuhan campuran bahan bakar (B35) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 diprediksi mendorong kinerja



LU Industri Pengolahan di 2024. Sedangkan pada LU Perdagangan, kombinasi konsumsi masyarakat yang kuat dan adopsi teknologi digital dalam perdagangan diperkirakan akan terus berkembang terutama pada generasi muda, membuka peluang bagi peningkatan efisiensi dan jangkauan pasar sehingga dapat berdampak positif pada kinerja LU Perdagangan. Namun demikian, eskalasi ketegangan geopolitik dapat memicu peningkatan harga energi dan bahan baku yang berikutnya dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat menahan laju kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan.

Pertumbuhan LU Konstruksi diperkirakan menguat pada 2024. Selesaiannya pembangunan infrastruktur PSN di tahun 2024 a.l. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematangsiantar, Bendungan Lau Simeme, dan Kereta Api Rantau Prapat-Kota Pinang, pembatalan PSN Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran dan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat, serta penggunaan fasilitas eksisting untuk *venue* PON XXI Aceh-Sumut 2024 diperkirakan dapat memengaruhi kinerja LU Konstruksi. Selain itu, berlanjutnya konflik geopolitik di Timur Tengah diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga energi, yang dapat mendorong harga transportasi sehingga dapat berdampak pada permintaan masyarakat.

7.1.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2024, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai.

Pertama, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada perekonomian domestik. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berasal dari permintaan luar negeri sehingga perkembangan kondisi ekonomi global akan turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh berlanjutnya konflik geopolitik diperkirakan berpotensi memperpanjang gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga energi dan pangan. Ketidakpastian

global ini juga dapat meningkatkan sikap kehati-hatian investor (*wait and see*) yang berisiko menghambat kinerja investasi dan perdagangan eksternal. Selain itu, terjadinya gelombang panas akibat perubahan iklim di sejumlah negara (El Nino) diperkirakan berpotensi mengganggu laju pemulihan ekonomi global dan permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara.

Dari sisi industri, kesiapan industri domestik dalam merespons permintaan menjadi perhatian utama dalam memanfaatkan momentum di Selain itu, kondisi ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Sumatera Utara dan semula diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi global pasca COVID-19 diperkirakan tumbuh lebih lemah dari prakiraan sebelumnya di tahun 2024. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti kinerja sektor properti yang terus turun, utang rumah tangga yang meningkat, dan penurunan ekspor. Lemahnya aktivitas ekonomi pada negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan menahan kenaikan harga komoditas ekspor Sumatera Utara terutama CPO. Meski demikian, masih terdapat peluang peningkatan kinerja ekspor, terutama pada India dan negara-negara ASEAN yang diperkirakan memiliki kinerja ekonomi yang resilien di 2024.

Kedua, masih terdapat tantangan tekanan inflasi yang diperkirakan penurunan produksi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah seiring dengan berakhirnya musim panen raya. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga di akhir tahun 2024. Selain itu, adanya prakiraan peningkatan permintaan ekspor CPO dan belum adanya keputusan mengenai aturan DMO berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng. Tingginya permintaan masyarakat menjelang terlaksananya Pilkada serentak di tahun 2024 juga mendorong peningkatan belanja pemerintah dan meningkatnya mobilitas masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan produksi untuk komoditas yang belum mencapai swasembada perlu menjadi prioritas dalam



pengendalian inflasi pangan. Perluasan kerjasama antardaerah dan penguatan infrastruktur diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi yang pada akhirnya turut menjaga ketersediaan pasokan. Ekspektasi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam menjaga tingkat inflasi di tengah kondisi ekonomi yang diliputi ketidakpastian.

Ketiga, perekonomian Sumatera Utara belum terdistribusi secara merata, masih terpusat di Pantai Timur, khususnya kawasan Mebidangro.

¹ Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur yang sebagian besar terkonsentrasi pada kawasan pelabuhan dan kawasan industri di wilayah tersebut. Infrastruktur yang belum optimal dapat menghambat potensi aglomerasi industri antarwilayah karena biaya logistik yang tinggi dan berdampak negatif pada daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Pengembangan aglomerasi industri diperlukan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah yang lebih besar. Produksi komoditas sejenis yang bersaing dari negara lain juga menuntut peningkatan kualitas produksi. Hilirisasi industri pengolahan dalam pengembangan aglomerasi industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas utama. Adapun penciptaan aglomerasi industri memerlukan peran investor. Dengan demikian, ketentuan terkait insentif dan kemudahan investasi serta penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja perlu untuk segera diselesaikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Keempat, masih terbatasnya pengembangan infrastruktur ekonomi hijau.

Ditengah isu perubahan iklim yang semakin mengemuka, pembangunan yang seimbang dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di daerah yang mengandalkan sumber daya alam. Sumatera Utara sendiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau. Sumatera Utara perlu merespon terhadap kecenderungan global yang semakin

peduli terhadap pentingnya implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketergantungan perekonomian Sumatera Utara terhadap eksternal, hal ini dapat berpengaruh terhadap daya saing produk Sumatera Utara di pasar internasional. Selain itu, masih terbatasnya peluang pembiayaan hijau dan ketersediaan infrastruktur pendukung di ekonomi hijau dikarenakan biaya transisi yang tinggi untuk beralih ke industri hijau. Selain itu, pelaku usaha juga masih memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas mengenai taksonomi hijau dan persyaratan untuk dapat memenuhi taksonomi hijau tersebut.

Kelima, Sumatera Utara masih menghadapi tantangan ketimpangan tingkat akseptansi sistem pembayaran digital.

Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, jika dirancang dengan benar, dapat meningkatkan output perekonomian. Potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena transaksi nontunai masih didominasi oleh kota-kota besar. Hal tersebut tecermin dari merchant QRIS di Kota Medan yang mencapai hampir 576 ribu atau 44.53% dari total merchant Sumatera Utara. Dari sisi nominal dan volume transaksi QRIS, Kota Medan mendominasi hingga 81.81% dan 80.53% dari total transaksi Sumatera Utara.

Tantangan disparitas akseptansi keuangan digital disebabkan oleh tiga elemen utama yaitu belum meratanya literasi keuangan digital termasuk untuk mengatasi risiko siber, infrastruktur jaringan telekomunikasi, dan masih terbatasnya inovasi industri keuangan di daerah.

7.2 PROSPEK INFLASI

7.2.1 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2024

Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia perlu

¹ Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Tanah Karo



terus diperkuat untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024.

Dari sisi global, tekanan inflasi pada 2024 diperkirakan akan mereda dibanding tahun 2023, meski masing-masing negara memiliki laju disinflasi yang berbeda. IMF memproyeksikan negara-negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan inflasi rata-rata tahunan sebesar 2,7 poin persentase pada tahun 2023, sekitar dua kali lipat dari penurunan yang diproyeksikan (1,3 poin persentase) untuk negara-negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan paparan setiap negara yang berbeda terhadap guncangan pada harga komoditas dan nilai tukar, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang lebih rentan terhadap kedua jenis guncangan tersebut. Pada saat yang sama, laju inflasi di negara maju masih di atas sasaran (2%), dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global.

Dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari akselerasi harga pada seluruh komponen disagregasi, baik *Core Inflation (CI)*, *Administered Price (AP)*, dan *Volatile Food (VF)*. Arah komponen CI berpotensi mengalami akselerasi didorong oleh potensi meningkatnya kegiatan kampanye politik menjelang Pilkada yang mendorong mobilitas dan peningkatan permintaan sembako (bansos), potensi peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, hingga potensi berlanjutnya peningkatan harga emas dunia (*safe haven*). Selanjutnya, inflasi komponen VF justru diperkirakan menurun akan didorong oleh adanya beberapa rencana panen komoditas di wilayah Sumatera Utara pada triwulan III 2024: (i) Padi yang panen besar pada Juli - September (terakhir panen besar pada Feb-April;

(ii) Cabai Merah yang panen besar pada Juli – Agustus. Meskipun demikian, di penghujung 2024 masih terdapat potensi peningkatan inflasi VF (yoy) akibat prakiraan penurunan produksi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah seiring dengan berakhirnya musim panen raya. Selain itu, diperkirakan terdapat kenaikan permintaan ekspor CPO dan belum adanya keputusan mengenai aturan DMO yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng. Arah komponen AP juga diperkirakan akan sedikit mengalami akselerasi didorong oleh peningkatan harga avtur serta terbatasnya kapasitas penerbangan Nasional ditengah tingginya permintaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara dan HBKN Nataru yang berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat.

Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi sembari terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor. Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan *stakeholders* terkait terutama dalam mendukung GNPIP agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2024.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2024 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Langkat, Kab. Karo, dan Kab. Dairi yang resmi ditandatangani pada 13 Mei 2024 lalu dengan komoditas telur ayam ras, ikan, dan cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi *urban farming*. Selain itu, program pengendalian inflasi di Sumatera Utara ke depannya juga diarahkan untuk lebih preventif dengan mendeteksi secara dini fluktuasi harga-harga komoditas strategis melalui mekanisme *Early Warning System*. Disamping itu, telah dilaksanakan HLM TPID & TP2DD wilayah Sisibataslabuhan (Pematangsiantar,



Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan) pada 22 Mei 2024. HLM bertujuan untuk menetapkan sinergi ketahanan pangan dan kolaborasi perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah untuk kesejahteraan Sisibataslabuhan. Dalam upaya menjaga inflasi tahun 2024 serta menjaga stabilisasi harga menjelang hari raya Idul Adha 1445 H diterbitkannya SE Gubernur Sumut tanggal 31 Mei 2024 dengan maksud OPD terkait diminta untuk mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, melakukan sinergi pengawasan, intervensi pasar melalui pasar murah/GPM, memastikan ketersediaan stok dan distribusi pasokan pangan melalui subsidi ongkos angkut. Disamping itu, OPD juga diminta untuk melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan penyesuaian tarif yang menjadi kewenangan pemda, melakukan moral persuasion, hingga merealisasikan dana BTT.

7.2.2 Risiko Tekanan Inflasi Meningkat

Risiko tekanan inflasi, antara lain adalah 1) tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global; 2) peningkatan permintaan domestik secara signifikan (*pent-up demand*) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 3) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu yang tidak dapat dikelola optimal; 4) kenaikan biaya saprodi impor sebesar 40%-60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi kelompok bahan makanan, khususnya komoditas hortikultura; 5) perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk yang dapat menekan jumlah produksi pangan; serta 6) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia tetap memperkuat sinergi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, juga TPID, agar inflasi dapat terjaga dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ di tahun 2024.

7.3 REKOMENDASI

Dengan berbagai tantangan yang ada, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, berbagai strategi penguatan perlu dilakukan:

1) Pertama, memperkuat kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam TPID - GNPIP terutama untuk merumuskan langkah antisipatif yang efektif terkait pengendalian inflasi. Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi 5 (lima) arahan Presiden dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan kebangkitan ekonomi nasional. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui: i) perluasan KAD terintegrasi; ii) optimalisasi penyerapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi; iii) implementasi sistem deteksi dini harga komoditas pangan strategis; dan iv) hilirasi produk komoditas pangan strategis penyumbang inflasi.

Upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K dapat dilakukan melalui penguatan peran BUMD Sumatera Utara dalam pengendalian harga komoditas pangan, dengan mengacu pada *best practices* dan *success story* di beberapa wilayah. Sebagai contoh, dukungan penuh pemda melalui perencanaan program dan alokasi anggaran, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan menjadi salah satu *key success factor* dalam pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Lebih lanjut, Program Ketahanan Pangan dalam upaya pengendalian inflasi DKI Jakarta dilakukan dengan kolaborasi antara OPD dan BUMD Pangan, dengan OPD sebagai *demand creator* dan BUMD Pangan (Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya) sebagai penyedia pasokan melalui KAD, dan penyalur pangan bersubsidi serta pangan murah.

2) Kedua, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Penciptaan



aglomerasi industri membutuhkan ketersediaan regulasi daerah, pemetaan potensi masing-masing daerah, investor yang mampu mendukung proses pengembangan industri, dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, penguatan iklim investasi dapat dilakukan dengan mendorong kesiapan daerah dalam implementasi OSS-RBA, percepatan penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung, dan membantu promosi investasi melalui peningkatan kolaborasi *North Sumatra Invest* (NSI) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, NSI akan lebih berperan dalam mendorong ketersediaan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan mendorong proyek-proyek investasi yang ada di Sumatera menjadi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sehingga semakin menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

3) Ketiga, perlu kesiapan industri untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Hal ini melibatkan hilirisasi industri untuk komoditas-komoditas ekspor dalam mengantisipasi lemahnya permintaan bahan mentah dari negara-negara tujuan ekspor di 2024. Proses hilirisasi ini perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan produk pertanian lainnya, melalui pengembangan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, hilirisasi ini harus didukung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pembukaan pendidikan kejuruan/vokasi oleh Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan swasta dan BUMD, untuk menciptakan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja (*link and match*). Lebih lanjut, peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi krusial untuk mempercepat proses hilirisasi industri di Sumatera Utara.

4) Keempat, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan hijau. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan sangat penting dalam mendorong sektor ini. Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu didorong oleh Pemerintah Daerah, dengan dukungan dari regulator dan industri keuangan dari sisi akses pembiayaan hijau.

Selain itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi hijau di sektor pertanian, Pemerintah Daerah di Sumatera Utara perlu memprioritaskan inisiatif untuk mendorong pelaku usaha di sektor pertanian, antara lain dalam komoditas ekspor, untuk mengadopsi implementasi praktik berkelanjutan, antara lain dengan sertifikasi standar lingkungan seperti sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Mengingat kompleksitas isu lingkungan dalam sektor pertanian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama meminimalisasi efek samping implementasi praktik berkelanjutan dengan mendukung pelaku bisnis kecil di sektor ini, baik dari sisi peningkatan kapasitas maupun pembiayaan hijau. Berdasarkan riset Pambekti dan Lestari (2023) yang dipresentasikan dalam 4th *Sumatranomics*, pembiayaan hijau terbukti secara signifikan dapat membantu pelaku bisnis pertanian untuk mengadopsi praktik berkelanjutan di Pulau Sumatera. Sebagai contoh, dengan pembiayaan hijau, petani dapat memasang panel surya atau sistem energi terbarukan lainnya yang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang cenderung merusak lingkungan. Sinergi Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan otoritas lainnya dapat dilakukan dalam menyediakan insentif pengembangan ekonomi hijau di sektor pertanian, seperti dalam penyusunan regulasi insentif bagi pengembangan ekonomi hijau maupun mengarahkan perbankan dalam meningkatkan kredit kepada UMKM pertanian dalam rangka memenuhi standar lingkungan. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi



juga meningkatkan reputasi dan akses pasar bagi produk pertanian Sumatera Utara di panggung internasional dalam mendukung ekonomi hijau.

- 5) **Kelima, penguatan sinergi untuk mendukung upaya pemerataan akseptansi digital sistem pembayaran sejalan dengan penguatan dan kebangkitan ekonomi Sumatera Utara.** Bank Indonesia senantiasa memperluas edukasi guna meningkatkan literasi keuangan digital termasuk penguatan perlindungan konsumen bersama regulator lainnya, Pemerintah Daerah, dan industri keuangan di daerah sejalan mendukung capaian perluasan QRIS 2024. Bersama dengan penguatan peran TP2DD, Pemerintah Daerah dapat turut mendukung monitoring penyediaan jaringan telekomunikasi khususnya pada daerah 3T melalui pemanfaatan PSN Satelit SATRIA-1 di masing-masing daerah. Lebih daripada itu, perluasan transaksi nontunai ini juga perlu didukung oleh inovasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penguatan kerjasama TP2DD dengan pihak lainnya, serta penekanan peran penting dari Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam kaitan ini, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga perlu dipastikan tetap berjalan dengan baik melalui monitoring elektronifikasi moda transportasi, bantuan sosial nontunai, dan destinasi wisata super prioritas.

Bank Indonesia hadir sebagai fasilitator dan katalisator memperkuat ekosistem digital sejalan dengan penguatan ekonomi di daerah. Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, asosiasi sistem pembayaran fintech maupun *e-commerce*, serta komunitas di daerah untuk senantiasa memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran kepada masyarakat.

- 6) **Keenam, mengoptimalkan peran *local champion* sebagai *role model* dalam implementasi *best practices* dan melaksanakan *capacity building* serta pendampingan yang terfokus kepada pelaku UMKM.** *Local champion* adalah pelaku UMKM yang berdedikasi tinggi

dan terbuka terhadap perubahan demi kemajuan kelompoknya. Diharapkan *local champion* dapat menjadi *role model* untuk mendorong perubahan *mindset* tidak hanya di kelompoknya, tetapi juga di kelompok-kelompok lainnya. Selain itu, kami juga memandang perlunya penguatan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam berbagai program kegiatan pameran dan *capacity building* UMKM, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam pengembangan ekonomi syariah, HEBITREN diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren.





Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Daftar Istilah

Administered Prices

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

Barang Modal (Capital Goods)

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1 tahun.

Bahan Baku (Raw Material)

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

BI 7 Day Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

CPO (Crude Palm Oil)

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (*deposito*).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflow

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin.

Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

Kredit Konsumsi

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

Liaison

uat kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

Loan to Value (LTV)

Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan.

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)

Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank syariah.

NTP (Nilai Tukar Petani)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB Riil

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

**Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta.

Survei Konsumen

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Survei Penjualan Eceran

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

Uang Kartal

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

Volatile Food

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

Year on year (yoy)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).





Tim Penyusun

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara**

Pengarah

I G P Wira Kusuma

Editor

**Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Deputi Kepala Perwakilan**

Yura Djalins

Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Abdul Khalim

Kontributor

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Aegina Siswana Surbakti

Tutut Tiana

Ahmad Adi Nugroho

Yulian Zifar Ayustira

Adela Khairunnisa Nugraha

Alysha Putri Salsabila

Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Fungsi Implementasi Pengawasan dan SP-PUR

Eka Putra Budi Nugroho

Fika Akhmad

Zulpan Riski Amanda

Chatherine Nathasya Agnes Tobing

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Telp. 061-4150500

Fax. 061-4534760

Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Balaikota No.4, Kesawan
Kota Medan, Sumatera Utara

